



PERATURAN GUBERNUR NOMOR 31 TAHUN 2023

Tentang

**RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023 - 2026**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Kordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023-2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2023-2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
3. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Sumatera Barat
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2023 2026, yang selanjutnya disebut RAD TPB adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional.

Pasal 2

RAD TPB merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

Pasal 3

Maksud penetapan RAD TPB adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2023–2026.

Pasal 4

Dalam penetapan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah periode yang sedang berjalan serta mengacu pada sasaran TPB nasional.

Pasal 5

Tujuan penetapan RAD TPB adalah sebagai pedoman dalam:

- a. menetapkan arah kebijakan umum, strategi dan program serta kegiatan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan selama 5 (lima) tahun ke depan agar target capaian TPB yang diharapkan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik Daerah; dan
- b. penyusunan dan pelaksanaan RKPD.

Pasal 6

- (1) RAD TPB memuat komitmen Pemerintah Daerah, kondisi capaian dan tantangan, target dan arah kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Daerah.
- (2) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai ukuran pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2023-2026.

Pasal 7

- (1) RAD TPB disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I memuat pendahuluan

Bab II memuat kondisi pencapaian dan tantangan pelaksanaan TPB

Bab III memuat target dan arah kebijakan pencapaian TPB

Bab IV memuat pemantauan, evaluasi dan pelaporan

Bab V memuat penutup

- (2) RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan laporan pencapaian atas pelaksanaan RAD TPB kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional setiap tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 25 Oktober 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 32 TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN
2023-2026.

**RENCANA AKSI DAERAH
TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2023-2026**

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD	I-1
1.2. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan/ <i>Sustainable Development Goals</i> (TPB/SDGs)	I-26
1.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs	I-90
1.4. Pembiayaan TPB/SDGs	I-90
1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs	I-91
1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB	I-92
BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs	II-3
2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun	II-3
2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	II-20
2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	II-30
2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	II-39
2.5. Mencapai Kesenjangan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	II-47
2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak	II-52
2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern.	II-57
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan	II-60
2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	II-67
2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegeara	II-71
2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan	II-75
2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	II-83
2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	II-89
2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan	II-92
2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan	II-96
2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh	II-100

2.17.	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global	II-105
2.18.	Tantangan dan Kendala Pelaksanaan TPB/SDGs	II-122
BAB III	TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs	III-1
3.1.	Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	III-13
3.2.	Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	III-32
3.3.	Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	III-46
3.4.	Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	III-57
3.5.	Tujuan 5 Kesetaraan Gender	III-67
3.6.	Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	III-74
3.7.	Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	III-78
3.8.	Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	III-82
3.9.	Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	III-88
3.10.	Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	III-94
3.11.	Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	III-99
3.12.	Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	III-106
3.13.	Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	III-113
3.14.	Tujuan 14 Ekosistem Lautan	III-118
3.15.	Tujuan 15 Ekosistem Daratan	III-124
3.16.	Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	III-129
3.17.	Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	III-147
BAB IV	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	IV-1
4.1.	Tujuan Pemantauan dan Evaluasi	IV-1
4.2.	Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi	IV-1
4.3.	Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS	IV-3
4.4.	Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi	IV-10
BAB V	PENUTUP	V-1
LAMPIRAN		
1.	Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	
2.	Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota	
3.	Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keselaran dan Sinergi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	I-7
Tabel 1.2	Pemetaan Indikator Kunci SDGs dalam Peta Jalan SDGs Indonesia di Provinsi Sumatera Barat	I-23
Tabel 1.3	Komitmen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	I-28
Tabel 2.1	Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022	II-2
Tabel 2.2	Capaian Tujuan 1 di Provinsi Sumatera Barat	II-5
Tabel 2.3	Capaian Tujuan 2 di Provinsi Sumatera Barat	II-21
Tabel 2.4	Capaian Tujuan 3 di Provinsi Sumatera Barat	II-31
Tabel 2.5	Capaian Tujuan 4 di Provinsi Sumatera Barat	II-40
Tabel 2.6	Capaian Tujuan 5 di Provinsi Sumatera Barat	II-48
Tabel 2.7	Capaian Tujuan 6 di Provinsi Sumatera Barat	II-53
Tabel 2.8	Capaian Tujuan 7 di Provinsi Sumatera Barat	II-58
Tabel 2.9	Capaian Tujuan 8 di Provinsi Sumatera Barat	II-61
Tabel 2.10	Capaian Tujuan 9 di Provinsi Sumatera Barat	II-68
Tabel 2.11	Capaian Tujuan 10 di Provinsi Sumatera Barat	II-72
Tabel 2.12	Capaian Tujuan 11 di Provinsi Sumatera Barat	II-76
Tabel 2.13	Capaian Tujuan 12 di Provinsi Sumatera Barat	II-84
Tabel 2.14	Capaian Tujuan 13 di Provinsi Sumatera Barat	II-90
Tabel 2.15	Capaian Tujuan 14 di Provinsi Sumatera Barat	II-93
Tabel 2.16	Capaian Tujuan 15 di Provinsi Sumatera Barat	II-97
Tabel 2.17	Capaian Tujuan 16 di Provinsi Sumatera Barat	II-101
Tabel 2.18	Capaian Tujuan 17 di Provinsi Sumatera Barat	II-116
Tabel 3.1	Jumlah Indikator TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026	III-11
Tabel 3.2	Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	III-21
Tabel 3.3	Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	III-38

Tabel 3.4	Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	III-51
Tabel 3.5	Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	III-62
Tabel 3.6	Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesenjangan Gender	III-71
Tabel 3.7	Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak.	III-76
Tabel 3.8	Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau.	III-80
Tabel 3.9	Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	III-84
Tabel 3.10	Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	III-91
Tabel 3.11	Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan...	III-97
Tabel 3.12	Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	III-101
Tabel 3.13	Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	III-109
Tabel 3.14	Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	III-116
Tabel 3.15	Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan	III-120
Tabel 3.16	Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan	III-127
Tabel 3.17	Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	III-138
Tabel 3.18	Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	III-150

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	4 Pilar TPB/SDGs	I-3
Gambar 1.2	Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan	I-4
Gambar 1.3	Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs	I-5
Gambar 1.4	TPB/SDGs sebagai instrumen utama transformasi ekonomi Indonesia	I-6
Gambar 2.1	Persentase Capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat	II-3
Gambar 2.2	Persentase Capaian Tujuan 1 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-4
Gambar 2.3	Persentase Capaian Tujuan 2 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-20
Gambar 2.4	Persentase Capaian Tujuan 3 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-30
Gambar 2.5	Persentase Capaian Tujuan 4 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-39
Gambar 2.6	Persentase Capaian Tujuan 5 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-47
Gambar 2.7	Persentase Capaian Tujuan 6 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-52
Gambar 2.8	Persentase Capaian Tujuan 7 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-57
Gambar 2.9	Persentase Capaian Tujuan 8 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-60
Gambar 2.10	Persentase Capaian Tujuan 9 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-67
Gambar 2.11	Persentase Capaian Tujuan 10 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-71
Gambar 2.12	Persentase Capaian Tujuan 11 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-75
Gambar 2.13	Persentase Capaian Tujuan 12 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-83
Gambar 2.14	Persentase Capaian Tujuan 13 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-89
Gambar 2.15	Persentase Capaian Tujuan 14 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-92

Gambar 2.16	Persentase Capaian Tujuan 15 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-96
Gambar 2.17	Persentase Capaian Tujuan 16 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-100
Gambar 2.18	Persentase Capaian Tujuan 17 TPB/SDGs Tahun 2022 di Provinsi Sumatera Barat	II-115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD.

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen internasional untuk meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oleh karena itu, TPB/SDGs menjadi salah satu acuan dalam pembangunan nasional dan daerah, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau "*No-one Left Behind*". TPB terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian *Millennium Development Goals* (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. 17 tujuan pembangunan berkelanjutan TPB/SDGs, meliputi:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.
4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.

9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi setiap tujuan di atas, menggunakan metadata indikator TPB/SDGs. Pada setiap TPB terdapat indikator yang menjadi alat ukur pencapaian TPB. Metadata indikator tersebut dikelompokkan dalam 4 (empat) pilar SDGs, yang terdiri atas pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan lingkungan, pilar pembangunan ekonomi, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Pengertian masing-masing pilar SDGs, yaitu:

- a. **Pembangunan Sosial SDGs** adalah tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.
- b. **Pembangunan Lingkungan SDGs** adalah tercapainya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan.
- c. **Pembangunan Ekonomi SDGs** adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan.
- d. **Pembangunan Hukum dan Tata Kelola SDGs** adalah terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

Adapun pengelompokan 17 tujuan pada masing-masing pilar disajikan pada gambar di bawah:

Gambar 1.1
4 Pilar TPB/SDGs



Sumber: diolah dari Metadata Indikator, Bappenas, 2020

Di tingkat nasional, RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang menjadi acuan bagi setiap Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) dan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMN Tahun 2020-2024 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam rangka pencapaian sasaran nasional, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *jo* Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan mengamanatkan bahwa Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB.

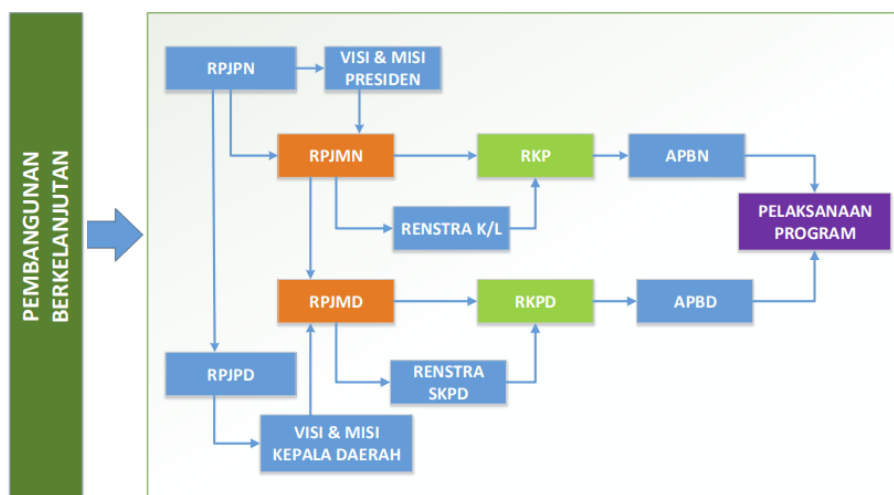
Rencana Aksi Nasional TPB (RAN TPB) adalah dokumen yang memuat program dan kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran nasional. Perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian TPB secara nasional juga didukung oleh tingkat daerah. Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah juga diminta menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan Bersama Bupati/Wali Kota di wilayahnya masing-masing dengan melibatkan ormas, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB) adalah dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai

kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah.

Pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs dalam Nawacita, RPJMN dan RPJMD dilakukan dalam bentuk rumusan kebijakan, program, kegiatan, indikator yang terukur serta sumber pembiayaannya. Hal ini juga telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan pencapaian TPB/SDGs dan indikator-indikator yang sudah tercapai, belum tercapai atau membutuhkan upaya lebih dalam pencapaiannya. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi, misi dan program prioritas kepala daerah yang didalamnya juga memuat kebijakan dan program yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Setiap program dijabarkan menjadi kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi. RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam perencanaan dan penganggaran tahun dalam bentuk RKPD, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Gambaran umum integrasi TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan di tingkat nasional maupun daerah dapat dilihat lebih lanjut pada berikut.

Gambar 1.2
Integrasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam
Dokumen Perencanaan Pembangunan



Sumber: Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Aksi TPB Edisi II, Bappenas

a. Keselarasan SDGs Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024

Pengarusutamaan target-target TPB/SDGs dalam RPJMN berperan dalam upaya melokalkan pelaksanaan TPB/SDGs sampai dengan tingkat daerah. Dalam RPJMN 2020-2024, sebanyak 124 dari total 169 target TPB/SDGs telah diarusutamakan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional. Jumlah ini meningkat dibandingkan target yang diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019 sebanyak 94 target. Dengan diarusutamakannya

target TPB/SDGs ke dalam RPJMN maka program dan kegiatan yang terkait pencapaian SDGs beserta alokasi anggarannya dielaborasi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahunnya. Selanjutnya, target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan selaras dengan TPB/SDGs menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan nonpemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi seluruh program dan kegiatan yang mendukung pencapaian TPB/SDGs. Dengan demikian, target-target SDGs secara bertahap dapat dicapai hingga tahun 2030.

Gambar 1.3
Sinergi Nawa Cita, RPJMN 2020-2024, dan TPB/SDGs



Sumber: Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs Tahun 2021-2024

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak triwulan pertama tahun 2020 menyebabkan tekanan besar terhadap sistem kesehatan, perekonomian, dan kondisi sosial masyarakat. Pandemi juga berdampak pada berbagai kemajuan pencapaian sasaran dan target TPB/SDGs. Kondisi ini mendorong Pemerintah melakukan orientasi baru untuk dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan mengejar gap sasaran RPJMN termasuk di dalamnya target-target TPB/SDGs, serta agar visi Indonesia Maju dapat dicapai tepat waktu. Untuk memastikan pemulihan yang berkelanjutan dan berketahanan, Pemerintah menyiapkan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural dengan mengusung prinsip keselarasan *green recovery* dan *green economy* yang inklusif dan berkelanjutan. Berdasarkan TPB/SDGs, pemerintah menyusun enam strategi besar redesain transformasi ekonomi Indonesia pasca COVID-19 sebagai "game changer" menuju Indonesia Maju di tahun 2045.

Gambar 1.4 TPB/SDGs sebagai instrumen utama transformasi ekonomi Indonesia

TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN DENGAN TPB/SDGs SEBAGAI “INSTRUMEN UTAMA”

6 Strategi Besar Transformasi Ekonomi Indonesia - “Build Forward Better”: Dengan SDGs sebagai Instrumen Utama



Disertai perbaikan *enabling environment*: Reformasi Birokrasi, Reformasi Fiskal, dan Reformasi Sektor Keuangan

Sumber: Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs Tahun 2021-2024

b. Keselarasan SDGs Terhadap RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

Agenda pembangunan lima tahunan Provinsi Sumatera Barat tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 6 Tahun 2021, merupakan penjabaran operasional dari Sasaran pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024. Penyusunan RPJMD didasarkan pada visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang merupakan hasil dari Pilkada serentak pada Desember Tahun 2020, serta memuat tujuan, sasaran, strategi pembangunan dan arah kebijakan umum, prioritas pembangunan dan program pembangunan serta Perangkat Daerah serta lintas Perangkat Daerah yang akan melaksanakan program pembangunan dimaksud. Selain itu, RPJMD Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan 25 (dua puluh lima) Program Unggulan yang target serta kinerjanya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah memperhatikan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi Sumatera Barat, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang diperoleh dari rangkaian tahapan yang dilaksanakan seperti konsultasi publik dan *Focus Group Discussion* (FGD) dan Musrenbang. Implementasi pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Oleh sebab itu, dokumen RPJMD ini menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di

jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta juga menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan termasuk lembaga non pemerintah/*non state actor* dalam bersinergi mewujudkan visi dan misi pembangunan di Sumatera Barat.

RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 disusun dengan mempedomani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *jo* Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RAD TPB/SDGs ini menjadi bagian dari dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat dan RKPD Kab/Kota se-Sumatera Barat.

Walaupun dari sisi waktu RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 telah ditetapkan lebih dahulu daripada penetapan RAD TPB, namun Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs), di Provinsi Sumatera Barat telah diarusutamakan dalam RPJMD 2021-2026. Berdasarkan hasil mapping terhadap tujuan SDGs dengan misi, tujuan, sasaran pembangunan dan indikator sasaran pembanguann yang telah tertuang dalam RPJMD 2021-2026, maka seluruh tujuan SDGs/TPB telah selaras dengan sasaran pembangunan di Sumatera Barat hingga 2026, sebagaimana terlibat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1
Keselarasn dan Sinergi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
VISI : Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan				
Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing				
Mewujudkan Sumber daya manusia yang sehat, unggul dan berdaya saing	Indeks Pembangunan manusia (IPM)	1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	1. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizii yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
		2. Menurunnya prevalensi stunting	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	1. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 5. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		3. Meningkatnya kualitas Pendidikan	1. Rata-rata lama sekolah	1. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
			2. Harapan Lama Sekolah	1. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan
		4. Meningkatnya daya saing masyarakat	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas (Sakernas BPS)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
Misi 2 : Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah				
Mewujudkan ABS SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	1. Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS SBK	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)	1. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 2. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				4. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		2. Meningkatkan Budaya Literasi	Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	1. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 2. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		3. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Indeks Pembangunan keluarga	1. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 4. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 5. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 6. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			4. Indeks Perlindungan Anak (IPA)	1. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2. Tujuan 3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				3. Tujuan 4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua 4. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 5. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 6. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
Misi 3 : Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan				
Meningkatkan kesejahteraan petani	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	1. Meningkatkan pendapatan petani pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan)	1. Nilai Tukar Petani (NTP)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			2. Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			3. Pendapatan pembudidaya ikan	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 5. Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
			4. Pendapatan nelayan	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 4. Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
			5. Pendapatan Peternak	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			6. Peningkatan Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
		2. Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan	Indeks ketahanan Pangan	1. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 5. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
		3. Meningkatkan pendapatan Petani Hutan	Peningkatan pendapatan petani hutan	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 4. Tujuan 15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
Misi 4 : meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital				
Mewujudkan perdagangan dan industri kecil/Menengah serta ekonomi digital yang tangguh dan berdaya saing -	1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) 2. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	1. Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 5. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 6. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
		2. Sumatera Barat sebagai pusat industri kecil dan menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan 3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 5. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 6. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
		3. Terwujudnya pelaku koperasi dan UKM yang sejahtera	1. Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				3. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 4. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 5. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
			2. Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
		4. Terciptanya 100.000 entrepreneur dari berbagai sektor	Jumlah entrepreneur baru tercipta	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 5. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 6. Tujuan 15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
		5. Meningkatkan pertumbuhan investasi	Persentase peningkatan Investasi di provinsi	1. Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 2. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 3. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh,

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 4. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 5. Tujuan 15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
		6. Meningkatkan peran ekonomi digital	Kontribusi ekonomi digital	1. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 2. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 3. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 5. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5 : meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan				
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat dari Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1. Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi pariwisata pada PDRB (hanya sub sektor akomodasi, makanan dan minuman)	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 5. Tujuan 15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan,

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				serta menghentikan kehilangan keanejaragaman hayati 6. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
		2. Meningkatkan kontribusi ekonomi kreatif dalam perekonomian Sumatera Barat	Persentase kontribusi ekraf pada PDRB	1. Tujuan 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 2. Tujuan 5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan 3. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 4. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 5. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 6. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 6 : meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan				
Terwujudnya Infrastruktur yang handal dan merata	Indeks Kinerja Infrastruktur	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang terintegrasi	Rasio konektivitas	1. Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 4. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
			Kemantapan Jalan	1. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 4. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
		2. Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 4. Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
		3. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Tujuan 7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua 2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan 4. Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya 5. Tujuan 14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan 6. Tujuan 15. Melindungi merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
		4. Meningkatkan infrastruktur pelayanan dasar, bangunan strategis dan pertanian	1. Akses air minum	1. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 2. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
			2. Akses sanitasi layak	1. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 2. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
			3. Presentase bangunan strategis terbangun	1. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
			4. Peresentase pemenuhan kebutuhan air irigasi	1. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
			5. Persentase Volume tampungan sumber-sumber air	1. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
			6. Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	1. Tujuan 6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
		5. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang yang baik dan berkelanjutan	Persentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	1. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 2. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 3. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 4. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan
Misi 7 : mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas				
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah dengan aparatur yang melayani	Indeks reformasi birokrasi	1. Terwujudnya kualitas tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Nilai Evaluasi SAKIP	1. Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan 2. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
			2. Nilai EPPD	1. Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan 2. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TPB
				merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
			3. Opini laporan keuangan	1. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 2. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
			4. Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	1. Tujuan 8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua 2. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
		2. Meningkatkan kapabilitas birokrasi	1. Indeks SPBE	1. Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan 2. Tujuan 17. Memperkuat sarana dan pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan
			2. Indeks Profesionalitas ASN	1. Tujuan 16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan
		3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Indeks persepsi kualitas pelayanan	1. Tujuan 9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi 2. Tujuan 10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara 3. Tujuan 11. Menjamin dan permukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan 4. Tujuan 13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

Berdasarkan tabel diatas maka diperoleh informasi bahwa 17 tujuan SDGs telah termuat dalam RPJMD Sumatera Barat tahun 2021-2026. Keselarasan dan sinergi ini perlu terus dijaga dalam penyusunan dokumen RKPd dan RPJMD serta menjadi acuan dan *supplement* dalam penyusunan RPJPD 2025-2025 sehingga diharapkan pada tahun 2030

seluruh tujuan, target, dan indikator TPB/SDGs yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden dapat selalu terakomodir dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah selanjutnya dan tentunya juga dapat terkawal dan tercapai sebagaimana yang dicita-citakan.

Menilik kepada banyaknya indikator SDGs yang belum tercapai dan/atau belum tersedia datanya, maka dirasa perlu untuk memetakan kembali indikator SDGs yang relevan dan sesuai dengan isu dan permasalahan daerah. Pada tahun 2020 Bappenas telah menyusun dokumen Peta Jalan SDGs Indonesia 2030 yang berisi permasalahan dan proyeksi dari indikator utama dari setiap tujuan dalam TPB, termasuk juga kebijakan progresif dalam mencapai target-target TPB. Dari 288 indikator SDGs, hanya 60 indikator yang masuk dalam Peta Jalan SDGs Indonesia yang dinilai memiliki korelasi kuat dengan isu dan permasalahan yang ada di Indonesia untuk setiap tujuan dalam TPB.

Dalam rangka penyusunan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026, seyogyanya konsep ini perlu diadaptasi. Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab tantangan pembangunan, baik pembangunan bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola diantaranya dengan memfokuskan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs periode 2022-2026 pada sejumlah target dan indikator yang relevan dengan sasaran pembangunan daerah serta memberikan dampak yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan masa kini dan masa yang akan datang.

Penyusunan dokumen ini seyogyanya dititikberatkan pada 60 indikator yang ada di dalam Peta Jalan SDGs Indonesia. Secara terperinci, 60 indikator dalam Peta Jalan SDGs Indonesia tersebut adalah:

1. SDGs 1: Tanpa Kemiskinan
 - a. 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional
2. SDGs 2: Tanpa Kelaparan
 - a. 2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
 - b. 2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan (*Food Insecurity Experiences Scale*)
 - c. 2.2.1* Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) pada balita
 - d. 2.2.2* Prevalensi wasting (kurus/sangat kurus) pada balita
 - e. 2.3.1* Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di sektor pertanian
3. SDGs 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 - a. 3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup
 - b. 3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup
 - c. 3.2.2* Angka Kematian Anak (AKN) per 1.000 kelahiran hidup
 - d. 3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
 - e. 3.3.1 Angka Infeksi Baru HIV per 1.000 Populasi tidak terinfeksi HIV
 - f. 3.3.2.(a) Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk
 - g. 3.3.3.(a) Jumlah kabupaten/kota yang mencapai status eliminasi malaria

- h. 3.4.1.(a) Persentase merokok pada pemuda (usia ≤ 18 tahun)
 - i. 3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa (usia ≥ 18 tahun)
 - j. 3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern
 - k. 3.7.2.(a) Angka Total Fertilitas (TFR)
 - l. 3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
4. SDGs 4: Pendidikan Berkualitas
- a. 4.1.1* Proporsi anak-anak pada: (a) kelas 4 (empat) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika
 - b. 4.1.1* Proporsi remaja pada: (a) kelas 9 (sembilan) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika
 - c. 4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat
 - d. 4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat
 - e. 4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - f. 4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat
 - g. 4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi
 - h. 4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat & (2) SMP/MTs/ sederajat
 - i. 4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat & (4) Perguruan Tinggi
 - j. 4.5.1* Rasio APM Perempuan terhadap Laki-laki di tingkat (1) SD/MI/ sederajat, (2) SMP/MTs/ sederajat, (3) SMA/SMK/MA/ sederajat, dan (4) Perguruan Tinggi
 - k. 4.c.1* Persentase guru yang bersertifikat pendidik – (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB)
5. SDGs 5: Kesenjangan Gender
- a. 5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun & 18 tahun
 - b. 5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun
 - c. 5.6.1.(a) Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi
6. SDGs 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak
- a. 6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak
 - b. 6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak
7. SDGs 7: Energi Bersih dan Terjangkau
- a. 7.1.1.(a) Konsumsi Listrik per Kapita
 - b. 7.2.1* Bauran Energi Terbarukan
 - c. 7.3.1* Intensitas Energi Primer

8. SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
 - a. 8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB Riil per Kapita
 - b. 8.3.1.(c) Persentase Askes UMKM ke Layanan Keuangan
 - c. 8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka
 - d. 8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancanegara
9. SDGs 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
 - a. 9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB
 - b. 9.2.2* Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur
 - c. 9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDB
 - d. 9.c.1* Proporsi Penduduk yang Terlayani *Mobile Broadband*
10. SDGs 10: Berkurangnya Kesenjangan
 - a. 10.1.1* Koefisien Gini
11. SDGs 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan
 - a. 11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau
12. SDGs 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab
 - a. 12.5.1* Produksi Sampah
13. SDGs 13: Penanganan Perubahan Iklim
 - a. 13.2.1.(b) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca
 - b. 13.2.1.(c) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
14. SDGs 14: Ekosistem Lautan
 - a. 14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman
 - b. 14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan
15. SDGs 15: Ekosistem Daratan
 - a. 15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan
 - b. 15.3.1.(a) Proporsi hutan terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan
16. SDGs 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
 - a. 16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi
 - b. 16.7.2* Indeks Demokrasi Indonesia
 - c. 16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur
17. SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan
 - a. 17.1.1.(a) Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB
 - b. 17.8.1* Proporsi Individu yang Menggunakan Internet
 - c. 17.11.1.(a) Pertumbuhan Produk Ekspor Non-Migas

Dari 60 indikator yang menjadi penekanan dalam Peta Jalan SDGs Indonesia, sebagian besar indikator dapat langsung diadaptasi sebagai indikator utama dalam RAD

SDGs. Namun ada beberapa indikator yang memerlukan penyesuaian, mungkin karena tidak relevan dengan kondisi lokal, sehingga perlu dicari indikator lain yang lebih relevan sebagai proksi terhadap indikator tersebut. Berikut ditampilkan indikator yang relevan untuk Provinsi Sumatera Barat dari 60 indikator yang ada.

Tabel 1.2
Pemetaan Indikator Kunci SDGs dalam Peta Jalan SDGs Indonesia di Provinsi Sumatera Barat

No.	TPB/SDGs	Indikator dalam Peta Jalan SDGs	Indikator dalam RAD TPB/SDGs	Ket	Ketersediaan Data	Sumber Data
1	Tanpa Kemiskinan	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	Sama	Ada	KLHS
2	Tanpa Kelaparan	2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	2.1.1* Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	Sama	Tidak ada	KLHS
		2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan (<i>Food Insecurity Experiences Scale</i>)	2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang/berat berdasarkan skala pengalaman kerawanan pangan (<i>Food Insecurity Experiences Scale</i>)	Sama	Ada	KLHS
		2.2.1* Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) pada balita	2.2.1* Prevalensi stunting (pendek/sangat pendek) pada balita	Sama	Ada	KLHS
		2.2.2* Prevalensi wasting (kurus/sangat kurus) pada balita	2.2.2* Prevalensi wasting (kurus/sangat kurus) pada balita	Sama	Ada	KLHS
		2.3.1* Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di sektor pertanian	2.3.1* Nilai tambah pertanian per tenaga kerja di sektor pertanian	Sama	Ada	KLHS
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Sama	Ada	KLHS
		3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	3.2.1* Angka Kematian Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup	Sama	Ada	KLHS
		3.2.2* Angka Kematian Anak (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	3.2.2* Angka Kematian Anak (AKN) per 1.000 kelahiran hidup	Sama	Ada	KLHS
		3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	3.2.2.(a) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Sama	Ada	KLHS
		3.3.1 Angka Infeksi Baru HIV per 1.000 Populasi tidak terinfeksi HIV	3.3.1 Angka Infeksi Baru HIV per 1.000 Populasi tidak terinfeksi HIV	Sama	Ada	KLHS
		3.3.2.(a) Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk	3.3.2.(a) Insiden Tuberculosis (ITB) per 100.000 penduduk	Sama	Ada	KLHS
		3.3.3.(a) Jumlah kab/kota yang mencapai status eliminasi malaria	3.3.3.(a) Jumlah kab/kota yang mencapai status eliminasi malaria	Sama	Ada	KLHS
		3.4.1.(a) Persentase merokok pada pemuda (usia ≤18 tahun)	3.4.1.(a) Persentase merokok pada pemuda (usia ≤18 tahun)	Sama	Tidak ada	KLHS
		3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa (usia ≥ 18 th)	3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk dewasa (usia ≥ 18 th)	Sama	Ada	BPS
		3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern	Sama	Ada	KLHS
		3.7.2.(a) Angka Total Fertilitas (TFR)	3.7.2.(a) Angka Total Fertilitas (TFR)	Sama	Ada	BPS/BKKBN
		3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3.8.2.(a) Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Sama	Ada	BPS

No.	TPB/SDGs	Indikator dalam Peta Jalan SDGs	Indikator dalam RAD TPB/SDGs	Ket	Ketersediaan Data	Sumber Data
4	Pendidikan Berkualitas	4.1.1* Proporsi anak-anak pada: (a) kelas 4 (empat) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika		Tidak Relevan		
		4.1.1* Proporsi remaja pada: (a) kelas 9 (sembilan) yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika		Tidak Relevan		
		4.1.1.(d) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat		Tidak Relevan		
		4.1.1.(e) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Sederajat		Tidak Relevan		
		4.2.2.(a) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)		Tidak Relevan		
		4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat	4.3.1.(a) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Sederajat	Sama	Ada	KLHS
		4.3.1.(b) Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi		Tidak Relevan		
		4.5.1* Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat & (2) SMP/MTs/ sederajat		Tidak Relevan		
		4.5.1* Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat & (4) Perguruan Tinggi	4.5.1* Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di (3) SMA/SMK/MA/ sederajat	Modifikasi	Ada	KLHS
5	Kesejahteraan Gender	4.c.1* Persentase guru yang bersertifikat pendidik – (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB)	4.c.1* Persentase guru yang bersertifikat pendidik – (SMA, SMK, dan PLB)	Modifikasi	Ada	KLHS/BPS
		5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun & 18 tahun	5.3.1* Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun	Modifikasi	Ada	BPS
		5.3.1.(a) Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	5.3.1.(a) Rata-rata usia kawin pertama perempuan	Modifikasi	Ada	BPS
		5.6.1.(a) Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi	5.6.1.(a) Kebutuhan Keluarga Berencana (KB) yang tidak terpenuhi	Sama	Ada	KLHS
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	6.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sumber air minum layak	Sama	Ada	BPS
		6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	6.2.1.(b) Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak	Sama	Ada	BPS
7	Energi Bersih dan Terjangkau	7.1.1.(a) Konsumsi Listrik per Kapita	7.1.1.(a) Konsumsi Listrik per Kapita	Sama	Ada	BPS
		7.2.1* Bauran Energi Terbarukan	7.2.1* Bauran Energi Terbarukan	Sama	Tidak ada	
		7.3.1* Intensitas Energi Primer	7.3.1* Intensitas Energi Primer	Sama	Tidak ada	
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB Riil per Kapita	8.1.1* Laju Pertumbuhan PDB Riil per Kapita	Sama	Ada	KLHS/BPS
		8.3.1.(c) Persentase Askes UMKM ke Layanan Keuangan	8.3.1.(c) Persentase jumlah kredit UMKM terhadap total kredit	Modifikasi	Ada	BPS
		8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka	8.5.2* Tingkat Pengangguran Terbuka	Sama	Ada	BPS

No.	TPB/SDGs	Indikator dalam Peta Jalan SDGs	Indikator dalam RAD TPB/SDGs	Ket	Ketersediaan Data	Sumber Data
9	Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancanegara	8.9.1.(a) Jumlah Wisatawan Mancanegara	Sama	Ada	BPS
		9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDB	9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan non-migas terhadap PDRB	Sama	Ada	BPS
		9.2.2* Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur	9.2.2* Proporsi Tenaga Kerja pada Sektor Industri Manufaktur	Sama	Ada	BPS
		9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDB	9.5.1* Proporsi Anggaran Riset Pemerintah terhadap PDRB	Modifikasi	Ada	KLHS
		9.c.1* Proporsi Penduduk yang Terlayani Mobile Broadband	9.c.1* Proporsi Penduduk yang mengakses internet	Modifikasi	Ada	BPS
10	Berkurangnya Kesenjangan	10.1.1* Koefisien Gini	10.1.1* Koefisien Gini	Sama	Ada	BPS
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	11.1.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Sama	Ada	BPS
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab	12.5.1* Produksi Sampah	12.5.1* Produksi Sampah	Sama	Ada	BPS
13	Penanganan Perubahan Iklim	13.2.1.(b) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	13.2.1.(b) Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	Sama	Tidak ada	
		13.2.1.(c) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	13.2.1.(c) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Sama	Tidak ada	
14	Ekosistem Lautan	14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	14.4.1* Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	Sama	Tidak ada	
		14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan	14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Sama	Tidak ada	
15	Ekosistem Daratan	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan	15.1.1.(a) Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan	Sama	Ada	KLHS
		15.3.1.(a) Proporsi hutan terdegradasi terhadap luas lahan	15.3.1.(a) Proporsi hutan terdegradasi terhadap luas lahan	Sama	Ada	KLHS
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi	16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi	Sama	Ada	KLHS
		16.7.2* Indeks Demokrasi Indonesia	16.7.2* Indeks Demokrasi Indonesia	Tidak Relevan		
		16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur	Sama	Ada	BPS
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	17.1.1.(a) Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB	17.1.1.(a) Rasio Penerimaan Pajak (PAD) terhadap PDRB	Modifikasi	Ada	BPS
		17.8.1* Proporsi Individu yang Menggunakan Internet	17.8.1* Proporsi Individu yang Menggunakan Internet	Sama	Ada	BPS
		17.11.1.(a) Pertumbuhan Produk Ekspor Non-Migas	17.11.1.(a) Pertumbuhan Produk Ekspor Non-Migas	Sama	Ada	BPS

Secara rinci target dan indikator focus RAD TPB/SDGs Sumatera Barat 2022-2026 dijelaskan dalam bab-bab berikutnya.

1.2. Komitmen Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs)

Komitmen Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan TPB/SDGs diwujudkan dengan melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, melakukan pemetaan ketersediaan data SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk proksi, melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator TPB/SDGs, mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah terkait dengan implementasi SDGs di Indonesia, dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *jo* Peraturan Presiden Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan. Kedua Peraturan Presiden tersebut menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memimpin sendiri pelaksanaan TPB/SDGs sebagai Ketua Dewan Pengarah dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS ditunjuk sebagai Koordinator Pelaksana dan secara spesifik juga diamanatkan akan dalam penyusunan, pelaksanaann, serta pengendalian dan evaluasi untuk mengoptimalkan peran koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan melibatkan semua pihak baik parlemen, ormas dan media, filantropi dan bisnis, pakar dan akademisi untuk bersinergi sesuai peran, fungsi dan kemampuan para pihak, serta menggunakan kelembagaan yang ada agar dapat langsung bekerja, baik secara strategis maupun operasional. Kementerian PPN/BAPPENAS akan telah mengkoordinasikan penyusunan Peta Jalan TPB/SDGs sebagai dokumen tahapan strategi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs untuk tahun 2016-2030, penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs yang merupakan dokumen lima tahunan dari pelaksanaan kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, dan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan TPB/SDGs di tingkat daerah.

Komitmen yang sama diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan diterbitkannya Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-94-2022 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGS) Tahun 2022-2026 dan Keputusan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 050/02/II/SK/Bappeda-2022 tentang Pembentukan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Provinsi Sumatera Barat 2022-2026.

Provinsi Sumatera Barat memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan TPB/SDGs tersebut, mengingat bahwa pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs tidak hanya sangat penting bagi rakyat di Provinsi Sumatera Barat yang terefleksi dari sinergitas antara RPJMD dengan

TPB/SDGs, namun juga merupakan wujud kontribusi Provinsi Sumatera Barat bagi Indonesia dan selanjutnya bagi komunitas global. Lebih lanjut, TPB/SDGs juga menjadi 27 esehatan²⁷ untuk peningkatan kerja sama baik tingkat 27 eseh, regional, dan secara lebih luas kerja sama Selatan-Selatan dan Triangular sebagai perwujudan Indonesia yang telah termasuk dalam kategori *lower-middle income country* atau negara berpenghasilan menengah bawah.

Sejalan dengan pencapaian masing-masing Indikator pada setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 tidak hanya selaras namun juga sebagian besar indikator-indikator kinerja dalam dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 berkorelasi positif dan mendukung pencapaian TPB. Hal ini tentu merupakan bukti nyata bahwa pembangunan di Sumatera Barat telah sepenuhnya mengarusutamakan TPB/SDGs sebagai bagian dari aksi dan hasil pelaksanaan pembangunan. Adapun bentuk komitmen tersebut dapat terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3

Komitmen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
TUJUAN 1. MENGAKHIRI KEMISKINAN DALAM SEGALA BENTUK DIMANAPUN				
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.				
1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim.				
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.				
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.				
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	
1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.				
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.				
1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	DINAS SOSIAL

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - APK SLB	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	Indikator Program	orang	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Atas (SMA)	Indikator Progul	persen	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Indikator Progul	persen	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3	Indikator Progul	orang	DINAS PENDIDIKAN
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.				
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.				
1.4.1* Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.				
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM	
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun	
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	DINAS PERHUBUNGAN
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD – Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia > Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PERHUBUNGAN
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	lokasi	DINAS PARIWISATA
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	lokasi	DINAS PARIWISATA
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	lokasi	DINAS PARIWISATA
1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.				
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	RPJMD - Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	Indikator Program	%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.				
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	Indikator Program	%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
1.5.2* Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.				
1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana				
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.				
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%	
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%	
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	RPJMD - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Indikator Program	hektar	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Indikator Program	Sentra	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	DINAS KEHUTANAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	DINAS SOSIAL
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	DINAS KEBUDAYAAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	DINAS PANGAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	Progul - Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil > Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Ha)	Indikator Progul	Ha	DINAS KEHUTANAN
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.				
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.				
1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.				
TUJUAN 2. MENGHILANGKAN KELAPARAN, MENCAPAI KETAHANAN PANGAN DAN GIZI YANG BAIK SERTA MENINGKATKAN PERTANIAN BERKELANJUTAN				
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.				
2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	DINAS PANGAN
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	DINAS PANGAN
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	DINAS PANGAN
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	DINAS PANGAN
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.				
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	DINAS PANGAN
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	DINAS PANGAN
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	DINAS PANGAN
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	DINAS PANGAN
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.				
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.				
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).				
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	DINAS PANGAN
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	DINAS PANGAN
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS PANGAN
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	DINAS PANGAN
	RPJMD - Tingkat konsumsi ikan	Indikator Program	Kg/kap/th	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.				
2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan				
2.3.1 (a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan				
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	
2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.				
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.				
02.04.01 Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.				
2.4.1(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.				
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.				
2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.				
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Karet yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan	Indikator Progul	ton	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cabe yang diadakan	Indikator Progul	gram	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Bawang Merah yang diadakan	Indikator Progul	kg	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Manggis yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jeruk yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Alpukat yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Durian yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Pala yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kayu Manis yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cengkeh yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Tembakau yang diadakan	Indikator Progul	batang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jahe yang diadakan	Indikator Progul	kg	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kunyit yang diadakan	Indikator Progul	kg	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Lengkuas/Laos yang diadakan	Indikator Progul	kg	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Urusan Kelautan dan Perikanan > Bibit rumput laut	Indikator Progul	kg	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.5.2* Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.				
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.				
2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.				
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.a.2* Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.				
2.b.1* Subsidi ekspor pertanian.				
2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.				
2.c.1* Indikator anomali harga pangan.				
TUJUAN 3. MENJAMIN KEHIDUPAN YANG SEHAT DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SELURUH PENDUDUK SEMUA USIA				
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.				
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.				
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.				
3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.				
3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.				
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	DINAS KESEHATAN
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.				
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
3.3.3.[a] Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.				
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
3.3.5.[a] Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
3.3.5.[b] Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.				
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.				
3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.				
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.				
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.				
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
03.04.02 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.				
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.				
03.05.01 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.				
3.5.1(a) Jumlah penyalahguna narkoba yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis				
3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.				
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.				
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.				
03.06.01 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.				
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.				
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.7.2* Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.				
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.7.2.[a] Total Fertility Rate (TFR).				
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.				
3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan esensial.				
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Indikator Program	Orang	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	DINAS KESEHATAN
3.8.1.[a Unmet Need Pelayanan Kesehatan.				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	DINAS PERHUBUNGAN
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.8.2* Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.				
3.8.2.[a Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).				
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.				
3.a.1* Persentase merokok pada penduduk umur ?15 tahun.				
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10-18 tahun	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait kekeleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.				
3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.				
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Pertama	Indikator Progul	persen	DINAS KESEHATAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Kedua	Indikator Progul	persen	DINAS KESEHATAN
	Progul - Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju Herd Immunity	Indikator Progul	persen	DINAS KESEHATAN
3.b.2* Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.				
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
	RPJMD - Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	Indikator Program	%	DINAS KESEHATAN
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.				
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.				
TUJUAN 4. MENJAMIN KUALITAS PENDIDIKAN YANG INKLUSIF DAN MERATA SERTA MENINGKATKAN KESEMPATAN BELAJAR SEPANJANG HAYAT UNTUK SEMUA				
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.				
04.01.01 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.				
4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.				
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.				
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
4.1.2.[a] Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat.				
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.				
4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.				
4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.				
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.				
4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.				
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	DINAS KEHUTANAN
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang	DINAS PARIWISATA
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	DINAS SOSIAL
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	DINAS KEBUDAYAAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	DINAS PANGAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
4.3.1.[a] Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).				
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.				
04.04.01 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				
4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).				
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.				
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.				
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	DINAS PENDIDIKAN
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.				
04.06.01 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.				
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	DINAS PENDIDIKAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.				
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.				
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).				
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	DINAS PENDIDIKAN
4.a.1.[a] Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.				
4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.				
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.				
4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.				
TUJUAN 5. MENCAPAI KESETARAAN GENDER DAN MEMBERDAYAKAN KAUM PEREMPUAN				
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.				
5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.				
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.				
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.				
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.				
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
05.03.02 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.				
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.				
05.04.01 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.				
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.				
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.				
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil revidi dari konferensi- konferensi tersebut.				
5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.				
5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.				
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.				
5.a.1* (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.				
5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.				
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.				
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.				
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang- undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.				
5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.				
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten/Kota	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TUJUAN 6. MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA				
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.				
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
6.2 . Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.				
6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.				
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	DINAS KESEHATAN
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
6.3 . Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.				
06.03.01 Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
06.03.02 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.				
6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku				
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku				
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.4 . Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.				
06.04.01 Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.				
06.04.02 Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.				
6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya				
6.4.2.(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya				
6.5 . Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.				
6.5.1* Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).				
	RPJMD - Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Indikator Program	%	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
6.5.2* Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.				
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Indikator Program	%	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
6.6 . Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.				
6.6.1* Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.				
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TUJUAN 7. MENJAMIN AKSES ENERGI YANG TERJANGKAU, ANDAL, BERKELANJUTAN DAN MODERN UNTUK SEMUA				
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.				
7.1.1* Rasio elektrifikasi.				
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Rasio  Elektrifikasi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.				
07.01.02 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.				
7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.				
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.				
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.				
7.2.1* Bauran energi terbarukan.				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.				
7.3.1* Intensitas energi primer.				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih,teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
7.a.1 Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.				
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang				
7.b.1* Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TUJUAN 8. MENINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA				
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.				
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.				
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	
8.1.1.(a) PDB per kapita.				
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.				
8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa				
8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.				
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.				
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.				
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.				
8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin				
8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan				
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.				
08.04.01 Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.				
8.4.1.(a) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan				
08.04.02 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.				
8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.				
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.				
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%	
8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran.				
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.				
8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).				
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.				
08.07.01 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.				
08.08.01 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.				
8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.				
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
08.08.02 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.				
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.				
8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.				
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.				
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	DINAS PARIWISATA
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Indikator Program	%	DINAS PARIWISATA
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.				
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%	DINAS PARIWISATA
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Indikator Program	%	DINAS PARIWISATA
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.				
TUJUAN 9. MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG TANGGUH, MENINGKATKAN INDUSTRI INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENDORONG INOVASI				
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.				
9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	DINAS PERHUBUNGAN
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.				
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%	
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol.				
9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api.				
9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.				
9.1.2.(a) Jumlah bandara.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan.				
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	DINAS PERHUBUNGAN
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	DINAS PERHUBUNGAN
9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.				
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	DINAS PERHUBUNGAN
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	DINAS PERHUBUNGAN
9.2 Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.				
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.				
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.				
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.				
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.				
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.				
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp)	IKD	Rp. Triliun	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.				
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.				
9.4.1* Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.				
9.4.1.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.				
9.4.1.(b) Intensitas emisi sektor industri.				
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.				
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.				
9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.				
9.5.2.(a) Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).				
TUJUAN 10. MENGURANGI KESENJANGAN INTRA DAN ANTAR NEGARA				
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.				
10.1.1* Rasio Gini.				
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks	
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.				
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	
10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal.				
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri.				
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal.				
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.				
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.				
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.				
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.				
10.03.01 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasi atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.				
10.3.1.(a) Indeks Kebebasan.				
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).				
10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.				
10.04.01 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.				
10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.				
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.				
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
10.04.02 Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.				
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.				
10.05.01 Financial Soundness Indicator.				
10.5.1.(a) Indikator Kesehatan Perbankan.				
10.7 . Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkutuk daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.				
10.07.01 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.				
10.07.02 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migrasi yang baik.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar yang mendapatkan penanganan	Indikator Program	orang	DINAS SOSIAL
10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.				
10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.				
10.07.03 Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.				
10.07.04 Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.				
TUJUAN 11. MENJAMIN DAN PERMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN				
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.				
11.01.01 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.				
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau				
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
11.2 . Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.				
11.02.01 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas				
11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	DINAS PERHUBUNGAN
11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum				
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	DINAS PERHUBUNGAN
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
11.03.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk			
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk			
11.03.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis			
11.4	Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.			
11.04.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)			
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)			
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu	
11.5	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.			
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang			
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.05.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar			
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB			
11.6	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.			
11.06.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota			
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya			

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang terkelola				
11.06.02 Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)				
11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10				
11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara				
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.				
11.07.01 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.				
11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua				
11.07.02 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.				
11.a.1 Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.				
11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS				
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.				
11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana				
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.				
11.c.1 -				
11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TUJUAN 12. MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN				
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.				
12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan				
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
12.03.01 (a)? Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)				
12.3.1.(a) Persentase sisa makanan				
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot	Indikator Progul	nagari/desa	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.				
12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.				
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.4.2* (a)? Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.				
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.				
12.05.01 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang				
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.				
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.				
12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya				
12.6.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.				
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional				
12.7.1* Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi				
12.7.1(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
12.7.1(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa				
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.				
12.08.01 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.				
12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup				
12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.				
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.				
12.a.1* Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)				
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.				
12.b.1 Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan				
12.b.1(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development				
TUJUAN 13. MENGAMBIL TINDAKAN CEPAT UNTUK MENGATASI PERUBAHAN IKLIM DAN DAMPAKNYA				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara				
13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	DINAS SOSIAL
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	DINAS SOSIAL
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030				
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	DINAS SOSIAL
13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana				
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional				
13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications				
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun				
13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)				
13.2.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)				
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim				
13.03.01 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup				
TUJUAN 14. MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi				
14.01.01 (a)? Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung				
14.1.1.(a) Presentase penurunan sampah terbuang ke laut				
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif				
14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan				
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator Program	ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya	Indikator Program	ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya laut	Indikator Program	ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Indikator Program	ton	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan				
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia				
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut				
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)				
14.06.01 Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)				
14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha				
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Indikator Program	%	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara				
14.07.01 Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)				
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar				
14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil				
14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan				
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want				
14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)				
TUJUAN 15. MELINDUNGI MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN, SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI				
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.				
15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan				
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	DINAS KEHUTANAN
15.01.02 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya				
15.1.2.(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)				
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	DINAS KEHUTANAN
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.				
15.02.01 Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari				
15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju				
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Indikator Program	unit	DINAS KEHUTANAN
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan pengurungan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena pengurungan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi				
15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan				
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	DINAS KEHUTANAN
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.				
15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi				
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	DINAS KEHUTANAN
15.4.2* Indeks tutupan hijau pegunungan				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	DINAS KEHUTANAN
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	DINAS KEHUTANAN
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal				
15.07.01 Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal				
15.7.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL				
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan				
15.09.01 (a)? Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan				
(b)? integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi				
15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis				
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	DINAS KEHUTANAN
TUJUAN 16. MENGUATKAN MASYARAKAT YANG INKLUSIF DAN DAMAI UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN, MENYEDIAKAN AKSES Keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan				
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.				
16.01.01 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.				
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.				
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.01.02 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.				
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.				
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.01.03 Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.				
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.				
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indikator Program	nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.				
16.10.01 Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.				
16.10.1.(a) Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.				
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).				
16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.				
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.				
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.				
16.02.01 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir				
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.02.03 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.				
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.				
16.03.01 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.				
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi				
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	BIRO HUKUM

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
16.3.1.(c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.				
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	BIRO HUKUM
16.03.02 Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.				
16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.				
16.03.03 Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.				
16.3.3 (a) Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)				
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.				
16.05.01 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.				
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).				
16.05.02 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.				
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.				
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.				
16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.				
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ? B				
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat	
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI
	RPJMD - Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Indikator Program	Perangkat Daerah	BIRO ORGANISASI
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B				
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	
16.06.02 Proporsi penduduk yang puas terhadap				
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.				
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGI
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PARIAMAN
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	DINAS PENANAMAN MODAL PROVINSI DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	BIRO ORGANISASI
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.				
16.07.01 Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.				
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).				
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).				
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
16.07.02 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.				
16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi				
16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan				
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan				
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.				
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang lahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.				
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	RPJMD - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Indikator Program	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.				
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun				
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.				
16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.				
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.				
16.b.1 Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.				
TUJUAN 17. MENGUATKAN SARANA DAN PELAKSANAAN DAN MEREVITALISASI KEMITRAAN GLOBAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN				
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.				
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.				
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.				
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.				
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.				
17.10.01 Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).				
17.10.1(a) Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati				
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.				
17.11.01 Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.				
17.11.1(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas				
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp)	IKD	Rp. Juta	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	RPJMD - Nilai ekspor	Indikator Program	juta US\$	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.				
17.16.01 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.				
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Keterangan
17.17.01 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).				
17.17.1(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.				
17.17.1(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).				
17.17.1(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.				
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.				
17.18.01 Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs				
17.18.1(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.				
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.18.1(b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.				
17.18.3* Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.				
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.				
17.19.01 Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.				
17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.				
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.				
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
17.19.02 Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan				
b)? mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.				
17.19.2 (a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.				
17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).				
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.				
17.03.01 Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.				
17.03.02 Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.				
17.3.2.(a) Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.				

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Instansi Pelaksana
	17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.			
	17.06.01 Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya			
	17.6.1.(a) Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga			
	17.6.1.(b) Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)			
	17.8 Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.			
	17.8.1* Persentase pengguna internet			

Komitmen untuk mencapai TPB/SDGs tidak hanya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat saja, namun hal yang sama juga dimiliki dan berkontribusikan oleh platform Non-State Actor di Sumatera Barat baik organisasi masyarakat, akademisi, filantropi, pelaku usaha, serta media. Berikut terdapat beberapa contoh NSA yang berkomitmen dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disamping juga masih terdapat banyak NSA lainnya yang telah terbukti berkomitmen berkontribusi secara positif dalam pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat.

Pada penanganan isu-isu gender terutama pada pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta pemenuhan hak-hak anak terdapat beberapa NSA yang memiliki kepedulian yang cukup tinggi serta konsisten dalam pelaksanaannya, antara lain Lembaga Women's Crisis Center (WCC) Nurani Perempuan yang merupakan lembaga pemberi layanan bagi perempuan korban kekerasan. Lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 1999 yang bertujuan agar terpenuhinya hak asasi perempuan (khususnya perempuan korban kekerasan) dalam mendapatkan keadilan, perlindungan dan pemulihan. Selama kurun waktu 1999 sampai dengan saat ini, WCC Nurani Perempuan secara konsisten melakukan kegiatan layanan bagi perempuan korban kekerasan, melakukan kegiatan pendidikan untuk pencegahan berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan, serta melakukan advokasi dalam penanganan berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan kebijakan yang mendiskriminasi perempuan. Selain itu WCC Nurani Perempuan juga berkontribusi dalam melakukan pemberdayaan pengetahuan dan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam rangka mengurangi angka kemiskinan yang kemudian focus WCC Nurani Perempuan semakin berkembang dengan turut berkontribusi pada penurunan angka stunting, pengurangan angka kelahiran dan pendidikan seksualitas, semua isu ini sangat berkaitan erat untuk mengurangi angka kekerasan seksual pada perempuan dan anak.

Sejalan dengan WCC Nurasi Perempuan, terdapat Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) yang merupakan NSA yang fokus pada isu-isu terkait dengan perempuan yang menitikberatkan komitmennya pada penguatan kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan melalui empat isu dan program utama yakni penguatan ekonomi, advokasi kesehatan seksual dan reproduksi perempuan dan gizi, partisipasi dan keterwakilan perempuan serta pengurangan risiko bencana serta adaptasi perubahan iklim.

Komunitas Langkah Kami untuk Kita (LKUK) juga merupakan NSA yang focus pada isu-isu kesetaraan gender dan pembangunan. Lembaga ini mengawali focus program kerjanya berdasarkan hasil wawancara dan riset dengan berbagai LSM terutama terkait permasalahan kesetaraan gender di Sumatera Barat dan LKUK memilih untuk fokus berkontribusi pada pemberdayaan perempuan dan anak dengan melakukan beberapa program berupa literasi digital untuk perempuan dan remaja di Kelurahan Tarantang, Baringin dan Batu Gadang; pengajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak kelompok perempuan

Tarantang, Baringin dan Batu Gadang; pelatihan persiapan memasuki dunia kerja untuk remaja perempuan; pengajaran Bahasa Inggris untuk anak-anak di Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, serta peningkatan kesadaran publik (raising awareness) dengan melakukan edukasi melalui webinar, sosial media dan forum diskusi. Dalam pelaksanaan program, LKUK bekerja sama dengan organisasi/ LSM dan komunitas lain di Sumatera Barat seperti dengan Pambangkik Batang Tarandam (PBT) dan Kelompok Perempuan Nusantara Kelurahan Batu Gadang, Tarantang dan Baringin, serta dengan Forum Indonesia Muda (FIM) Padang, Dampak Sosial Indonesia dan Sakato Community Hub. Untuk rencana program hingga tahun 2026, LKUK berkomitmen untuk memperluas kontribusinya dalam pembangunan terutama pada pemuda atau remaja perempuan terkait kesehatan reproduksi dan peningkatan keterampilan soft dan hard skill untuk meningkatkan kemampuan bersaing di dunia kerja, peningkatan kemandirian ekonomi untuk kelompok perempuan dan kelas-kelas Bahasa Inggris bagi anak-anak kurang mampu di kota Padang.

Dalam hal tumbuh kembang anak serta isu-isu gender dalam pembangunan di Sumatera Barat juga terdapat Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Daerah Sumatera Barat, yang berkomitmen penuh mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Menyusui adalah langkah pertama yang penting dalam perjalanan anak menuju masa depan yang sehat. Tetapi sebagai dasar untuk kesehatan dan kesejahteraan anak di masa depan, menyusui juga merupakan elemen penting dari upaya pembangunan di seluruh dunia untuk menciptakan bumi yang lebih sehat, sejahtera, dan berkelanjutan. Menyusui adalah langkah praktis yang paling mudah dan murah untuk melindungi kelangsungan hidup dan kesehatan bayi dan perempuan, sehingga menyusui adalah bagian utama dan sangat terkait dengan banyak Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Komitmen ini ditunjukkan dengan konsistensi AIMI Sumatera Barat dalam mendukung, mempromosikan dan melindungi menyusui dan pemberian makan bayi dan anak (PMBA) untuk semua kalangan dan bukan hanya ke kelompok ibu dan sektor kesehatan saja. Sebagai organisasi nirlaba AIMI Sumatera Barat secara rutin telah menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya Kelas Edukasi Menyusui, Kelas Edukasi Makanan Pendamping ASI (MPASI), Layanan Konseling Menyusui 1 on 1, Debur Emas (Pendampingan Kelompok Ibu untuk Generasi Emas) yang dikhususkan untuk ibu menengah kebawah dengan pembelajaran yang disesuaikan, Perayaan Pekan Menyusui yang berkolaborasi dengan organisasi lintas profesi, Dukungan Menyusui dan PMBA di Daerah Bencana Alam di Sumatera Barat, Pelatihan Konseling menyusui (PKM) Modul 40 Jam WHO/UNICEF, Sosialisasi dan Advokasi ke berbagai kalangan melalui program AIMI Goes to Office dan AIMI Goes to Community, juga Workshop Ustadz Ustadzah, dan GO GINA (Gerakan Optimalisasi Gizi Anak) untuk perubahan perilaku dan intervensi gizi pada anak stunting. Kegiatan ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang, dengan menyesuaikan kondisi dan lokasi yang berdampak bagi Sumatera Barat.

Dalam upaya menghilangkan diskriminasi pada penyandang disabilitas maka terdapat beberapa NSA yang memiliki kepedulian dan komitmen dalam hal ini antara lain yakni Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatina) Sumatera Barat yang merupakan NSA yang tumbuh dari kelompok masyarakat yang masih termarginalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta masih mengalami diskriminasi di berbagai bidang kehidupan.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Gerkatina adalah fokus dalam pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas, menghilangkan segala bentuk hambatan maupun perlakuan diskriminasi serta melakukan pemberdayaan Disabilitas untuk mencapai kehidupan sejahtera dan bebas dari segala perlakuan diskriminatif.

Sejalan dengan Gerkatina, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (*HWDI Sumatera Barat*) adalah organisasi Perempuan yang pengurus dan anggotanya mayoritas adalah perempuan dengan berbagai ragam jenis kecatatan yang dimilikinya. Beberapa Langkah konkret yang dilakukan oleh HWDI yakni meningkatkan akses penyandang disabilitas agar masuk dalam pendataan DTKS sehingga dapat tercatat sebagai penerima manfaat dari program pemerintah. Selain itu HWDI sebagai lembaga yang fokus tentang isu perempuan disabilitas agar perempuan-perempuan disabilitas tersebut tidak tertinggal dan mampu mandiri baik secara ekonomi dan sosial karena stigma masyarakat yang masih berasumsi bahwa disabilitas harus dikasihani dan sulit untuk diberdayakan.

Dalam upaya mitigasi resiko dan penanganan bencana di Sumatera Barat, terdapat salah satu NSA yang memiliki komitmen dalam hal ini antara lain yakni Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Sumatera Barat yang memiliki komitmen bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk berkontribusi secara aktif serta bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Daerah dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).

FRPB Sumatera Barat juga turut serta mendorong pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada setiap sektor pembangunan di Provinsi Sumatera Barat, membangun data base upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan di Provinsi Sumatera Barat dan turut serta melakukan monitoring (pemantauan) dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Provinsi Sumatera Barat.

Selain itu, FRPB Sumatera Barat juga memiliki fungsi sebagai wadah fasilitasi pengarusutamaan pengurangan risiko bencana pada sektor pembangunan di Sumatera Barat, wadah konsultasi, koordinasi dan mediasi daerah dalam membangun pemahaman dan pengembangan upaya pengurangan risiko bencana bagi para pihak atau pemangku kepentingan di Sumatera Barat, wadah advokasi dan rekomendasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengurangan risiko bencana yang telah di laksanakan oleh Pemerintah, multi stakeholder dan masyarakat, dan wadah monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana di Sumatera Barat.

Pada tahun 2022, sebagai langkah nyata, FPRB Sumatera Barat juga turut bergerak pada masa tanggap darurat bencana Gempa Bumi Pasaman dan Pasaman Barat di bulan Februari 2022. FPRB Sumatera Barat mengambil peran mengkoordinasikan semua pihak dalam (desk relawan) dalam masa tanggap darurat gempa Pasaman dan Pasaman Barat. FPRB mengkomunikasikan isu-isu terkini untuk memberikan rekomendasi bagi Pemerintah dalam rangka kesiapsiagaan bencana.

Dalam upaya kolaboratif pelaksanaan pembangunan terdapat salah satu NSA yakni Yayasan senarai yang merupakan sebuah organisasi yang dihasilkan oleh pemikiran kreatif dari generasi muda yang disebut senarai. Komitmen dari organisasi ini yakni merupakan lembaga mitra yang bersifat kolaboratif dengan berbagai institusi dan kelompok masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap penanggulangan dan penanganan masalah kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat bangsa yang berkemajuan.

Fokus kegiatan dari Yayasan Senarai yakni meningkatkan pemahaman seluruh elemen masyarakat tentang Kesehatan, Kebijakan Kesehatan, Sosial dan Ekonomi kemasyarakatan, memberikan informasi, pengetahuan dan dukungan kepada masyarakat tentang keutamaan pengetahuan Kebijakan Kesehatan, Sosial dan Ekonomi kemasyarakatan, memperkuat hubungan kerjasama dengan pemerintah, perusahaan, mitra gerakan, lembaga donor dan pemangku kepentingan lainnya di semua tingkatan dalam rangka menjalankan fungsi edukasi yang mendukung masyarakat untuk lebih memperhatikan isu Kesehatan, Sosial dan Ekonomi kemasyarakatan.

Tidak hanya Lembaga organisasi masyarakat, unsur Akademisi yang dalam hal ini Perguruan Tinggi di Sumatera Barat juga memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, antara lain terbentuknya SDGS Center baik di Universitas Andalas dan Universitas Negeri Padang, yang kerap melakukan pengkajian-pengkajian secara ilmiah maupun riset di lapangan, pendampingan kepada NSA dan pemerintah daerah dalam Menyusun rencana program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pembangunan serta peran-peran lainnya.

Sebagai Lembaga Pendidikan tentunya tidak kalah penting menyiapkan peserta didik berdasarkan prinsip inklusi dan berkemajuan untuk dapat mengaplikasikan kemampuan akademiknya dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan di dunia kerja. Selain itu juga bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan penelitian dan pengambisian maka upaya yang dilakukan juga berdasarkan prinsip ekualiti, inklusi dan berkemajuan.

1.3. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs

TPB/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal yang bermakna TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia dengan tujuan dan sasaran yang transformatif, berpusat pada manusia, komprehensif, dan berjangka panjang.

TPB/SDGs merupakan kesatuan yang dilaksanakan secara integrasi pada semua dimensi pembangunan yakni sosial, ekonomi dan lingkungan yang saling komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs juga merupakan aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. TPB/SDGs menekankan pentingnya pemenuhan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pelaksanaannya harus mampu memberi manfaat kepada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan istilah "*No one left behind*" atau "Tidak ada seorangpun yang tertinggal". Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 platform partisipasi yang terdiri atas **Pemerintah dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Kemasyarakatan dan Media**, dengan fokus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas serta membangun kepercayaan (*trust building*); kemitraan yang setara; partisipasi; akuntabel; dan saling menguntungkan antar pemangku kepentingan.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Sumatera Barat berketetapan untuk memperkuat komitmen nasional menjadikan TPB/SDGs sebagai suatu "gerakan bersama" dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Penyusunan RAD TPB/SDGs Sumatera Barat telah secara optimal melibatkan seluruh platform Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1.4. Pembiayaan TPB/SDGs

Provinsi Sumatera Barat sebagai provinsi yang berkomitmen menjalankan TPB/SDGs, juga mengupayakan semaksimal mungkin berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan TPB/SDGs, baik yang bersifat konvensional seperti dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota, maupun berbagai skema yang bersifat inovatif (*innovative financing*). Adapun sumber-sumber pembiayaan tersebut berasal dari: Optimalisasi Penerimaan Daerah. Penerimaan daerah yang berasal dari pajak, cukai, pendapatan bukan pajak, hibah (*grant*), retribusi, dll akan terus dioptimalkan. Sumber-sumber pembiayaan itu bahkan menjadi salah satu indikator TPB/SDGs pada Goal 17 untuk memastikan sarana pelaksanaan TPB/SDGs (*means of implementation*). Optimalisasi pendanaan dari pajak kini menjadi tumpuan utama pembiayaan.

Kegiatan filantropi di Sumatera Barat menunjukkan perkembangan, yang ditunjukkan dengan makin banyak institusi yang bertujuan berderma dan menolong sesama, baik berbasis

keagamaan atau keluarga. Dana sosial keagamaan misalnya melalui Zakat, Infaq, Shadaqah dll, mempunyai potensi yang sangat besar. Selain itu, Corporate Social Responsibility (CSR) kini juga terus berkembang, dan akan semakin berkembang terarah dengan adanya “ISO 26000 : *Guidance Standard on Social Responsibility*, yang menjadi standar pedoman bagi perusahaan terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan serta kaitannya dengan TPB/SDGs. Selanjutnya, sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Selain itu, pembiayaan inovatif juga dapat dikembangkan untuk pembiayaan TPB/SDGs, misalnya melalui PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah), KPBU (Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha), pembiayaan melalui pasar modal dan pasar uang (*green bond*), pembiayaan berkelanjutan melalui Lembaga Keuangan (Bank, LKM, modal ventura, dll), mekanisme *debt swap* to SDGs, mekanisme *impact investing*, *crowd financing*, serta pembiayaan inovatif melalui *blended finance* (Pemerintah, Swasta, Filantropi).

Terkait dengan hal tersebut, salah satu skema pembiayaan yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah skema KPBU. Terdapat 19 sektor KPBU yang mendukung pencapaian TPB/SDGs khususnya untuk pencapaian tujuan/goal 9 TPB/SDGs yaitu: Industri, Inovasi dan Infrastruktur. Sebagai contoh, sektor ketenagalistrikan, migas dan energi baru terbarukan serta konservasi energi yang mendukung pencapaian tujuan/goal 7 yaitu Energi Bersih dan Terbarukan.

1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 jo Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga, juga bagi pemerintah daerah yang juga merupakan acuan bagi pihak non pemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAN TPB/SDGs pada tingkat nasional dan RAD TPB/SDGs pada tingkat provinsi menjadi sangat penting.

Dalam penyusunan RAD TPB, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah melibatkan keempat platform TPB/SDGs, yang dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- 1) **Sosialisasi**, untuk memberikan penjelasan tentang TPB/SDGs dan membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB, sosialisasi ini dihadiri oleh stakeholders terkait.
- 2) **Rapat Tim Koordinasi TPB**, rapat ini bertujuan untuk membahas pengisian matriks RAD TPB, yang dimulai dengan menyusun Matriks Pemetaan Target dan Indikator TPB – RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026, yang menjadi template bagi daerah Kabupaten/Kota dan *nonstate actor* lainnya, untuk kemudian dijadikan dasar dalam pengisian matriks yakni matriks bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta matriks bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan non pemerintah.

- 3) **Konsultasi Publik**, yang dimaksudkan untuk menjaring aspirasi dari para pemangku kepentingan dengan tujuan untuk menghimpun aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan berkelanjutan.
- 4) Proses sangat penting lainnya yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui sistem daring (*online*) melalui surat elektronik (email). Melalui sistem ini, Tim Pelaksana TPB mengajak secara resmi seluruh platform untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD TPB Provinsi Sumatera Barat.

1.6. Sistematika Rencana Aksi Daerah TPB

Dokumen Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Keselarasan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Terhadap Nawacita, RPJMN dan RPJMD
- 1.2. Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs
- 1.3. Prinsip-prinsip Pelaksanaan TPB/SDGs
- 1.4. Pembiayaan TPB/SDGs
- 1.5. Metodologi Penyusunan Rencana Aksi TPB/SDGs
- 1.6. Sistematika Rencana Aksi TPB/SDGs

BAB II KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

- 2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun
- 2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
- 2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
- 2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
- 2.5. Mencapai Kestaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
- 2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern
- 2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
- 2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi
- 2.10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara
- 2.11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
- 2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
- 2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

- 2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan
- 2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan
- 2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh
- 2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global
- 2.18. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan TPB/SDGs

BAB III TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

- 3.1. Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan
- 3.2. Tujuan 2 Tanpa Kelaparan
- 3.3. Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera
- 3.4. Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas
- 3.5. Tujuan 5 Kesetaraan Gender
- 3.6. Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
- 3.7. Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau
- 3.8. Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi
- 3.9. Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur
- 3.10. Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan
- 3.11. Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan
- 3.12. Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
- 3.13. Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim
- 3.14. Tujuan 14 Ekosistem Lautan
- 3.15. Tujuan 15 Ekosistem Daratan
- 3.16. Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh
- 3.17. Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

- 4.1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi
- 4.2. Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS
- 4.3. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- Lampiran 2. Matriks Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota
- Lampiran 3. Matriks Program/Kegiatan Nonpemerintah

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN TPB/SDGs

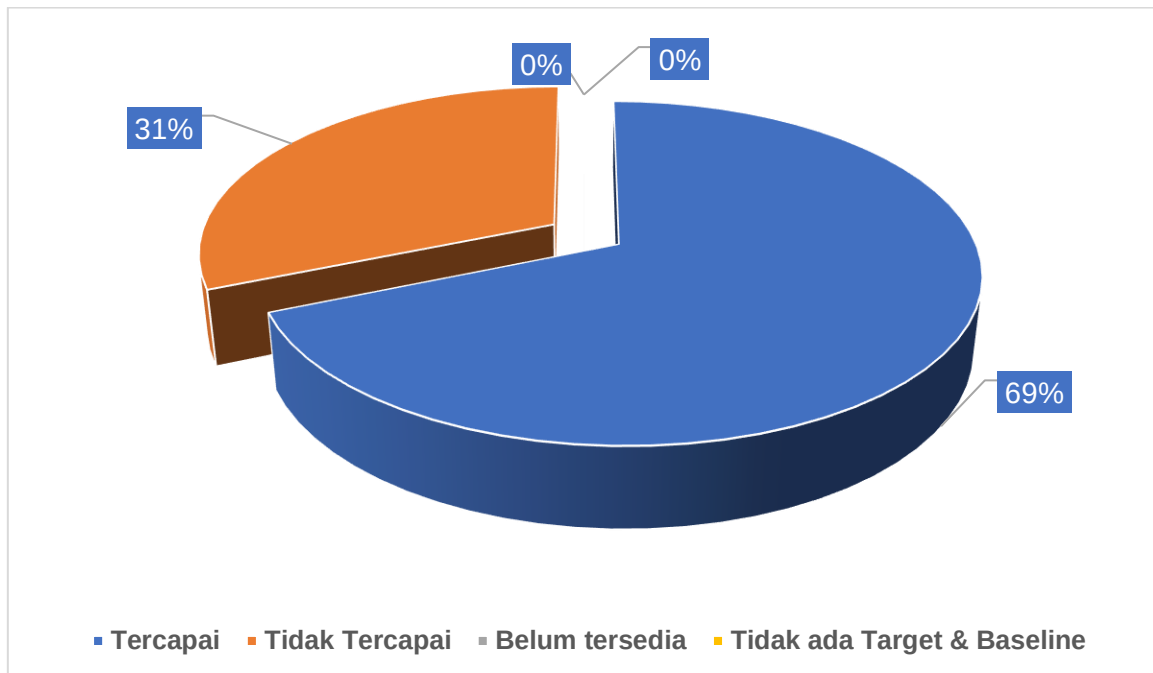
Bab ini menyajikan tentang status capaian pelaksanaan TPB/SDG's sampai dengan tahun 2022 dengan tahun 2021 sebagai *baseline* berdasarkan metadata indikator TPB/SDGs dari tujuan 1 sampai dengan tujuan 17 melalui pendekatan indikator yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia ini disusun untuk memberikan pengertian dan pemahaman yang sama pada semua pemangku kepentingan atas setiap indikator guna penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan TPB/SDGs. Metadata ini juga menjadi acuan untuk mengukur pencapaian TPB/SDGs Indonesia agar dapat dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia serta keterbandingan antarprovinsi dan antar kabupaten/kota di Indonesia.

Hasil evaluasi TPB/SDG's di Provinsi Sumatera Barat atas tujuan TPB/SDG's dengan indikator pada tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 melalui pendekatan penyelarasan indikator yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dapat disajikan dalam table berikut ini :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tujuan	Indikator SDGs			Jumlah Indikator RPJMD yang selaras dengan SDGs							
	Jumlah Indikator	Yang selaras dengan RPJMD	Tidak selaras / Tidak tersedia	Indikator Makro	IKU	IKD	Indikator Program	Indikator Progul	Jumlah	Tercapai	Tidak Tercapai
Tujuan 1	15	12	3	6	18	42	23	38	127	89	38
Tujuan 2	16	11	5	0	16	12	5	34	67	48	19
Tujuan 3	33	22	11	0	1	23	31	3	58	42	16
Tujuan 4	17	7	10	0	4	9	6	27	46	25	21
Tujuan 5	14	7	7	0	0	12	6	0	18	18	0
Tujuan 6	15	9	6	0	4	10	8	4	26	15	11
Tujuan 7	9	4	5	0	0	5	4	0	9	9	0
Tujuan 8	23	11	12	4	4	7	4	12	31	18	13
Tujuan 9	19	6	13	0	4	4	2	8	18	10	8
Tujuan 10	25	8	17	2	0	5	2	0	9	8	1
Tujuan 11	29	11	18	1	7	18	6	3	35	22	13
Tujuan 12	20	7	13	0	1	10	14	9	34	25	9
Tujuan 13	9	3	6	0	0	5	3	1	9	7	2
Tujuan 14	12	5	7	0	0	3	15	0	18	15	3
Tujuan 15	12	7	5	0	0	5	6	0	11	8	3
Tujuan 16	50	27	23	0	14	32	30	5	81	54	27
Tujuan 17	30	8	22	0	3	13	8	0	24	14	10
Total	348	165	183	13	76	215	173	144	621	427	194

Gambar 2.1
Persentase Capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Berdasarkan hasil pencapaian diatas terdapat 621 indikator yang dipakai sebagai pendekatan dalam memperlihatkan capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan tahun 2022. Dari indikator tersebut terdapat 427 indikator yang tercapai, 194 indikator yang tidak tercapai, 0 indikator yang belum tersedia dan 0 indikator belum ada target dan baseline.

Dari pencapaian diatas didominasi oleh target yang tercapai sebesar 69% dari 621 indikator yang dipakai, 31% tidak tercapai, 0% belum tersedia dan 0% tidak ada target dan baseline. Hasil ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam lebih menggenjot upaya yang akan diambil dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Secara lebih rinci berikut ini adalah hasil evaluasi capaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat yang sesuai dengan hasil pemetaan berdasarkan komitmen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terhadap pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dari tujuan 1 sampai dengan tujuan 17. Hasil capaian ini didapatkan dari data yang disampaikan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017.

2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

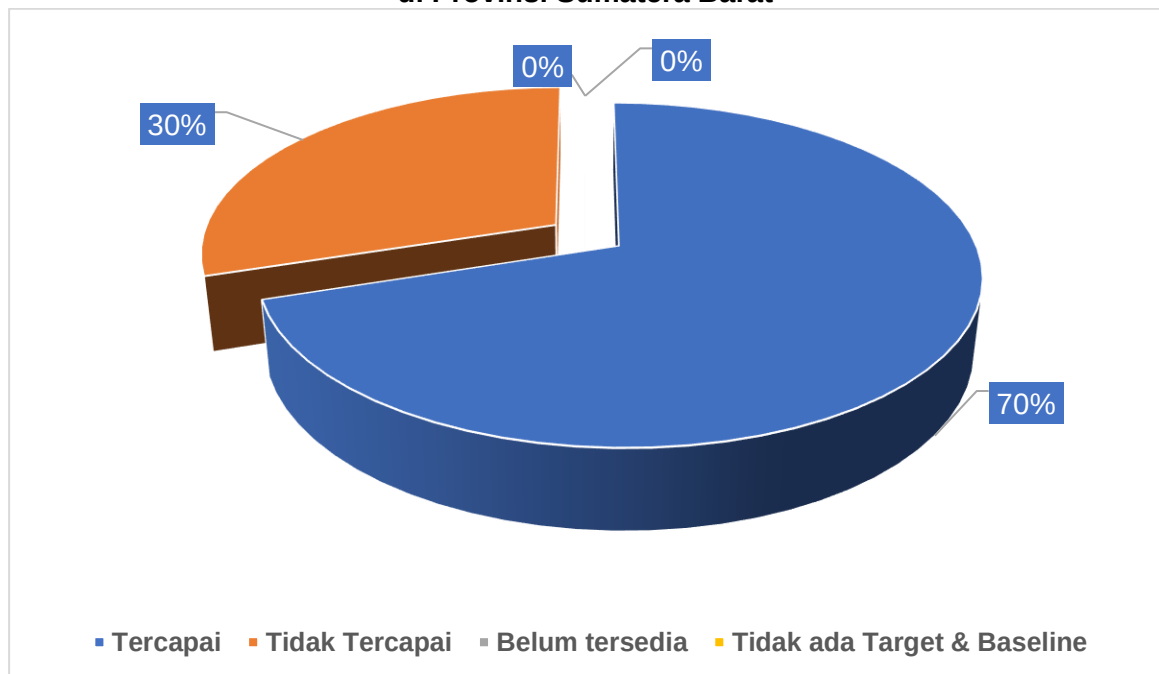
Dalam rangka mencapai tujuan Tanpa Kemiskinan pada tahun 2030, terdapat 12 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 127 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mengentaskan kemiskinan ekstrim, mengurangi setengah proporsi masyarakat miskin di

semua dimensi, penerapan sistem dan upaya perlindungan sosial, pemenuhan pelayanan dasar, mengurangi kerentanaan masyarakat terhadap bencana, menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber dan membuat kerangka kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 89 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 38 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Pencapaian tersebut jika disajikan dalam persentase dapat dilihat pada diagram berikut ini :

Gambar 2.2
Persentase Capaian Tujuan 1 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.2
Capaian Tujuan 1 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.							
1.1.1*	Tingkat kemiskinan ekstrim.						
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	6,04	6,28	6,04	
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.							
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.						
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	358,76	356,45	343,82	
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.						
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	358,76	356,45	343,82	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.							
1.3.1*	Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.						
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	25,2	▼
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%	85,78	53,8	0,38	▼
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	●
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	87,19	●
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	●
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	●
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	●
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	▼
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	103,47	●
	RPJMD - APK SLB	Indikator Program	%	85,78	53,8	85,78	●
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan	Indikator Program	%	82,32	35	31,16	▼

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah						
	RPJMD - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100%	100	100	
	RPJMD - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100%	100	100	
	RPJMD - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100%	100	100	
	RPJMD - Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100%	100	100	
	RPJMD - Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	Indikator Program	orang	13	25	13	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	100	
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Atas (SMA)	Indikator Progul	persen	20	20	15	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Indikator Progul	persen	20	20	15	
	Progul - Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3	Indikator Progul	orang	401	401	0	
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.						
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	86,18	
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	31,16	
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	50,46	
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	45,76	11,26	50,46	
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
1.4.1*	Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.						
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM	72,56	72,74	73,26	●
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	9,09	9,18	9,18	●
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	69,62	69,80	69,90	●
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai	72,65	72,74	73,26	●
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,18	●
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun	69,59	69,8	69,90	●
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	83,78	●
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	83,08 (BPS 69,2)	●
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	97,4	97,8	97,8	●
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	▼
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	85,19	▼
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	87,19	●
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	75,03	75	75	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	82,26	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	82,05	
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	61.11	
	RPJMD - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	14,36	
	RPJMD - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	67,21	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,662	
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,91	99,5	99.98	
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25%	73,7	77,42	
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26%	82	82,05	
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	75,034	75	75	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	61.1	
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	99,91	99,5	99,98	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	81	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	81	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	118	0	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	40	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	40	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	55	0	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	0	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	4	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa	Indikator Progul	unit	0	15	15	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	(SLB) > Jumlah SLB dengan 4 sarana air minum yang layak						
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	46	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	57	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	59	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia > Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	-	2	2	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	lokasi	10	12	12	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	lokasi	10	12	12	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	lokasi	-	-	0	
1.4.2*	Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.						
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	Indikator Program	%	75	80	80	
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.							
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.						
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	95,59	53	75	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	Indikator Program	%	0	3	0	
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	
1.5.2*	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.						
1.5.3*	Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030						
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	
1.5.4*	Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana						
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks	0,46	0,49	0,50 target BNPB (target rpjmd 0,62 tidak tercapai, penilaian mandiri 0,64 dari inaris)	
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	71	
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	2	10	10	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.							
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.						
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	98479	14961	14.418 (Parsial tahun 2022)	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	110,37	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	108,85	
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta	46255	47872	49678	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	6,5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	11,16	
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%	-1,41	2,14	4,8* (data sementara)	
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	NA	2,4	1,6	
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%	NA	6,54		
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	530	368	289	
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	6,5	
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	46,15	8,6	20	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	6,65	2,02	73,68	
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD	70	51	51	
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa	381	410	417	
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%	2,65	17,94	17,98	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	1,72	
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%	54,72	20	20	
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	40	
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	38174	41373	40653	
	RPJMD - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Indikator Program	hektar	53.830	50000	50000	
	RPJMD - Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Indikator Program	Sentra	42	20	25	
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	38.174	41373	40653	
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan	Indikator Progul	>= persen	10	10	9,47	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD						
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	170	470	515	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	2105	5872	5900	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	500	1500	1600	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	300	300	320	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	4.532	4.759	150	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	113	500	500	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang	1.040	1.950	3859	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1645	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	412	412	330	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	200	200	300	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	150	350	280	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang	765	675	1625	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	-	200	200	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	266	112	112	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta	Indikator Progul	orang	266	112	1192	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
	Progul - Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil > Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Ha)	Indikator Progul	Ha	50.000	50.000	50.000	
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.						
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.							
1.b.1	Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.						

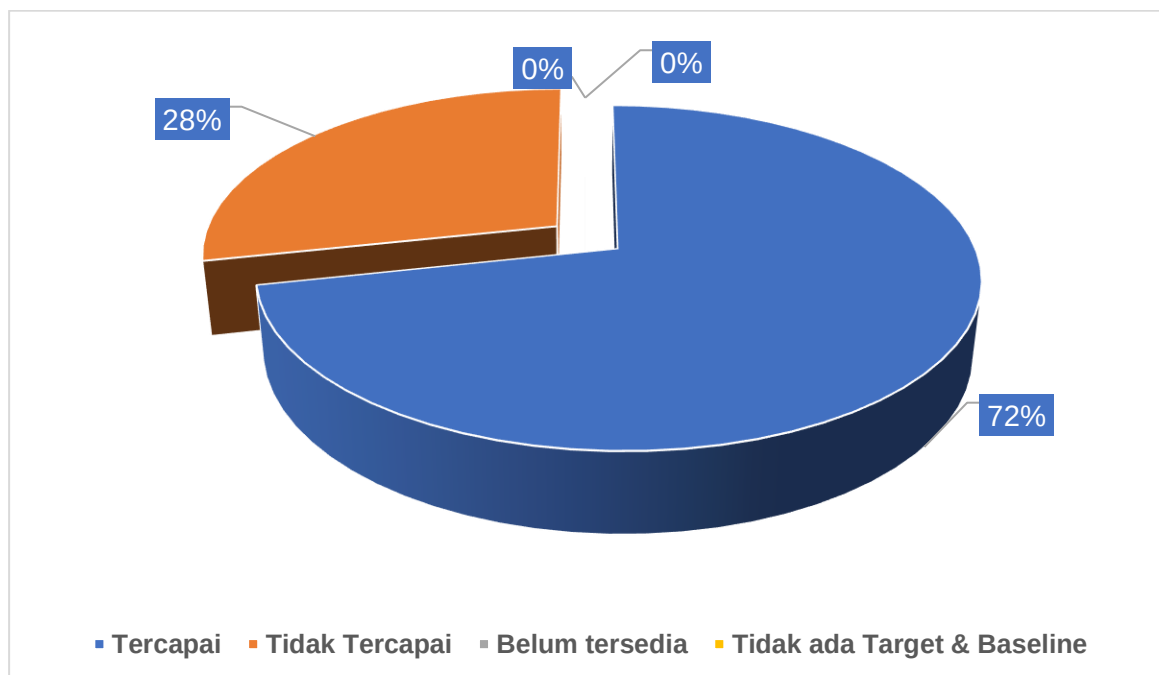
2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Pada tujuan 2 yaitu tanpa kelaparan pada tahun 2030, terdapat 11 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 67 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, menggandakan produktivitas pertanian, menjamin sistem produksi pangan berkelanjutan, mengelola keragaman genetik, meningkatkan kapasitas produktif pertanian, memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dan membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim. Dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 48 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 19 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator belum tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Jika dipersentasekan pencapaian dari tujuan 2 ini adalah 72% pada indikator yang mampu mencapai target, 28% pada indikator dengan target yang tidak tercapai, 0% indikator yang tidak tersedia dan 0% pada indikator yang tidak mempunyai target dan baseline. Secara lebih detail dapat disajikan pada diagram berikut :

Gambar 2.3
Persentase Capaian Tujuan 2 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Untuk lebih jelasnya pencapaian dari target 2 akan dirinci dalam tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3
Capaian Tujuan 2 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.							
2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).						
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	25,2	
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	79,45	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86,41	92	84,02	
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912699	833.110	610.296	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	89.80	
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	27,91	
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton	1.346.063	1.542.909	1442000	
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton	921.514	978.062	950058	
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	500.000	
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	0	
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	500.000	
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	0	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.						
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	79,45	
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86,41	92	84,02	
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912.699	833.110	610.296	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	89.80	
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	27,91	
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.							
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.						
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	25,2	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	
2.2.2*	Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.						
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	23,30	18,44	25,2	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	
2.2.2.(a)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).						
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	79,55	79,13	79,45	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	912699	833.110	610.296	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	83,8	82,5	89,80	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	Indikator Program	%	83,80	82,5	89,8	
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	43,75	22	27,91	
	RPJMD - Tingkat konsumsi ikan	Indikator Program	Kg/kap/th	40,46	40	40,77	
2.2.3*	Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.						
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.							
2.3.1*	Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan						
2.3.1 (a)	Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan						
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	110,37	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	108,85	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	6,5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	11,16	
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	6,5	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
2.3.2*	Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.						
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	107,61	100,99	110,37	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,44	103,47	108,85	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	9,74	5	6,5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	17,31	5	11,16	
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	6,7	5	6,5	
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.							
02.04.01	Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.						
2.4.1(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.						
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.							
2.5.1*	Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.						
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan	Indikator Progul	batang	35.500	50.000	50.000	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kakao yang diadakan	Indikator Progul	batang	33.000	100.000	100000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan	Indikator Progul	batang	473.000	300.000	300000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Karet yang diadakan	Indikator Progul	batang	23.500	50.000	50000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan	Indikator Progul	batang	2.100	200.000	200000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan	Indikator Progul	batang	-	37.500	12500	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan	Indikator Progul	ton	5,15	1.000	1000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan	Indikator Progul	ton	6,18	120	120	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cabe yang diadakan	Indikator Progul	gram	3.450	16.500	16500	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Bawang Merah yang diadakan	Indikator Progul	kg	28.000	100.000	100000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Manggis yang diadakan	Indikator Progul	batang	36.900	20.000	20000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jeruk yang diadakan	Indikator Progul	batang	17.200	40.000	40000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Alpukat yang diadakan	Indikator Progul	batang	10.450	20.000	20000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Durian yang diadakan	Indikator Progul	batang	13.600	20.000	20000	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Pala yang diadakan	Indikator Progul	batang	7.155	15.000	10030	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kayu Manis yang diadakan	Indikator Progul	batang	-	44.500	44500	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cengkeh yang diadakan	Indikator Progul	batang	86.400	30.480	70090	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Tembakau yang diadakan	Indikator Progul	batang	-	15.000	0	▼
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jahe yang diadakan	Indikator Progul	kg	-	2.000	0	▼
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kunyit yang diadakan	Indikator Progul	kg	-	2.000	0	▼
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Lengkuas/Laos yang diadakan	Indikator Progul	kg	-		0	▼
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Urusan Kelautan dan Perikanan > Bibit rumput laut	Indikator Progul	kg	-	1.500	1.500	●
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	500.000	●
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	0	▼
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	500.000	●
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	0	▼
2.5.2*	Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.						
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.							
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.						

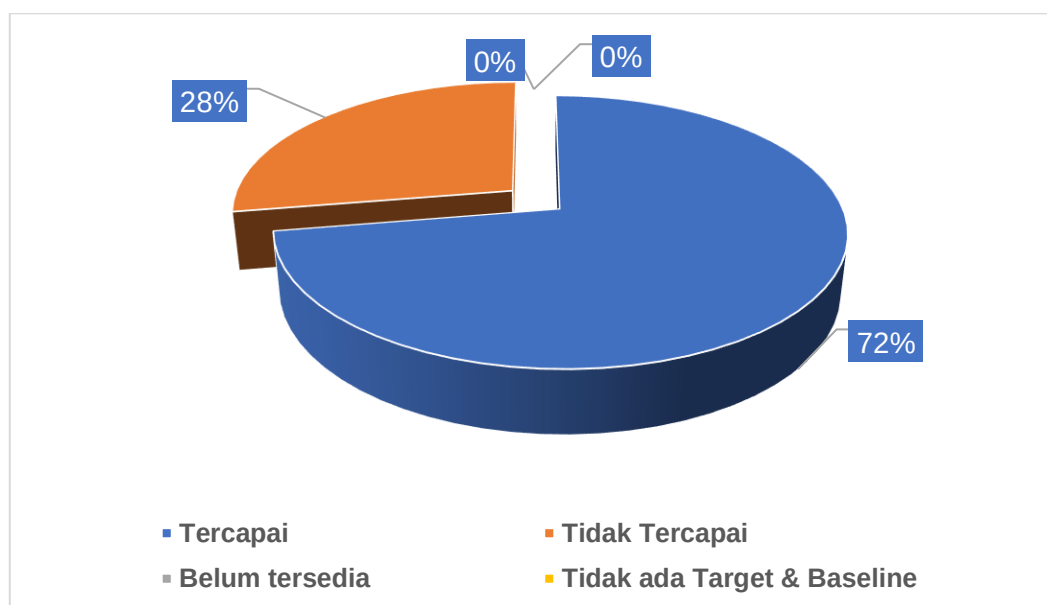
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	10	10	9,47	
2.a.2*	Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.						
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	10	10	9,47	
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.							
2.b.1*	Subsidi ekspor pertanian.						
2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.							

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Pada tujuan 3 yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera, terdapat 22 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 58 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari penurunan kematian ibu dan bayi, mengurangi kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular, pencegahan penyalahgunaan zat, menjamin akses layanan kesehatan seksual dan reproduksi, meningkatkan cakupan kesehatan universal, penguatan pelaksanaan pengendalian tembakau (tobacco control), pengembangan dan penelitian vaksin dan obat, serta peningkatan pembiayaan kesehatan. Dari pencapaian 58 indikator yang diterapkan di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pencapaian yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat 42 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 16 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator belum tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.4
Persentase Capaian Tujuan 3 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.4
Capaian Tujuan 3 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.							
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).						
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	74,8	
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	79,6	
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.						
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	74,8	
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	79,6	
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.							
3.2.1*	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.						
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	87,19	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	74,8	●
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	79,6	●
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.						
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	▼
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	68,16	74,8	74,8	●
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	76,29	79,6	79,6	●
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.							
3.3.1*	Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.						
3.3.2*	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.						
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	76	231	231	●
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.						
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	●
3.3.3.[a]	Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.						
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	●
3.3.4*	Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.						
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.						
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	
3.3.5.[a]	Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.						
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	
3.3.5.[b]	Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.						
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.							
3.4.1.(a)	Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.						
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	7,2	
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	19	
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	19	
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	19	
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	19	
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.						
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	19	
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	19	
03.04.02	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.						
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.							
03.05.01	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.						
3.5.1(a)	Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis						
3.5.1(b)	Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.						
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.						
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.							
03.06.01	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.							
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.						
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%	50,60	62,58	52,41	▼
3.7.2*	Angka kelahiran remaja (umur 10-14 tahun; umur 15-19 tahun) per 1000 perempuan di kelompok umur yang sama.						
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	11,8	19,1	12,2	●
3.7.2.[a]	Total Fertility Rate (TFR).						
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	2,6	2,7	2,46	●
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.							
3.8.1*	Cakupan pelayanan kesehatan esensial.						
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	71,72	78,5	75,33	▼
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	10,2	13	9,7	●
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	85,19	▼
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	87,19	●
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	82,26	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	86,18	●
	RPJMD - Insidensi Tuberkolosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	76	231	231	●
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	18	17	18	●
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	31,16	▼
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	7,2	▼
	RPJMD - Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Indikator Program	Orang	574	420	427	●
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25%	73,7	77,42	●
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupaten/kota	6	8	19	●
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupaten/kota	7	8	19	●
3.8.1.[a]	Unmet Need Pelayanan Kesehatan.						
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,662	▼
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,662	▼
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	86,18	●
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	31,16	▼
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	70,25%	73,7	77,42	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.8.2*	Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.						
3.8.2.[a]	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).						
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,32	86,1	86,18	
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	82,32	35	31,16	
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.							
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.						
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	0,74	8,9	7,2	
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keeluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.							
3.b.1*	Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.						
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	53,9	75	87,19	
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Pertama	Indikator Progul	persen	70	80	80	
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Kedua	Indikator Progul	persen	60	70	70	
	Progul - Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju Herd Immunity	Indikator Progul	persen	70	80	80	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
3.b.2*	Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.						
3.b.3*	Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat esensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.						
	RPJMD - Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin esensial	Indikator Program	%	100	92	94,74	
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.							
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.						

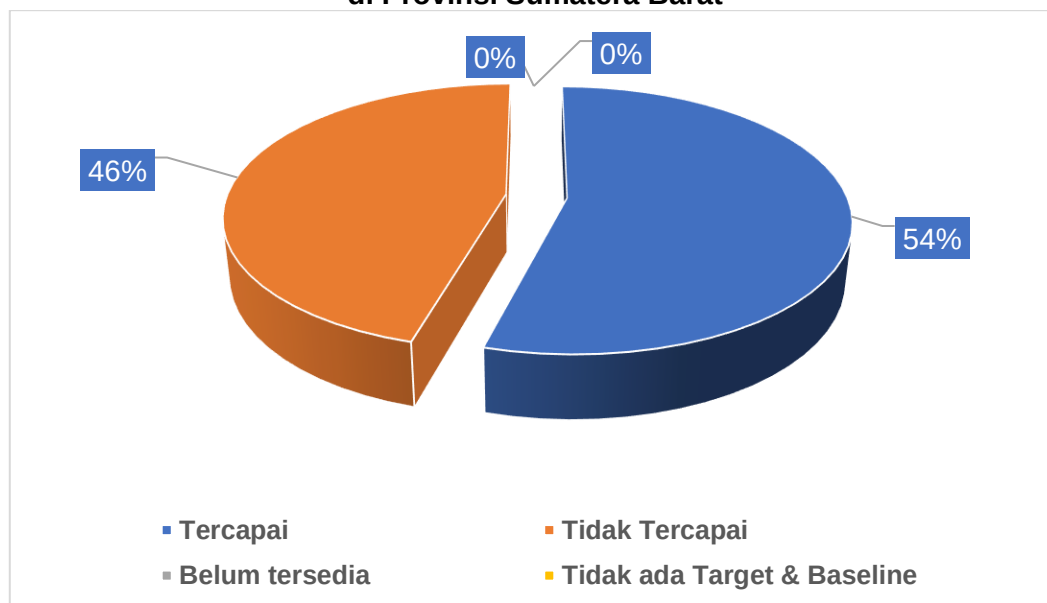
2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata Serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Pada tujuan 4 yaitu Pendidikan berkualitas pada tahun 2030, terdapat 7 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 46 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, akses yang sama terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas, peningkatan keterampilan, menghilangkan disparitas gender, peningkatan kemampuan literasi dan numerasi, membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, dan meningkatkan jumlah guru berkualitas. Dari capaian tujuan 4 ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 25 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 21 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator belum tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Gambar 2.5
Persentase Capaian Tujuan 4 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.5
Capaian Tujuan 4 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.							
04.01.01	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.						
4.1.1.(a)	Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca,						
	(ii) matematika.						
4.1.2*	Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.						
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,18	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	103,47	93,22	77,17	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,94	52,38	48,62	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	50,94	32,77	28,55	
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	103,47	
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	77,19	
4.1.2.[a]	Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.						
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,07	9,18	9,18	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	103,47	93,22	77,17	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,94	52,38	48,62	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	50,94	32,77	28,55	
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	103,47	93,22	103,47	
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	77,19	
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.							
4.2.1*	Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.						
4.2.2*	Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.						
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.							
4.3.1*	Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.						
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	98479	14961	14.418 (Parsial tahun 2022)	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	1,72	
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	3,92	2	1,72	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	170	470	515	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	2105	5872	5900	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	500	1500	1600	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	300	300	320	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	4.532	4.759	150	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	113	500	500	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang	1.040	1.950	3859	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1645	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	412	412	330	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	200	200	300	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	150	350	280	
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan	Indikator Progul	orang	765	675	1625	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana						
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	-	200	200	
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	266	112	112	
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang	266	112	1192	
4.3.1.[a]	Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).						
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.							
04.04.01	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).						
4.4.1.(a)	Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).						
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.							
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.						
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	77,19	73,42	77,19	
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
04.06.01	Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.						
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	58,2	43,52	▼
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	27,4	60,48	●
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.						
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.							
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).						
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	81	▼
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	236	236	236	●
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	81	▼
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	118	0	▼
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	40	▼

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	111	111	111	●
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	40	▼
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	55	0	▼
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	0	▼
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	29	29	29	●
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	4	●
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	15	15	●
4.a.1.[a]	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	▼
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.							
4.b.1*	Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.							
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.						

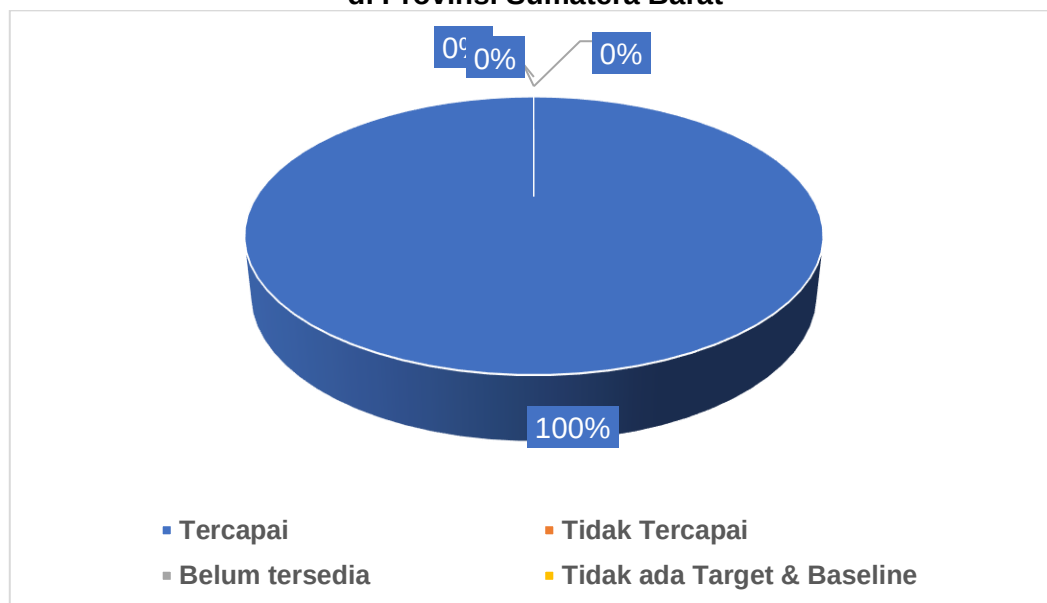
2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Pada tujuan 5 yaitu kesetaraan gender pada tahun 2030, terdapat 7 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 18 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Dari tujuan 5 ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 18 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 0 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator belum tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Gambar 2.6
Persentase Capaian Tujuan 5 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.6
Capaian Tujuan 5 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.							
5.1.1*	Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.						
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	3,87	4,15	8,33	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10,77	
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	20	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.							
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.						
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.							
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.						
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	22,2	21,8	22,5	
05.03.02	Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.						
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.							
05.04.01	Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.						
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.							
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.						
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10,77	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	20	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.						
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	15,38	11,54	21,15	
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	20	
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi- konferensi tersebut.							
5.6.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.						
5.6.2*	Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.						
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.							
5.a.1*	(1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.						
5.a.2*	Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.							
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.						
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang- undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.							
5.c.1*	Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.						
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	3,87	4,15	8,33	
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten/Kota	17	17	17	
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat	Utama	Utama	Utama	

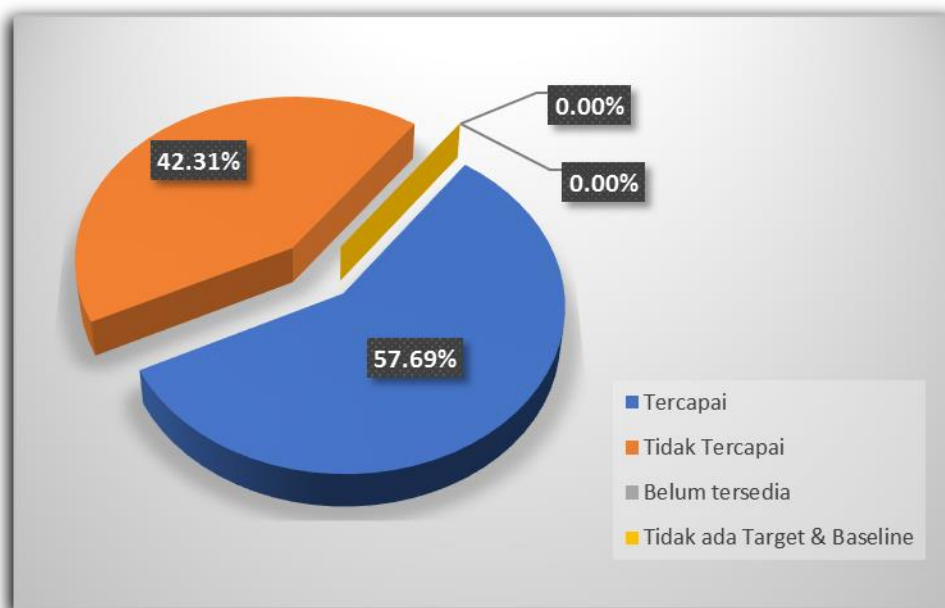
2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Dalam rangka mencapai tujuan 6 yaitu air bersih dan sanitasi layak pada tahun 2030, terdapat 9 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 26 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak, kualitas air dan limbah, serta pemanfaatan, pengelolaan dan pelestarian sumber daya air. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 15 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 11 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Capaian diatas dapat disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2.7
Persentase Capaian Tujuan 6 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.7

Capaian Tujuan 6 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.							
6.1.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.						
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	83,78	
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%	0	100	0	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	82,26	
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26%	82	82,05	
6.2 . Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.							
6.2.1*	Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.						
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	83,08 (BPS 69,2)	
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	82,24	86	85,19	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	82,05	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
6.3 . Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.							
06.03.01	Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman						
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	82,26	▼
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	●
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	298983	●
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasionalkan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	11	●
6.3.1.(a)	Persentase limbah cair industri yang dikelola secara aman						
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	82,26	▼
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	●
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	298983	●
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasionalkan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	11	●
06.03.02	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.						
6.3.2.(a)	Kualitas air permukaan sebagai air baku						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	87,16	74,98	▼
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	75,59	▼
6.3.2.(b)	Kualitas air tanah sebagai air baku						
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	87,16	74,98	▼
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	75,59	▼
6.4 . Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.							
06.04.01	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.						
06.04.02	Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.						
6.4.2.(a)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya						
6.4.2.(b)	Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaannya						
6.5 . Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepentingan.							
6.5.1*	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).						
	RPJMD - Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Indikator Program	%	65,66	66,51	66,60	●
6.5.2*	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.						

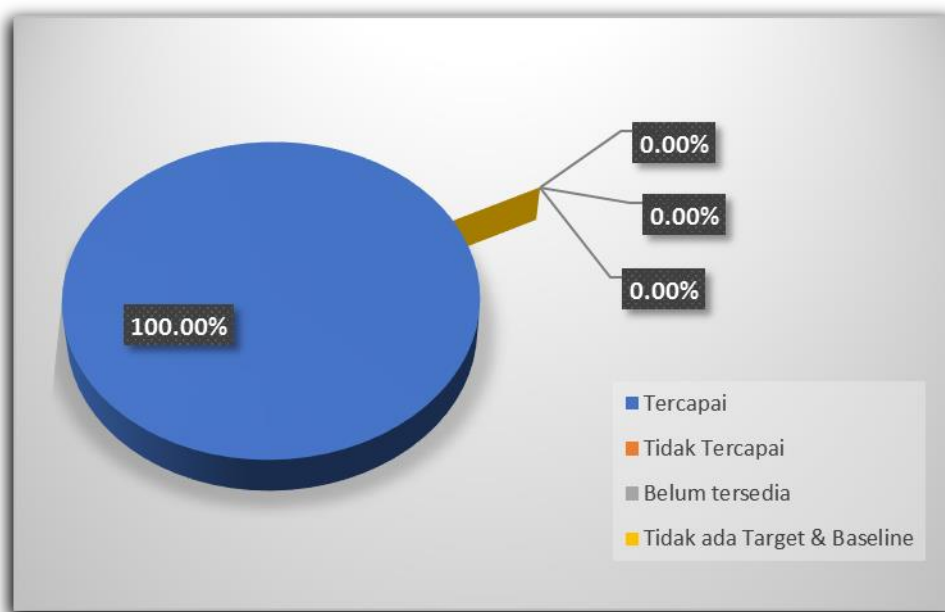
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%	58,50	53,78	58,60	
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Indikator Program	%	58,50	53,78	58,60	
6.6 . Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.							
6.6.1*	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.						
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%	NA	37,3	37,3	
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	NA	37,5	37,3	

2.7. Menjamin Akses Energi Yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan, dan Modern

Dalam rangka mencapai tujuan 7 yaitu energi bersih dan terjangkau, terdapat 4 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 9 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut meliputi akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global dan melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global. Pencapaian dari tujuan 7 ini adalah :

1. Terdapat 9 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 0 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.8
Persentase Capaian Tujuan 7 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.8
Capaian Tujuan 7 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.							
7.1.1*	Rasio elektrifikasi.						
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,91	99,5	99,98	
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	99,91	99,5	99,98	
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.						
7.1.02	Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.						
7.1.2.(a)	Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.						
7.1.2.(b)	Rasio penggunaan gas rumah tangga.						
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.							
7.2.1*	Bauran energi terbarukan.						
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	29	
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	29	
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.							
7.3.1*	Intensitas energi primer.						
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	29	
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	29	
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih, teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
7.a.1	Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.						
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang							
7.b.1*	Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)						
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	29	
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	29	

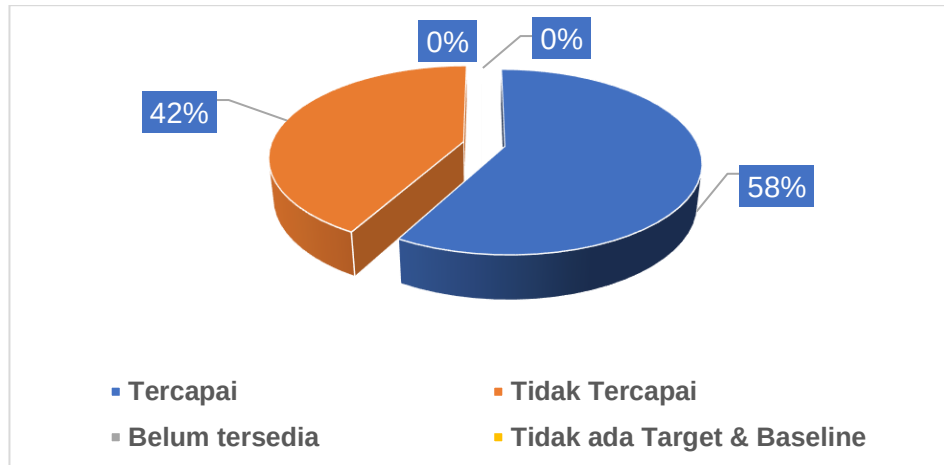
2.8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pada tujuan 8 yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, terdapat 11 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 31 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita, mencapai tingkat produktivitas ekonomi lebih tinggi, menggalakan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan (NEET), mempromosikan pariwisata berkelanjutan, dan memperkuat lembaga keuangan. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 18 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 13 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Secara kumulatif capaian target tujuan 8 disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2.9
Persentase Capaian Tujuan 8 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.9
Capaian Tujuan 8 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.							
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.						
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	3,29	3,40	4,36	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.						
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	31,36	32	32,37	
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	45,35	48,29	50,59	
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.							
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa						
8.10.1.(a)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.						
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga	120	540	540	
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	100	200	-	
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	265	
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	50	100	0	
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	5	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.							
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.						
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin						
8.3.1.(a)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan						
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	NA	2,4	1,6	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	3,92	2	1,72	
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	3,92	2	1,72	
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga	120	540	540	
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	100	200	-	
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	265	
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	50	100	0	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	5	
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.							
08.04.01	Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.						
8.4.1.(a)	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan						
08.04.02	Konsumsi material domestik (domestic material consumption).						
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.						
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.						
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%		6,6	6,28	
8.5.2.(a)	Persentase setengah pengangguran.						
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).						
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
08.07.01	Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	▼
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	▼
8.7.1.(a)	Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	▼
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	▼
8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.							
08.08.01	Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.						
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.						
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	50,46	●
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%	9,26	12,36	19,2	●
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	45,76	11,26	50,46	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
08.08.02	Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang- undangan negara terkait.						
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
8.9.1*	Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.						
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	1,27	1,24	1,3	
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.						
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	-100	1,5	500	
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Indikator Program	%	-100	2,5	2,5	
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.						
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%	-40,23	1,5	1,5	
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Indikator Program	%	-40,23	3	3	
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.						

2.9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi

Dalam mencapai tujuan 9 yaitu membangun infrastruktur tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi pada tahun 2030, terdapat 6 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 18 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari pengembangan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil terhadap jasa keuangan, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri, mendorong inovasi, dan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, serta mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau internet. Tujuan 9 ini mendapatkan pencapaian sebagai berikut :

1. Terdapat 10 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 8 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.10
Persentase Capaian Tujuan 9 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.10
Capaian Tujuan 9 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.							
9.1.1*	Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.						
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,662	▼
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,674	0,668	0,662	▼
9.1.1.(a)	Kondisi mantap jalan nasional.						
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%	75,034	75	71,39	▼
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	75,03	75	75	●
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	75,034	75	75	●
9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.						
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.						
9.1.2*	Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.						
9.1.2.(a)	Jumlah bandara.						
9.1.2.(b)	Jumlah pelabuhan penyeberangan.						
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	4	4	4	●
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	4	4	4	●
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	4	4	4	●
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	4	4	4	●
9.2 Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.							
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.						
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.						
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.						
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.							
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.						
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	8,81	8,75		▼
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	530	368	289	▼
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp	IKD	Rp. Triliun	11,36	15,7	20,93	●
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	38174	41373	40653	▼
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	38.174	41373	40653	▼
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1645	●
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.						

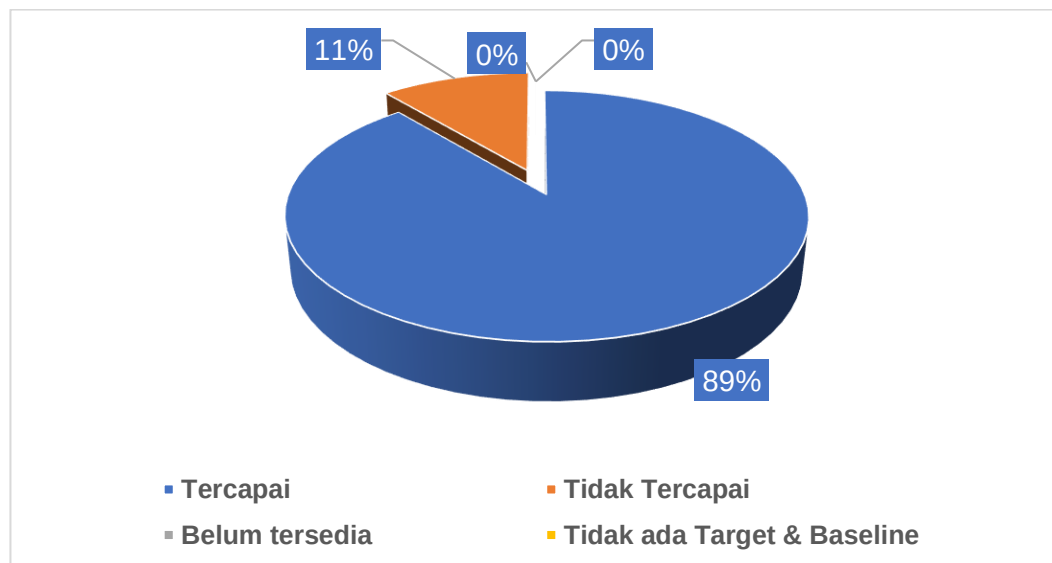
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	265	
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	5	
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.							
9.4.1*	Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.						
9.4.1.(a)	Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.						
9.4.1.(b)	Intensitas emisi sektor industri.						
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.							
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.						
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.						
9.5.2.(a)	Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).						

2.10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara

Tujuan 10 yaitu berkurangnya kesenjangan pada tahun 2030, terdapat 8 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 9 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa :

1. Terdapat 8 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 1 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.11
Persentase Capaian Tujuan 10 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.11
Capaian Tujuan 10 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.							
10.1.1*	Rasio Gini.						
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks		0,31	0,315 (2021)	
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.						
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa		356,45	335,21	
10.1.1.(b)	Jumlah desa tertinggal.						
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	46,15	8,6	20	
10.1.1.(c)	Jumlah Desa Mandiri.						
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	6,65	2,02	73,68	
10.1.1.(d)	Jumlah daerah tertinggal.						
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.						
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.						
10.2 Pada tahun 2030,memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.							
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.						
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.							
10.03.01	Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.						
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	78,51	
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).						
10.3.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.						
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.							
10.04.01	Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.						
10.4.1.(a)	Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.						
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.						
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	45,76	41,95	50,46	
10.04.02	Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.						
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.							
10.05.01	Financial Soundness Indicator.						
10.5.1.(a)	Indikator Kesehatan Perbankan.						
10.7 . Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang							

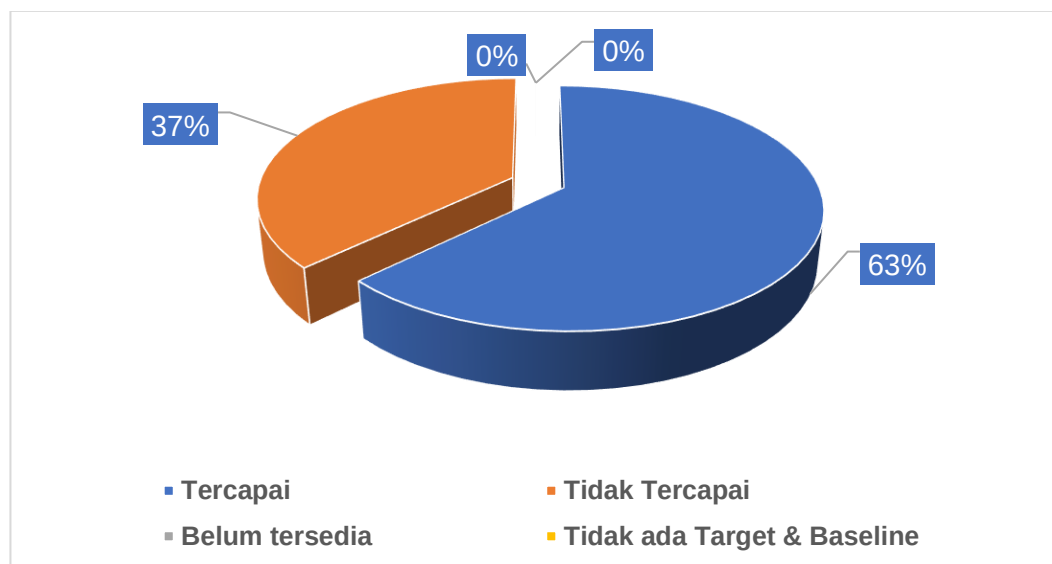
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.							
10.07.01	Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.						
10.07.02	Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migran yang baik.						
	RPJMD - Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar yang mendapatkan penanganan	Indikator Program	orang	13	35	-	
10.7.2.(a)	Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.						
10.7.2.(b)	Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.						
10.07.03	Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.						
10.07.04	Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.						

2.11. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

Pada tujuan 11 ini yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan pada tahun 2030, terdapat 11 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 35 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari meliputi pembangunan kota yang terpadu, infrastruktur dan pelayanan perkotaan, serta risiko bencana dan perubahan iklim di perkotaan. Gambaran capaian tujuan 10 ini antara lain :

1. Terdapat 22 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 13 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.12
Persentase Capaian Tujuan 11 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.12
Capaian Tujuan 11 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.							
11.1.01	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.						
11.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau						
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	83,40	82	83,78	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	68,68	82	69,2	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	83,40	82	82,26	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	68,68	82	69,2	
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82,26%	82	82,05	
11.2 . Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.							
11.2.01	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas						
11.2.1.(a)	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,662	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18127254	19000000	18650012	
11.2.1.(b)	Persentase penduduk terlayani transportasi umum						
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,67	0,668	0,662	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18127254	19000000	18650012	
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.							
11.3.01	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk						
11.3.1.(a)	Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk						
11.3.02	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis						
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.							
11.4.01	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)						
11.4.1.(a)	Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)						
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu	10790	10916	11130	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.							
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang						
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	95,59	53	75	
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	71	
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	2	10	10	
11.5.02	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar						
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB						
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.6.01	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota						
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya						
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	61.11	
	RPJMD - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	14,36	
	RPJMD - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	67,21	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	61.1	
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	1	1	1	
11.6.1.(b)	Persentase sampah nasional yang terkelola						
11.6.02	Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)						
11.6.2.(a)	Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10						
11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara						
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	79,10	87,16	target RPJMD 77,43 capaian 74,98	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	80,75	77,43	75,59	
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.							
11.7.01	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.						
11.7.1.(a)	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua						
11.7.02	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
11.7.2.(a)	Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.							
11.a.1	Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.						
11.a.1.(a)	Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS						
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.							
11.b.1*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030						
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	
11.b.2*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana						
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.							
11.c.1	-						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
11.c.1.(a)	Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal						
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	

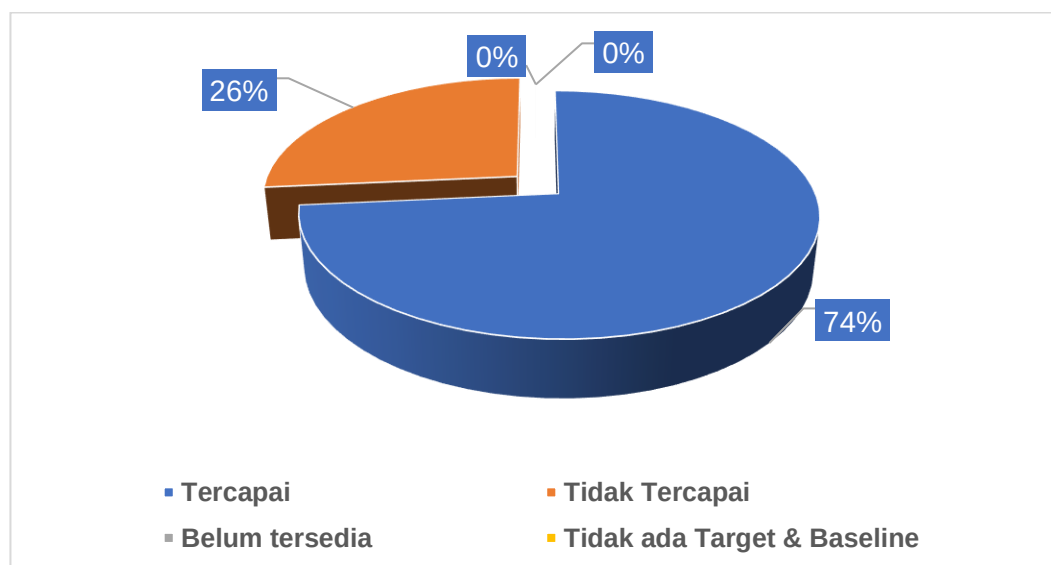
2.12. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

Tujuan 12 yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, terdapat 7 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 34 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari pencapaian pelaksanaan 10 tahun kerangka kerja konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, pengelolaan bahan kimia dan limbah B3, serta pencapaian praktek usaha berkelanjutan. Capaian dari tujuan ini adalah bahwa :

1. Terdapat 25 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 9 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Capaian tujuan 12 disajikan dalam diagram berikut ini :

Gambar 2.13
Persentase Capaian Tujuan 12 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.13
Capaian Tujuan 12 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.							
12.1.1*	Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan						
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.							
12.3.01	(a)? Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)						
12.3.1.(a)	Persentase sisa makanan						
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	14,36	
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	67,21	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	61.1	
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	1	1	1	
	Progul - Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot	Indikator Progul	nagari/desa	4	13	15	
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
12.4.1*	Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.						
12.4.1.(a)	Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri						
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	82,26	▼
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	●
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	298983	●
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	11	●
12.4.1.(b)	Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline						
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	82,26	▼
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	●
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	298983	●
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	11	●
12.4.2*	(a)? Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.						
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	0	100	0	▼
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	-	83	82,26	▼
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	●
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun		261.290	298983	●
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota		10	11	●
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.							
12.5.01	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang						
12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.						
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	61.11	●
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	9,21	17	14,36	▼
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	47,24	56	67,21	●
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	61.1	●
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.							
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
12.6.1(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.						
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional							
12.7.1*	Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi						
12.7.1(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah						
12.7.1(b)	Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa						
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.							
12.8.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.						
12.8.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup						
12.8.1.(b)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.						
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	88,33	84,5	90,48	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	95,24	81	90,9	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,45	92	93,49	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,18	86	91,98	

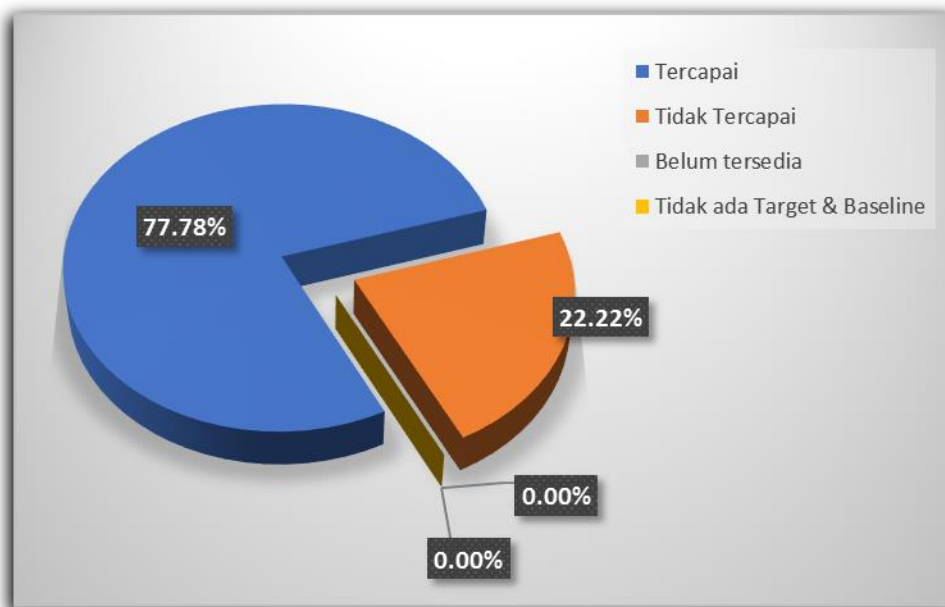
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91,38	92	92,57	●
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	88,34	92	88.58	▼
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	100,73 / 97,65	82,60 / 3,40	95,60 / 3,82	●
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	4	50	58	●
12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.							
12.a.1*	Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)						
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28,19	29	29	●
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28,19	29	29	●
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.							
12.b.1	Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan						
12.b.1(a)	Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development						

2.13. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan

Tujuan 13 SDG's yaitu penanganan perubahan iklim, terdapat 3 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 9 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri pengurangan risiko bencana (PRB), pengurangan korban akibat bencana, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan capaian sebagai berikut :

1. Terdapat 7 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 2 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.14
Persentase Capaian Tujuan 13 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.14
Capaian Tujuan 13 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara							
13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang						
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	71	
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	
13.1.2*	Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030						
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	
13.1.3*	Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana						

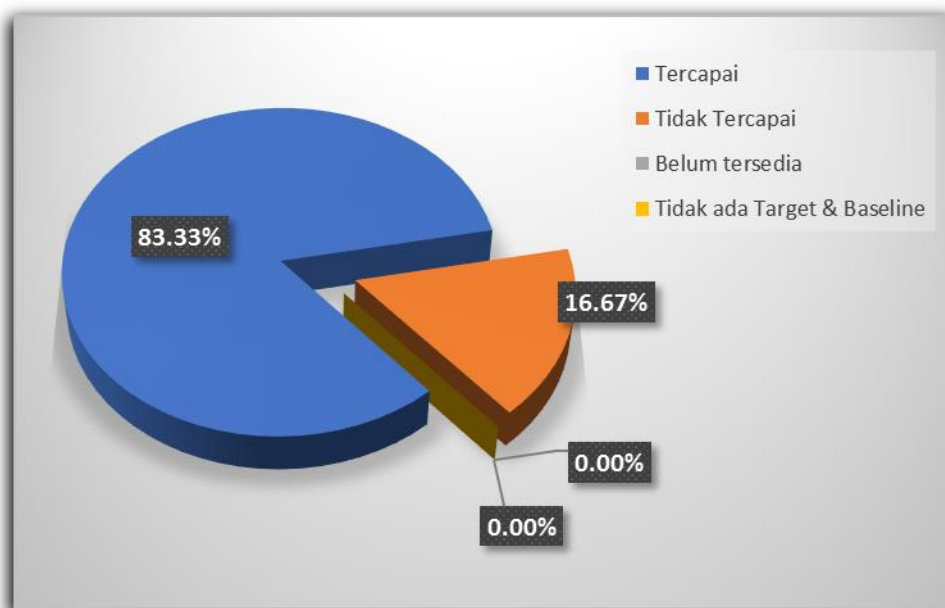
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,25	25	18,75	
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	100	71	71	
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional							
13.2.1*	Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications						
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun						
13.2.2.(a)	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)						
13.2.2.(b)	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)						
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim							
13.03.01	Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.						
13.3.1.(a)	Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup						

2.14. Pelestarian dan Pemanfaatan Ekosistem Lautan

Tujuan 14 yaitu pelestarian dan pemanfaatan ekosistem lautan, terdapat 5 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 18 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari tata ruang laut dan pengelolaan wilayah laut berkelanjutan, penangkapan ikan dalam batasan biologis yang aman (MSY) dan pemberantasan IUU fisihing, peningkatan kawasan konservasi perairan dan pemanfaatan berkelanjutan, serta dukungan dan perlindungan nelayan kecil. Pencapaian dari tujuan 14 adalah :

1. Terdapat 15 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 3 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.15
Persentase Capaian Tujuan 14 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.15
Capaian Tujuan 14 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi							
14.01.01	(a)? Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung						
14.1.1.(a)	Presentase penurunan sampah terbuang ke laut						
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	66,97	60	61.11	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	63,06	60	61.1	
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif							
14.2.1*	Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan						
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton	481143,69	477.362	503.950,37	
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Indikator Program	%	0,19	0,99	6,62	
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator Program	ton	219.570,30	222693	226589,29	
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Indikator Program	%	5,56	3,33	6,66	
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya	Indikator Program	ton	261.573,39	262256	277361,08	
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya laut	Indikator Program	ton	64,9	67	1046,97	
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	Indikator Program	%	100%	6,49	7,5	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Indikator Program	ton	9.118	16652	17500	●
14.2.1.(a)	Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan						
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	37,24	47,06	48	●
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	6	▼
	RPJMD - Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	Indikator Program	M2	140,40	250	300	●
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia							
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut						
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	37,24	47,06	48	●
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	6	▼
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	NA	37,5	37,3	▼
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)							
14.06.01	Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)						

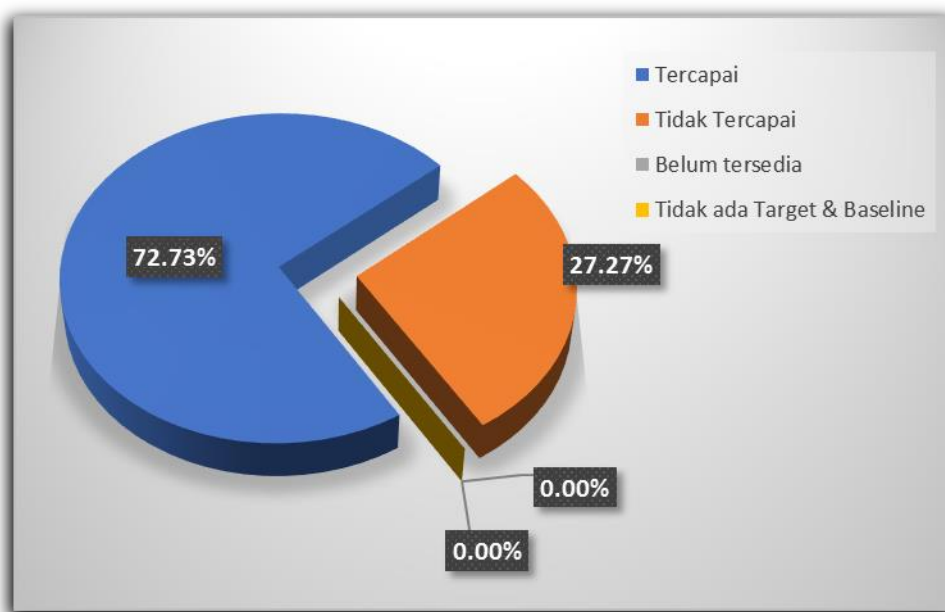
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
14.6.1.(a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha						
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	84,34	82	85	
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Indikator Program	%	84,34	82	85	
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara							
14.07.01	Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)						
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar							
14.b.1*	Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil						
14.b.1.(a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan						
14.b.1.(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi						
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hukum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hukum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want							
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)						

2.15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

Tujuan 15 yaitu pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, terdapat 7 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 11 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari tata kelola kehutanan, konservasi dan keanekaragaman hayati, melestarikan dan memanfaatkan nilai ekonomi hayati, penegakan hukum bidang lingkungan hidup, karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewan dan nabati dengan capaian sebagai berikut :

1. Terdapat 8 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 3 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.16
Persentase Capaian Tujuan 15 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.16
Capaian Tujuan 15 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.							
15.1.1*	Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan						
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	64,20	60,98	63,98	●
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	64,20	60,98	63,98	●
15.01.02	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya						
15.1.2.(a)	Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)						
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	1	▼
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.							
15.02.01	Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari						
15.2.1.(a)	Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju						
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	40	●
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Indikator Program	unit	20	20	20	●
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi							
15.3.1*	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%	0,48	1,29	1,29	●
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	2,55	2,85	2,95	●
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.							
15.4.1*	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi						
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	1	▼
15.4.2*	Indeks tutupan hijau pegunungan						
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	64,20	60,98	63,98	●
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	64,20	60,98	63,98	●
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal							
15.07.01	Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal						
15.7.1.(a)	Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL						
15.9 Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan							
15.09.01	(a)? Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan						
	(b)? integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi						
15.9.1.(a)	Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis						

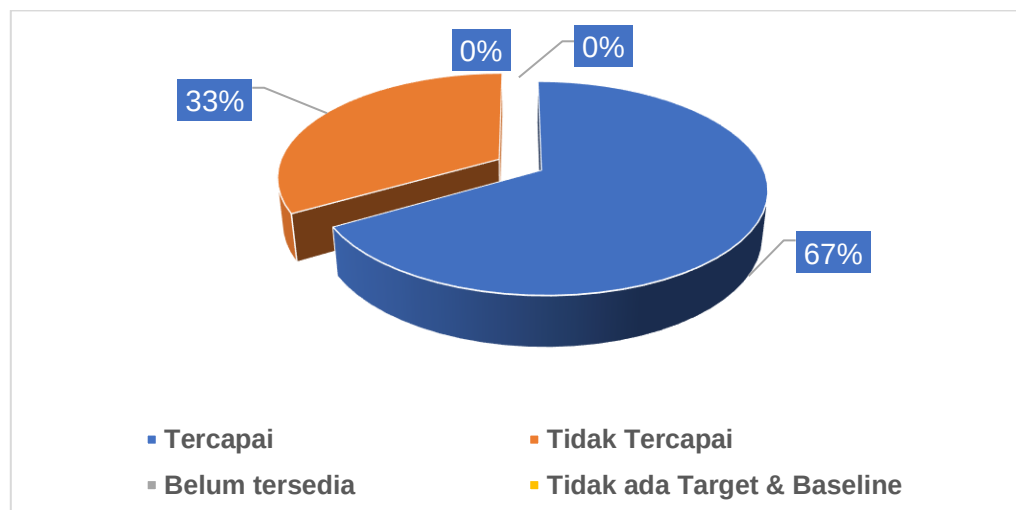
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	1	

2.16. Menciptakan Perdamaian, Menyediakan Akses Keadilan, dan Membangun Kelembagaan yang Tangguh

Untuk mencapai tujuan 16 yaitu pengamanan, keadilan dan kelembagaan yang tangguh pada tahun 2030, terdapat 27 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 81 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mengurangi tindak kekerasan yang berakibat kematian serta meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari tindakan kekerasan, penegakan hukum, pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin serta terwujudnya akses pada keadilan melalui pemenuhan hak warga negara atas kepemilikan akta kelahiran. Lembaga yang efektif, akuntabel dan inklusif merupakan modal utama tercapainya pembangunan yang merata. Target yang akan dicapai dilaksanakan melalui pencegahan korupsi, peningkatan akuntabilitas lembaga pemerintahan serta pelayanan kepada publik, dan menjaga iklim demokrasi. Dari indikator tersebut disimpulkan bahwa:

1. Terdapat 54 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 27 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Gambar 2.17
Persentase Capaian Tujuan 16 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.17
Capaian Tujuan 16 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.							
16.1.01	Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.						
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.						
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	2,05	
16.1.02	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.						
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.						
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus	0	3	1	
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	2,05	
16.1.03	Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.						
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	2,05	
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.						
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indikator Program	nilai	3,04	3,1	2,18	
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3,03	3,01	2,05	
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.							
16.10.01	Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.10.1.(a)	Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.						
16.10.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).						
16.10.1.(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.						
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
16.10.2*	Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.						
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	13,66	10	13,90%	
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	13,66	10	8,86	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.10.2.(a)	Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif						
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	13,66	10	13,90%	
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	13,66	10	8,86	
16.10.2.(b)	Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi.						
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.							
16.2.01	Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir						
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	100	
16.2.1.(b)	Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	100	
16.2.2*	Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	100	
16.2.03	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.						
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	●
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	●
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	▼
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	●
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	▼
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	▼
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	●
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.							
16.3.01	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	100	84	100	
16.3.1.(a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.						
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	67,21	65,85	61,98	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	19,88	16	11,73	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	3,13	2,12	3,58	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	66,1512	65,23	59,64	
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	100%	84	100	
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus	Indikator Program	%	100	84	100	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	yang mendapatkan Layanan komprehensif						
16.3.1.(b)	Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi						
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	
16.3.1.(c)	Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.						
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	
16.3.02	Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.						
16.3.2.(a)	Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.						
16.3.03	Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.						
16.3.3 (a)	Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)						
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.							
16.5.01	Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.						
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).						
16.5.02	Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.						
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.							
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.						
16.6.1.(a)	Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.						
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	68,89	68,5	69,88	
16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP ? B						
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat	BB (77,52)	BB	BB (78,02 sumber data Masih data sementara)	
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah	6	8	8	
	RPJMD - Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Indikator Program	Perangkat Daerah	6	8	8	
16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B						
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	68,89	68,5	69,88	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.6.02	Proporsi penduduk yang puas terhadap						
	pengalaman terakhir atas layanan publik.						
16.6.2.(a)	Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.						
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	88,33	84,5	90,48	●
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	95,24	81	90,9	●
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,45	92	93,49	●
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	90,18	86	91,98	●
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91,38	92	92,57	●
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	88,34	92	88.58	▼
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	100,73 / 97,65	82,60 / 3,40	95,60 / 3,82	●
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	46	▼
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	53	●
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik	Indikator Progul	unit	4	50	57	●

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	(UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak						
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	59	
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	4	50	58	
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.							
16.7.01	Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.						
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).						
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	65,48	
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,77	10,76	10.77	
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	20	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).						
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	65,48	
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	15,38	11,54	21,15	
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	14,03	11,54	20	
16.7.02	Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.						
16.7.2.(a)	Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi						
16.7.2.(b)	Indeks Aspek Kebebasan						
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	78,51	
16.7.2.(c)	Indeks Kesenjangan						
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	65,12	59,12	65,48	
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	73	68,01	78,51	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.							
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	101,47	
	RPJMD - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Indikator Program	%	36%	40	112,5	
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	104,25	
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.						
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	101,47	
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	104,25	
16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun						
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	88,01	86,62	101,47	
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	95,79	94	104,25	
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.							
16.a.1*	Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.						
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.							
16.b.1	Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	pada pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.						

2.17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global

Untuk tujuan terakhir pada tujuan 17 yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan terdapat 8 target pada Indikator SDGs yang selaras dengan 24 Target Indikator Kinerja RPJMD. Target-target tersebut terdiri dari mobilisasi sumber daya domestik, kerjasama multipihak termasuk kemitraan global dan kerjasama antara pemerintah dengan swasta, peningkatan dan saling berbagi dalam bidang teknologi khususnya informasi dan komunikasi, perdagangan internasional yang menitikberatkan pada ekspor dan peranannya dalam stabilitas makroekonomi dan monitoring, akuntabilitas serta ketersediaan data.

Capaian dari tujuan 17 ini adalah :

1. Terdapat 14 indikator dengan status sudah mencapai target
2. Terdapat 10 indikator sudah dilaksanakan namun belum mencapai target
3. Terdapat 0 indikator data tidak tersedia
4. Terdapat 0 indikator tidak ada target dan baseline

Hasil capaian tujuan dimaksud disajikan dalam diagram berikut :

Gambar 2.18
Persentase Capaian Tujuan 17 TPB/SDGs Tahun 2022
di Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Laporan Monitoring Dan Evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Tabel 2.18
Capaian Tujuan 17 di Provinsi Sumatera Barat

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.							
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.						
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	46,50	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	2,37	3,58	-11,24	
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	36,6	1,92	
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	8,37	
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.						
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	46,50	
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	36,6	1,92	
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	13,78	7	8,37	
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	8,37	
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.						
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	38,05	37,84	46,50	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	2,37	3,58	-11,24	
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	1,02	36,6	1,92	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	13,78	7	8,37	
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	13,77973812	7,2	8,37	
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.							
17.10.01	Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).						
17.10.1(a)	Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati						
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.							
17.11.01	Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.						
17.11.1.(a)	Pertumbuhan ekspor produk non migas						
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp	IKD	Rp. Juta	3066,93	1420,99	2492.04 (Jan-Okt)	
	RPJMD - Nilai ekspor	Indikator Program	juta US\$	"3066,93 (Juta \$)"	1420,99	2492.04 (Jan-Okt)	
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.							
17.16.01	Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.						
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.17.01	Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).						
17.17.1.(a)	Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.						
17.17.1.(b)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).						
17.17.1.(c)	Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.						
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.							
17.18.01	Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs						
17.18.1.(a)	Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.						
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	58,82	
17.18.1.(b)	Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.						

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	58,82	
17.18.2*	Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.						
17.18.3*	Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.						
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.							
17.19.01	Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.						
17.19.1.(a)	Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.						
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	58,82	
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	66,7	60	68,63	
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan	Indikator Program	%	60	60	70,59	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
	data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						
17.19.1.(b)	Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.						
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	66,7	60	58,82	▼
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%	60	60	54,9	▼
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	66,7	60	68,63	●
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	60	60	70,59	●
17.19.02	Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b)? mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.						
17.19.2 (a)	Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.						
17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).						
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.							

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target SDGs Tahun 2022	Capaian SDGs Tahun 2022	Status
17.03.01	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.						
17.03.02	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.						
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.						
17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.							
17.06.01	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya						
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga						
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)						
17.8 Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.							
17.8.1*	Persentase pengguna internet						

2.18. Tantangan dan Kendala Pelaksanaan TPB/SDGs

Pencapaian target indikator pada RAD TPB/SDGs sampai dengan tahun 2022 didukung oleh program dan kegiatan baik dari pemerintrah daerah maupun nonpemerintah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 17 Tujuan TPB oleh Perangkat Daerah diidentifikasi beberapa permasalahan yang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

- a. Masih adanya kondisi masyarakat yang belum menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun dikarenakan faktor ekonomi, minat untuk bersekolah rendah, perhatian orang tua yang kurang dan sebagainya
- b. Pandemi Covid 19 yang telah berjalan selama 2 tahun menjadi penghambat kemajuan pendidikan dimana Proses Tatap Muka (PTM) di sekolah dibatasi sehingga mempengaruhi kualitas belajar siswa salah satunya pembelajaran daring dan masih adanya daerah yang belum terjangkau jaringan internet (blank spot)
- c. Masih terdapatnya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan di sekolah
- d. Belum adanya hasil AN (Assesment Nasional) Tahun 2021 dari kemendikbud
- e. Faktor Sarana prasarana sekolah yang belum memadai, SDM pendidik yang belum memenuhi kualifikasi standar, jumlah siswa yang belum memenuhi SNP (Standar Nasional Pendidikan)

2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- a. Masih ada persalinan kehamilan yang menggunakan tenaga non Kesehatan
- b. Masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki jamban sehat
- c. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat akan Kesehatan terutama Kesehatan lingkungan
- d. Aplikasi pelaporan (STBM Smart) tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga sistem pelaporan terkendala dan pelaporan secara manual tidak berjalan dengan baik
- e. Isu negatif terkait kehalalan imunisasi yang masih beredar di tengah-tengah masyarakat
- f. Adanya Pandemi menghambat penemuan kasus serta tidak makasimalnya layanan Kesehatan terutama pada Posyandu dan Puskesmas
- g. Terbatasnya SDM Kesehatan baik dari kualitas dan kuantitas terutama pada pusat layanan pertama
- h. Terbatasnya Jumlah dan sebaran Tenaga Kesehatan (Bidan Desa)
- i. Terbatasnya pelaksanaan pengawasan /pembinaan UKOT, dan Pelaku Usaha

3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Terbatasnya kewenangan pemerintah Provinsi terhadap Kabupaten/Kota dalam intervensi program akses air minum dan sanitasi

- b. Terbatasnya dukungan anggaran dalam pembangunan Jalan, jembatan, ciptakarya serta pengairan
 - c. Tidak adanya pengawasan yang intensi terhadap kendaraan dengan muatan yang melebihi berat dari yang di izinkan sehingga mengakibatkan jalan cepat rusak (umur ekonomis jalan menjadi singkat)
 - d. Belum adanya MOU antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota terutama terkait dengan sinergi pembangunan infrastruktur
 - e. Belum adanya Keputusan/Penetapan Hukum terkait dengan penetapan Kawasan strategis
 - f. Masih terdapat pihak ketiga yang kurang kompeten dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga menjadi terbengkalai/tidak diselesaikan dengan tepat waktu
 - g. Panjangnya prosedur terutama terkait dengan proses lelang pekerjaan pembangunan yang bersifat fisik
 - h. Faktor cuaca yang sering tidak mendukung pelaksanaan pekerjaan pembangunan fisik
 - i. Terhambatnya pembangunan dikarenakan permasalahan pembebasan lahan
 - j. Adanya kebutuhan di daerah yang mendesak untuk menyusun dokumen seperti mengakomodir perubahan RTRW, Kondisi alam dan adanya kebijakan pemerintah yang bersifat dinamis yang butuh penyesuaian
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- a. Belum ada regulasi tentang RTLH
 - b. Merupakan kewenangan kabupaten/kota
 - c. Lokasi PSU yang sulit diakses
 - d. Terbatasnya SDM pengelola kegiatan
 - e. Masih kurangnya dukungan dari masyarakat
 - f. Belum ada regulasi yang mengatur tentang sertifikasi dan registrasi untuk pengembang perumahan
 - g. Masih belum maksimalnya komitmen Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk pengurangan kawasan kumuh provinsi
 - h. Masih banyaknya permukiman yang belum memiliki PSU yang layak
5. Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Terdapatnya gangguan trantibum yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup Panjang
 - b. Masih adanya OPD yang belum berkoordinasi/kurang bersinergi dengan Satpol PP
 - c. Terbatasnya tenaga PPNS untuk melakukan penegakan Perda
 - d. Terbatasnya kewenangan penentuan status bencana
 - e. Masih belum memadainya Sumber Daya aparatur yang memahami teknis Penanggulangan Bencana

- f. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana
 - g. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan resiko bencana seperti jalur evakuasi, selter dll
 - h. Sebagian besar masyarakat yang berada pada daerah resiko bencana masih belum paham terkait dengan upaya dan Tindakan dalam pengurangan resiko bencana
 - i. SDM Satpol PP yang masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas
 - j. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP
 - k. Minimnya anggaran yang tersedia sedangkan Perda yang ditegakkan cukup banyak.
 - l. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana damkar di Provinsi dan Kabupaten/ Kota
 - m. Belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran
6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
- a. Pemahaman terkait dengan kinerja dan penilaian Indek Partisipasi Sosial (IKD) yang masih terbatas dan belum diketahui semua pihak terutama oleh penyelenggara urusan sosial
 - b. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota terutama dalam rehabilitasi sosial diluar panti yang mennadi kewenangannya
 - c. Cukup besarnya kebutuhan alokasi anggaran untuk memenuhi SPM yang merupakan kewenangan Provinsi yakni Rehabilitasi Sosial dalam Sosial
 - d. Data DTSK yang masih jarang dilakukan verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
 - e. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan bencana saat tanggap darurat
7. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
- a. Keterbatasan sarana dan prasarana BLK milik pemerintah
 - b. Kuantitas dan kualitas instruktur masih minim dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pangsa kerja
 - c. Tingkat kompetensi tenaga kerja belum maksimal
 - d. Efektifitas tenaga kerja belum optimal
 - e. Budaya kerja di Sumatera Barat yang masih rendah
 - f. Penggunaan teknologi belum maksimal oleh pencari kerja
 - g. Keterbatasan orang yang akan dilakukan pendidikan dasar dan pelatihan di BLK karena dibatasi persyaratan usia, pendidikan, lama pelatihan dll
 - h. Komitmen beberapa perusahaan yang masih rendah untuk menerapkan tata Kelola kerja yang layak sesuai peraturan perundang-undangan.
 - i. Sulit untuk menerapkan sanksi terhadap perusahaan yang sedang bersengketa

- j. Jumlah Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan baik di provinsi (33 orang) yang masih terbatas jika dibandingkan kondisi ideal yang mengharuskan minimal 1 fungsional pengawas ketenagakerjaan menangani 5 perusahaan
 - k. RTK Mikro belum menjadi prioritas bagi perusahaan
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- a. Masih rendahnya alokasi anggaran yang mendukung PPRG.
 - b. Belum ada Tenaga Ahli (Psikolog dan Advokat) untuk penanganan kasus.
 - c. Belum ada Rumah Perlindungan sehingga layanan penampungan sementara belum dapat diberikan.
 - d. Masih terbatasnya kegiatan sosialisasi Stop kekerasan terhadap anak.
 - e. Belum optimalnya Kabupaten/ Kota dalam menerapkan tujuh prasyarat PUG sebagai strategi pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terutama Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Kepulauan Mentawai.
 - f. Budaya masyarakat yang belum siap dipimpin oleh perempuan
 - g. Belum Teradvokasi dan tersosialisasikannya Program dan Kegiatan Pemberdayaan perempuan secara Optimal.
 - h. Belum tersosialisasinya indikator dan cara perhitungan IPHA ke Kab/Kota.
 - i. Masih rendahnya capaian kluster 1 dalam pemenuhan Hak Anak karena masih rendah persentase anak yang terlibat didalam organisasi anak
 - j. Masih rendahnya kluster 4 dalam pemenuhan hak anak karena masih rendahnya persentase anak usia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni
 - k. Rendahnya Tingkat Ekonomi masyarakat
 - l. Masih tingginya tingkat Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - m. Adanya beban ganda perempuan dalam rumah tangga jika diiringi berkarir sehingga memiliki konsekuensi beban kerja yang tinggi dan menyita waktu bersama dengan keluarga
 - n. Terbatasnya komitmen pemerintah kabupaten/kota untuk mendukung penilaian KLA
 - o. Konsep terkait data gender dan anak belum dipahami semua perangkat daerah pemangku urusan
 - p. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Daerah yang terlihat dari masih belum semua Pemerintah Kabupaten/kota yang memiliki regulasi mendukung Pengarusutamaan Gender
 - q. Belum seluh kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang tertuang detail dalam dokumen RPJMD dan renstra Perangkat Daerah
 - r. Terbatasnya jumlah SDM terlatih PPRG dan jumlah anggaran yang responsive gender
9. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- a. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan
 - b. Masih terdapat masyarakat yang belum atau enggan melakukan update data kependudukan (terutama data kematian)

- c. Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang belum mengetahui kegunaan data kependudukan dalam pelaksanaan program
 - d. Masyarakat masih belum mengetahui tentang Kartu Identitas Anak (KIA) serta kegunaan
 - e. Kartu Identitas Anak (KIA) belum menjadi dokumen wajib kependudukan
 - f. Pembiayaan blanko Kartu Identitas Anak (KIA) dibebankan pada APBD Kabupaten/Kota
 - g. Terbatasnya ketersediaan blanko KTP
 - h. Masih banyak masyarakat yang belum mencetak KTP karena telah memiliki Surat keterangan Perekaman KTP
 - i. Masih terdapat masyarakat yang berada pada lokasi yang sulit dijangkau oleh layanan kependudukan seperti Kepulauan Mentawai, perbatasan antar daerah, daerah terisolir, daerah yang sulit diakses transportasi
 - j. Masih terdapat beberapa daerah yang menetapkan denda keterlambatan pembuatan akta kelahiran
 - k. Masih terdapat anak yang lahir di luar pernikahan atau dari orangtua yang menikah tidak tercatat pada akta KUA sehingga enggan untuk mengurus akta kelahiran
 - l. Masih terdapat beberapa orangtua yang malas mengurus akta kelahiran anak
 - m. Masih adanya praktek pernikahan siri sehingga sulit untuk tercatat pada dokumen kependudukan
 - n. Belum adanya kebutuhan mendesak untuk segera memiliki dokumen kependudukan
 - o. Pengeloaan data kependudukan masih belum terintegrasinya antar sector
 - p. Terbatasnya SDM IT untuk memfasilitasi terciptanya inovasi
 - q. Penyajian data kependudukan kurang menarik dan kurang kekinian
 - r. Belum ada analisa yang menggambarkan terkait dengan data yang ditampilkan sehingga tidak diketahui kegunaan data kependudukan
10. Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- a. Pada daerah pedesaan, masih banyaknya angka usia pernikahan dini dan angka kehamilan yang tidak diinginkan pada usia remaja hal ini dikarenakan masih rendahnya tingkat Pendidikan masyarakat serta lemahnya ekonomi masyarakat
 - b. Belum optimalnya pelaksanaan tugas Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah, yang melakukan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan urusan pemerintah Bidang PPKB di wilayah Provinsi Sumatera Barat, karena belum samanya persepsi dalam pelaksanaan urusan pemerintah di Bidang PPKB, baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat Kontrasepsi.
 - d. Capaian indeks kebahagiaan rendah karena minimnya Waktu berinteraksi antar anggota keluarga yang kurang, pola pengasuhan anak yang masih didominasi oleh 1 pihak, terbatasnya waktu berekreasi keluarga.

- e. Rendahnya capaian indeks ketentraman karena terbatasnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah dikeluarga
 - f. Masih rendahnya pemahaman tentang pembangunan kependudukan, terbatasnya analisa serta kajian dalam melihat permasalahan kependudukan, pembangunan belum berorientasi terhadap penduduk,
 - g. Masih rendahnya minat masyarakat untuk menggunakan alat atau obat kontrasepsi, karena takut akan efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi, minimnya informasi terkait dengan alat kontrasepsi yang sesuai untuk digunakan, adanya penolakan dari keluarga serta dianggap bertentangan dengan ajaran agama, dan alasan kesehatan, terbatasnya akses terkait dengan informasi dan tempat layanan
11. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
- a. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperbaiki kualitas air sungai yang merupakan kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sarana, prasarana dan jangkauan layanan pengelolaan sampah yang masih terbatas
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah di sumber seperti pemilahan sampah sejak dari Rumah Tangga
 - d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut serta secara mandiri melakukan pengolahan sampah pada level rumah Tangga
 - e. Belum terkelolanya limbah domestik yang berasal dari pemukiman masyarakat
 - f. Masih maraknya kegiatan penambangan ilegal di sungai
 - g. Terbatasnya kegiatan pengawasan lingkungan yang dilakukan
 - h. Masih minimnya kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan
 - i. Masih belum maksimalnya dalam menerapkan sanksi sebagai tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan
 - j. Belum semua Kabupaten/Kota memiliki Perangkat aturan pengelolaan sampah seperti regulasi dll
 - k. Belum semua usaha dan/atau kegiatan memiliki acuan pengelolaan limbah B3 dalam izin/dokumen lingkungan (belum memiliki rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3);
 - l. Belum semua objek pencemar dan perusak tercakup dalam upaya pencegahan (pengawasan/ pemantauan/ inventarisasi);
 - m. Aktivitas perusakan lebih tinggi daripada kemampuan upaya pemulihan;
 - n. Belum maksimalnya pusat penanganan Pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan
 - o. Masih rendahnya tingkat pelayanan penanganan sampah di Kabupaten/Kota khususnya di wilayah kabupaten.
12. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- a. Masih belum optimalnya komitmen operator atau pengusaha angkutan umum untuk melakukan pengurusan pengaktifan kembali KP
 - b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dan kenyamanan transportasi umum yang dapat memberikan dampak peralihan penggunaan angkutan pribadi ke Angkutan umum
 - c. Terjadinya penambahan penggunaan jumlah kendaraan pribadi di ruas jalan provinsi terutama pada saat hari libur dan liburan Panjang sehingga menyebabkan kemacetan
 - d. Belum optimalnya koordinasi yang baik antara Kepala Terminal dengan Kepala UPTD untuk penambahan dan perbaikan fasilitas Utama dan Penunjang di terminal di tahun 2021.
 - e. Perlunya dilakukan penyesuaian perijinan kembali dengan aturan terbaru menggunakan sistem (OSS) yang terintegrasi
 - f. Belum adanya pembangunan moda transportasi yang terpadu dan saling berhubungan antar wilayah
13. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- a. Berubahnya kewenangan koperasi provinsi dalam pengelolaan UMKM
 - b. banyak koperasi tidak melaksanakan RAT karena Pandemi Covid-19
 - c. Permasalahan Akses Internet dan masih banyak anggota koperasi yang tidak bisa memanfaatkan teknologi informasi
 - d. Dampak pandemic menyebabkan volume usaha turun
 - e. Terbatasnya SDM pengelola koperasi terutama dari sisi kualitas
 - f. Terbatasnya sarana dan prasarana koperasi dalam menjalankan usaha
 - g. Terbatasnya inovasi Produk yang dihasilkan oleh Koperasi dan UKM yang belum dapat bersaing di pasar
 - h. Terbatasnya akses koperasi ke pasar dan permodalan
 - i. Sebaran UMKM yang cukup luas sehingga tidak keseluruhan terjangkau dan terpantau oleh Pemerintah
 - j. Belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha
 - k. SDM koperasi masih kurang memahami tentang kelengkapan kelembagaan koperasi
 - l. Kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri
 - m. Terbatasnya sertifikat halal dan merk yang bisa diberikan secara gratis
14. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
- a. Kurangnya sarana prasarana penunjang untuk pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
 - b. Kurangnya sarana Pengawasan terutama Armada kapal pengawas serta terbatasnya SDM yang melakukan pengawasan
 - c. Belum adanya penetapan dari Pemerintah Pusat terhadap 2 (dua) Kawasan
 - d. Terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan transplantasi terumbu Karang

- e. Sarana dan teknologi penangkapan yang terbatas
- f. Penurunan populasi sumberdaya ikan di laut dan perairan umum
- g. Kebijakan penangkapan ikan terukur sehingga produksi dibatasi
- h. Terbatasnya pelaksanaan monitoring dan pengujian sampel pada 18 (delapan belas) Kabupaten/Kota
- i. kondisi pandemi yg membuat pemasaran ikan jadi terkendala
- j. Masih terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih ikan yang berkualitas yang mendukung peningkatan produksi.
- k. Masih rendahnya konsumsi makan ikan dan belum meratanya distribusi ikan segar terutama pada kabupaten/kota non pesisir
- l. Pada umumnya nelayan Sumatera Barat masih merupakan nelayan skala kecil
- m. Keterbatasan armada dan alat tangkap masih menjadi dilema khususnya bagi nelayan tradisional yang dihadapkan pada kompleksitas permasalahan degradasi kualitas wilayah penangkapan di zona pantai
- n. Masih rendahnya SDM Kelautan dan Perikanan dan Penyuluh Perikanan yang kompeten
- o. Berkembangan sektor lain yang memanfaatkan zona penangkapan seperti transportasi, pariwisata dan sebagainya
- p. Kurangnya enterprenuership khususnya di bidang kelautan dan perikanan karena kurang tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang kelautan dan perikanan
- q. Terbatasnya sarana pengawasan SDI dibandingkan dengan 51.060,23 km² perairan laut Sumatera Barat
- r. Peningkatan permintaan ikan segar dan olahan baik dari regional Provinsi tetangga, sub-regional Negara tetangga maupun pasar ekspor lainnya menjadi permasalahan disaat kualifikasi mutu dan komitmen pasokan yang diinginkan tidak dapat dipenuhi
- s. Kurangnya motivasi dan transfer teknologi seperti nelayan tuna
- t. Masih tingginya praktek illegal fishing di wilayah ZEE luar Mentawai, yang cenderung akan semakin bertambah sekiranya tidak diambil langkah-langkah antisipasi dan solusi konkritnya
- u. Tidak adanya penerbangan langsung baik khusus kargo maupun passenger carrier yang dapat mengangkut cargo hasil perikanan telah menimbulkan kerugian baik karena kuantitas pengiriman maupun karena factor kualitas yang terdegradasi karena faktor waktu pengiriman. mengakibatkan rendahnya nilai jual dan merosotnya imej produk Sumatera Barat di pasar internasional
- v. Masih belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum secara berkelanjutan
- w. Masih belum optimalnya pengolahan paska panen dan diversifikasi olahan

- x. Masih terbatasnya akses permodalan dalam pengembangan usaha perikanan

15. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

- a. Masih terdapatnya daerah rawan pangan
- b. Pemberdayaan Kelompok Wanita tani (KWT) yang belum optimal
- c. Masih rendahnya komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mendukung Ketahanan pangan
- d. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait diversifikasi pangan dan gizi
- e. Masih terbatas intervensi yang dilakukan pada daerah rentan rawan pangan
- f. Masih terbatasnya kegiatan penyaluran bantuan pangan untuk daerah rawan pangan difokuskan untuk mengatasi balita stunting, gizi buruk/gizi kurang, ibu hamil dan ibu menyusui
- g. Masih minimnya kegiatan pengawasan ke lapangan dikarenakan keterbatasan SDM

16. Urusan pemerintahan bidang Pertanian

- a. Belum optimalnya peningkatan Produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
- b. Masih terjadi pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- c. Ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu. dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.
- d. Masih belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah hasil pertanian.
- e. Pemanfaatan teknologi pertanian belum optimal
- f. Rendahnya kemampuan petani dalam akses teknologi, informasi, pasar dan permodalan
- g. Masih banyak kelembagaan petani yang belum berbentuk badan hukum
- h. Masih terbatasnya tenaga penyuluh pertanian serta kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh polivalen masih kurang
- i. Jumlah Populasi Sapi bali yang tinggi sekitar 30% jika dibandingkan dengan populasi sapi di Sumbar)
- j. Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak
- k. Masih terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging
- l. Pengelolaan ternak khususnya sapi lokal masih belum cukup memenuhi kebutuhan daging sapi yang tinggi
- m. Peternakan sapi lokal masih merupakan usaha sampingan masyarakat
- n. Belum adanya pelatihan Teknis untuk pemanfaatan saran dan prasarana peternakan
- o. Terbatasnya sarana pertanian pada tingkat penjual.
- p. Rendahnya alokasi pupuk bersubsidi sehingga terjadi kekurangan pupuk bersubsidi terutama pada akhir tahun

- q. Keterbatasan SDM petugas pengendali OPT.
- r. Kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan.
- s. Operasional Laboratorium lapangan pada tingkat POPT yang kurang memadai yaitu: bahan kimia, peralatan pengujian dan kalibrasi peralatan dan daya tahan tubuh bagi petugas.
- t. Terlambatnya laporan dari pengamatan serangan OPT dilapangan.
- u. Keterbatasan sarana berupa tempat untuk mengadakan diklat bagi petani yang lebih representatif.
- v. Kurangnya Prasarana Pelatihan seperti lokasi praktek lapangan
- w. Pengalihan prioritas anggaran ke program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

17. Urusan pemerintahan bidang Kehutanan

- a. masyarakat sekitar hutan yang tidak konservatif dalam pengelolaan lahan perladangan /perkebunan
- b. rendahnya tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan
- c. masih rendahnya pemahaman masyarakat dalam pengelolaan hutan
- d. masih rendahnya SDM masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan hutan.
- e. alih fungsi menjadi perladangan dan perkebunan dengan penerapan sistem yang kurang konservatif
- f. Sumber daya hutan Sumatera Barat belum terkelola secara optimal untuk meningkatkan perekonomian Sumatera Barat.
- g. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan belum mencapai tingkat yang diharapkan atau belum pada tingkat mandiri (self-mobilization),
- h. Rehabilitasi hutan dan lahan belum sebanding dengan luas lahan kritis di Sumatera Barat
- i. Pengelolaan DAS belum terpadu
- j. Perlindungan dan pengamanan hutan belum maksimal untuk menekan laju degradasi dan deforestasi.
- k. Perbenihan tanaman hutan belum berkembang untuk mendukung pengembangan tanaman unggulan local

18. Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

- a. Masih adanya Lokasi Rumah Tangga yang terisolir yang sulit diakses dan belum teraliri listrik
- b. Masih adanya Rumah Tangga Miskin Penerima bantuan pemasangan instalasi listrik yang belum masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu)
- c. Pebiayaan Investasi untuk pemanfaatan EBT yang cukup besar
- d. Terbitnya UU nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sehingga kewenangan provinsi tidak ada (Tahun 2021-2022)

- e. Belum optimalnya pemanfaatan potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT)
- f. Belum memadainya akses infrastruktur kelistrikan di sebagian besar daerah terisolir/terpencil/perbatasan
- g. Terbatasnya pendanaan/investasi baik dari Pemerintah maupun swasta untuk pengembangan potensi energi baru terbarukan
- h. Masih rendahnya Ratio Elektrifikasi pada beberapa daerah (khususnya Kep.Mentawai)
- i. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral
- j. Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral
- k. Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat
- l. Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar
- m. Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat sehingga terjadi Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan
- n. Belum optimalnya pemanfaatan Potensi air tanah

BAB III

TARGET DAN ARAH KEBIJAKAN PENCAPAIAN TPB/SDGs

Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II sebanyak 289 indikator dari sebelumnya pada Edisi I mencakup 319 indikator atas 17 tujuan dan 169 target TPB/SDGs Indonesia. Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II telah diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan menjadi rujukan penyusunan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs periode 2020-2024 serta Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs bagi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia Edisi II dikelompokkan dalam 4 (empat) dokumen yang tidak terpisahkan, yaitu: (1) dokumen Metadata Indikator TPB/SDGs Indonesia untuk Pilar Pembangunan Sosial (mencakup Tujuan 1, 2, 3, 4, dan 5); (2) Pilar Pembangunan Ekonomi (mencakup Tujuan 7, 8, 9, 10, dan 17); (3) Pilar Pembangunan Lingkungan (mencakup Tujuan 6, 11, 12, 13, 14, dan 15); dan (4) Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola (mencakup Tujuan 16).

Dengan memperhatikan pencapaian dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tujuan 1 sampai dengan Tujuan 17 sebagaimana telah disajikan pada Bab II, maka ditentukan target dan arah kebijakan pencapaian TPB untuk periode pembangunan 5 tahun berikutnya, sesuai dengan sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Rencana program perangkat daerah pada RPJMD secara operasional dijabarkan dalam kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah. Dengan demikian, program, kegiatan, dan sub kegiatan pada kedua dokumen perencanaan ini menjadi pedoman dalam penyusunan RAD TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk masing-masing tujuan pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra PD Tahun 2021-2026. Penetapan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang diikuti dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, menjadi pedoman bagi pembangunan jangka menengah di Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih telah memiliki keselarasan, sehingga visi pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”

Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2020-2024, dan RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025. Untuk memahami Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat tersebut dijelaskan pengertian sebagai berikut:

Masyarakat Madani

Masyarakat Madani dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.

Sumatera Barat Yang Unggul

Masyarakat madani akan tercipta jika masyarakatnya memiliki pengetahuan yang luas dan pendidikan yang berkualitas. Orientasi pendidikan masyarakat madani lebih mengutamakan pembangunan jiwa dan karakter masyarakat sehingga menjadi masyarakat madani yang unggul dan mampu bersaing secara global.

Makna unggul dan berdaya saing yang dimaksud adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian

rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan me-restrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.

Dalam mencapai visi RPJMD, ditetapkan 7 misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing

Pendidikan Masyarakat Sumatera Barat harus memperoleh pendidikan yang bermutu, yang berorientasi pada penguatan kepribadian yang bermoral, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap beradab sehingga menjadi manusia yang kreatif, inovatif dan mampu bersaing ditingkat nasional dan internasional.

Kualitas pendidikan diyakini akan sangat berpengaruh terhadap tingkat keimanan, serta kemampuan berkeaktivitas, berinovasi dan berdaya saing. Era globalisasi saat ini menuntut kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing melalui kompetensi dengan kualifikasi tertentu yang ditandai dengan sertifikat kompetensi.

Selain pendidikan berkualitas, misi pertama yang ingin mewujudkan sumber daya manusia yang terampil yaitu memiliki kemampuan untuk menggunakan akal/pikiran/ide dan kreativitas dalam mengerjakan, mengubah, maupun untuk membuat sesuatu yang lebih bermakna, sehingga mampu berdaya saing. Kualitas hidup masyarakat yang sehat dan sejahtera yang ditandai dengan angka harapan hidup dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang baik. Angka harapan hidup masyarakat Sumatera Barat diyakini akan meningkat dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat, terkendalnya penyakit masyarakat, serta meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

Falsafah budaya Minangkabau dalam *AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* merupakan filosofi hidup yang dipegang dalam masyarakat Minangkabau, yang menjadikan Agama sebagai landasan utama dalam tata pola perilaku dalam nilai-nilai kehidupan. Dengan kata lain, AdaiK Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah merupakan kerangka kehidupan sosial baik horizontal – vertikal maupun horizontal – horizontal.

Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di bagi masyarakat Minangkabau merupakan sebuah identitas, lahir dari sebuah kesadaran sejarah dan pergumulan tentang perjuangan dan hidup. Kemampuan dan kearifan orang Minangkabau dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Agama, dua hal yang berbeda akhirnya dapat menyatu dan dapat saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Minangkabau melalui *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Nilai-nilai filosofis ABS SBK akan terimplementasi dalam kehidupan sosial masyarakat Sumatera Barat jika nilai-nilai tersebut secara masif disosialisasikan serta diajarkan kepada seluruh masyarakat, dan tidak kalah pentingnya nilai-nilai ABS SBK tersebut menjadi kurikulum lokal yang diajarkan di setiap jenjang Sekolah dasar dan Menengah.

3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pertanian dalam arti luas menjadi sektor strategis dalam pembangunan di Sumatera Barat karena beberapa alasan bahwa : a) sektor ini berperan dalam penyediaan suplai bahan pangan (tidak hanya untuk daerah Sumatera Barat tetapi juga provinsi tetangga), b) Potensi pengembangan agroindustri, didukung oleh kemampuan menghasilkan bahan baku yang dapat mendukung pengembangan dalam jangka panjang.

Fokus perhatian perlu diarahkan kepada upaya peningkatan efisiensi kegiatan produksi dan peningkatan nilai tambah (melalui pengembangan agroindustri) dengan mengaplikasikan pendekatan pembangunan kawasan, peningkatan aplikasi teknologi dan upaya membuka peluang pasar yang lebih besar. Dalam kaitan dengan aplikasi teknologi ini ada kecenderungan bahwa tingkat aplikasi teknologi oleh petani/pelaku usaha masih rendah sementara ada banyak produk teknologi yang sudah disediakan atau dihasilkan.

Dalam kaitan ini perlu menjadi perhatian upaya penyuluhan dan alih teknologi pertanian yang memungkinkan petani mengatasi permasalahan usaha dan memanfaatkan sumberdaya lokal.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.

Misi keempat ini bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai pusat perdagangan dan Industri Kecil di Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki potensi untuk mengoptimalkan aktivitas di sektor perdagangan sebagai salah satu sektor utama yang menggerakkan perekonomian masyarakat. Pelabuhan Teluk Bayur merupakan potensi untuk memajukan perdagangan internasional melalui peningkatan volume ekspor, terutama ke negara yang tergabung dalam *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Misi ini diharapkan mampu meningkatkan kontribusi sektor perdagangan dan ekonomi kreatif terhadap PDRB Sumatera Barat.

5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan

Pariwisata termasuk sektor penting dalam pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang diharapkan menjadi industri dan salah satu basis pembangunan Sumatera Barat untuk lima tahun mendatang disamping pertanian. Dalam konteks inilah kita akan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata yang nyaman dan berkesan.

Yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas pengelolaan pariwisata adalah meningkatkan kompetensi pihak pengelola sumberdaya wisata atau sumberdaya penunjang wisata agar dapat mewujudkan pariwisata yang nyaman dan berkesan. Pariwisata yang nyaman dan berkesan ditandai dengan kepuasan dan kenikmatan berwisata yang dirasakan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Lima tahun ini kita melihat dan merasakan kemajuan ekonomi dari sektor pariwisata, untuk itu kita harus memperkuat melalui pembangunan pariwisata berbasis Pariwisata Halal dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition*), dengan pembenahan destinasi wisata baik kelas lokal, nasional dan internasional dengan cara meningkatkan atraksi, aksesibilitas dan amenitas di Destinasi Wisata sekaligus meningkatkan pembinaan kepada masyarakat terutama di wilayah-wilayah destinasi wisata.

6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan Sumatera Barat yang nyaman dihuni dan bersahabat dengan tetap menghargai nilai kearifan lokal. Sumatera Barat yang nyaman huni merupakan gambaran sebuah lingkungan dan suasana yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek, baik aspek fisik (fasilitas infrastruktur yang berkeadilan dan merata, prasarana dan tata ruang) maupun aspek *non-fisik* (hubungan sosial dan aktivitas ekonomi).

Penyediaan infrastruktur tersebut seperti sarana permukiman, kelistrikan, sanitasi, pendidikan, transportasi, persampahan dan lainnya merupakan infrastruktur yang wajib disediakan pemerintah Sumatera Barat. Pembangunan infrastruktur juga wajib memperhatikan penataan ruang, lingkungan dan *green energy* agar tercipta Sumatera Barat yang bersih, tertib dan teratur.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan ini akan bermanfaat optimal dan berkelanjutan jika di tengah potensi bencana alam geologis dan hidrometeorologis yang besar, dapat diantisipasi risikonya melalui usaha PRB (Pengurangan Risiko Bencana). Usaha PRB ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas. Karena itu penting sekali untuk dibangun Sumatera Barat yang tangguh bencana melalui kota/kabupaten serta desa/nagari tangguh bencana.

7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima adalah misi pemerintah Sumatera Barat dengan maksud untuk menghadirkan pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, transparan dan bertanggung jawab. Untuk mewujudkan kualitas pemerintahan ini juga harus didukung oleh komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi secara berkelanjutan di Sumatera Barat guna mendukung agenda reformasi di tingkat nasional. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat memfokuskan pelaksanaan fungsinya, terutama di bidang pelayanan masyarakat.

Memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu didukung dengan kompetensi aparat yang profesional, kemitraan, inovasi, berintegritas, memiliki budaya melayani dengan sistem pelayanan modern berbasis teknologi komunikasi informasi, agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya terjangkau. Proses transformasi pemerintahan di daerah Sumatera Barat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sudah saatnya mendapat perhatian. Tentu tidak hanya sekedar mengubah model pelayanan publik dengan memanfaatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (eGovernment), namun hanya baru sekedar menyediakan informasi tentang pelayanan publik. Oleh karena itu, sudah saatnya pelayanan publik tersebut ditingkatkan menjadi kegiatan eGovernment yang mengarah pada adanya interaksi dan transaksi dengan masyarakat terkait dengan layanan publik yang dibutuhkannya. Selama ini pemanfaatan eGovernment oleh SKPD yang ada belum sampai pada tahapan ini. Walaupun sudah diterbitkan Perda No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta didukung oleh Perda No.10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi, implementasi kedua Perda ini perlu mendapat perhatian SKPD yang ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah juga akan mengupayakan peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia ASN yang dapat memahami, melaksanakan dan mengembangkan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan perkembangan masyarakat Sumatera Barat yang terus berubah.

Untuk itu dibutuhkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional termasuk penataan kelembagaan yang efektif dan efisien yang berlandaskan dalam prinsip *good and clean government*. Penataan kelembagaan ini termasuk bagaimana menyesuaikan jenis, ukuran dan jumlah SKPD yang relevan dengan SDM dan keuangan yang tersedia untuk melaksanakan visi, misi dan program kepala daerah agar efektif dan efisien. Tidak kalah pentingnya, upaya pencapaian misi ini adalah dengan cara peningkatan penerapan sistem nilai melalui pembentukan pola pikir dan budaya kerja serta integritas birokrasi, peningkatan kualitas pengawasan yang independen, profesional dan sinergis serta peningkatan pelaksanaan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta peningkatan kualitas kepatuhan, transparansi dan profesionalisme aparatur.

Begitu juga dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel, dan berkualitas ini harus dimulai dengan mengintegrasikan semua program dan kegiatan ke dalam proses perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang terintegrasi ke dalam sistem yang berbasis pada SPBE. Karena bagaimana pun, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan dapat dilihat dari proses perencanaan dan penganggaran serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Hal lain yang penting adalah bagaimana melibatkan semua pemangku kepentingan dalam mengawasi bagaimana pelaksanaan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sehingga ada sinergitas dalam rangka memperbaiki kelemahan dalam upaya melaksanakan misi ini.

Di samping itu, ke depannya tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja yang berorientasi hasil atau *outcome*. Bahkan dalam perkembangannya, pemerintah daerah juga harus bisa mengembangkan orientasi kinerja ini pada manfaat dan dampak kepada kualitas hidup yang seharusnya didapatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi proses perencanaan berbasis program yang mendukung pencapaian visi dan misi serta program untuk menyediakan standar pelayanan minimum yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Strategi umum yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang dijabarkan oleh 7 (tujuh) misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.
2. Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.
4. Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya baik di bidang infrastruktur maupun di bidang sosial dan ekonomi.
5. Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 terdapat 4 (empat) Tema Program Unggulan yang dijabarkan pada 25 (dua puluh lima) Program Unggulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050 – 47 – 2022 Tentang Penetapan Kinerja Program Unggulan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yakni :

A. Sumatera Barat Sehat dan Cerdas, dengan program unggulan yakni :

1. Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian COVID-19
2. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru.
3. Menjadikan stadion utama Sikabu sebagai pusat kegiatan olahraga & pembinaan olahraga prestasi serta mendorong kebiasaan berolahraga sebagai Adaptasi Kebiasaan Baru
4. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta rupiah untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
5. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen.
6. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses Pendidikan.
7. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri.
8. Memberikan dukungan bantuan hibah penelitian untuk mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta untuk hilirisasi hasil-hasil penelitian sesuai dengan prioritas pembangunan

B. Sumatera Barat Religius Dan Berbudaya, dengan program unggulan yakni :

1. Menjadikan Kawasan Masjid Raya Sumbar (Mesjid Raya, gedung LKAAM dan gedung MUI) sebagai pusat pembelajaran ABS SBK dan wisata religi
2. Dukungan peningkatan sarana dan prasarana serta bantuan operasional bagi kegiatan keagamaan
3. Menjadikan Gedung Kebudayaan, Museum, dan Perpustakaan Provinsi sebagai pusat pendidikan dan wisata IPTEKS (education tourism)
4. Mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kepada seniman dan budayawan

C. Sumatera Barat Sejahtera

1. Meningkatkan pendapatan petani & nelayan serta mengalokasikan 10% anggaran pemerintah provinsi untuk sektor pertanian
2. Mewujudkan Sumatera Barat sebagai salah satu lumbung padi dan jagung serta mandiri beberapa komoditas ternak
3. Memperbaiki tata kelola BUMD dan mendirikan BUMD profesional di bidang pertanian
4. Mencetak 100 ribu *millennial entrepreneur* dan *women entrepreneur* serta pelaku ekonomi kreatif
5. Meningkatkan akses keuangan perbankan dan non perbankan bagi UMKM dan pengusaha pemula

6. Meningkatkan keahlian dan keterampilan bagi pelaku UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
7. Membangun industri pariwisata melalui 1 destinasi wisata berkelas dunia dan 19 destinasi wisata unggulan
8. Membangun 3 pusat pertunjukan seni dan budaya bertaraf Internasional

D. Sumatera Barat Berkeadilan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan perikanan berupa irigasi, bendungan dan pelabuhan serta akses transportasi ke sentra-sentra produksi dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan
2. Percepatan, pemerataan, konektivitas dan integrasi sistem infrastruktur transportasi (darat, laut, dan udara) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang
3. Mengembangkan Kota dan Kabupaten yang tangguh bencana berbasis masyarakat & komunitas
4. Optimalisasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan pada TPA Regional dengan pendekatan sampah sebagai sumber energy alternatif (waste to energy), dan tersedianya tempat pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)
5. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi pelayanan public berbasis elektronik (*e-government*).

Target indikator TPB untuk mendukung pelaksanaan setiap TPB disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan didukung oleh RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota di wilayah Sumatera Barat. Tahun perencanaan pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat mulai tahun 2022 sampai dengan 2026. Penyusunan RAD TPB juga mendapat dukungan program dan kegiatan dari nonpemerintah (*non stateactor*), baik lembaga kemasyarakatan, filantropi, academia, maupun perusahaan.

Rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota yang digunakan dalam mendukung pencapaian target TPB Provinsi Sumatera Barat, meliputi:

1. RPJMD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2017 - 2022 dan RPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023 - 2026
2. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 - 2026
3. RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021 - 2026
4. RPJMD Kabupaten Sijunjung Tahun 2021 - 2026
5. RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 - 2026
6. RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 - 2026
7. RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021 - 2026

8. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2026
9. RPJMD Kabupaten Pasaman Tahun 2021 - 2026
10. RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021 - 2026
11. RPJMD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2021 - 2026
12. RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 - 2026
13. RPJMD Kota Padang Tahun 2019 - 2024
14. RPJMD Kota Solok Tahun 2021 - 2026
15. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2018 - 2023 dan RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024 - 2026
16. RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dan RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026
17. RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2021 - 2026
18. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022 dan RPD Kota Payakumbuh Tahun 2023 - 2026
19. RPJMD Kota Pariaman Tahun 2018 - 2023 dan RPD Kota Pariaman Tahun 2024 - 2026

Rencana aksi ini disusun sesuai kewenangan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Terdapat sebagian indikator TPB yang merupakan kewenangan atau dilaksanakan untuk pemerintah pusat, sehingga tidak diisi target indikatornya oleh pemerintah daerah. Indikator TPB lainnya yang tidak diisi disebabkan tidak direncanakan targetnya serta tidak selaras dengan target indikator kinerja pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Indikator TPB Provinsi Sumatera Barat yang selaras dengan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 sampai dengan 2026 sebanyak 165 Indikator TPB yang selaras dengan 621 Indikator Kinerja yang terdapat pada RPJMD yang terdiri dari 13 Indikator Kinerja Makro, 76 Indikator Kinerja Utama, 215 Indikator Kinerja Daerah, 173 Indikator Program dan 144 Indikator Kinerja Program Unggulan, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1
Jumlah Indikator TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026

Tujuan	Indikator SDGs			Jumlah Indikator RPJMD yang selaras dengan SDGs					
	Jumlah Indikator	Yang selaras dengan RPJMD	Tidak selaras / Tidak tersedia	Indikator Makro	IKU	IKD	Indikator Program	Indikator Progul	Jumlah
Tujuan 1: Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	15	12	3	6	18	42	23	38	127
Tujuan 2: Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	16	11	5	0	16	12	5	36	69
Tujuan 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	33	22	11	0	1	23	31	3	58
Tujuan 4: Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	17	7	10	0	4	9	6	27	46
Tujuan 5: Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14	7	7	0	0	12	6	0	18
Tujuan 6: Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua	15	9	6	0	4	10	8	4	26
Tujuan 7: Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	9	4	5	0	0	5	4	0	9
Tujuan 8: Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	23	11	12	4	4	7	4	12	31
Tujuan 9: Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, Serta Mendorong Inovasi	19	6	13	0	4	4	2	8	18
Tujuan 10: Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	25	8	17	2	0	5	2	0	9
Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	29	11	18	1	7	18	6	3	35

Tujuan	Indikator SDGs			Jumlah Indikator RPJMD yang selaras dengan SDGs					
	Jumlah Indikator	Yang selaras dengan RPJMD	Tidak selaras / Tidak tersedia	Indikator Makro	IKU	IKD	Indikator Program	Indikator Progul	Jumlah
Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	20	7	13	0	1	10	14	9	34
Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim	9	3	6	0	0	5	3	1	9
Tujuan 14 Ekosistem Lautan	12	5	7	0	0	3	15	0	18
Tujuan 15 Ekosistem Daratan	12	7	5	0	0	5	6	0	11
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	50	27	23	0	14	32	30	5	81
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	30	8	22	0	3	13	8	0	24
Total	348	165	183	13	76	215	173	144	621

Adapun arah kebijakan dan target indikator sebagai rencana aksi pencapaian TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang disajikan berdasarkan TPB diuraikan sebagai berikut :



3.1 Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Upaya untuk mencapai **Tujuan 1 TPB/SDGs, yakni Tanpa Kemiskinan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan, dengan Arah kebijakan:
 - a) Meningkatkan penyediaan dan benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
 - b) Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
 - c) Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - d) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
 - e) Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - f) Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas
 - h) Pengawasan pupuk bersubsidi
 - i) Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura
 - j) meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada
 - k) Rehabilitasi lahan dan air
 - l) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengelolaan jalan usaha tani
 - m) Meningkatkan produksi padi dan jagung serta beberapa komunitas ternak
 - n) Meningkatkan alokasi anggaran untuk sektor pertanian yang efektif dan tepat sasaran untuk meningkatkan pendapatan petani dan nelayan

2. Strategi Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan, dengan Arah Kebijakan Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan.
3. Strategi Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau.
 - b) Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
4. Strategi Peningkatan daya saing produk IKM, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana pengolahan produk
 - b) Peningkatan kualitas, kontinuitas produksi, dan sertifikasi produk
 - c) Peningkatan promosi dan pemasaran produk
 - d) Peningkatan kapasitas pelaku IKM
5. Strategi Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan sarana dan prasarana untuk sentra IKM
 - b) Peningkatan Kerjasama pengembangan sentra IKM
 - c) Pendampingan dan fasilitasi sentra IKM
6. Strategi Peningkatan kapasitas UMKM dan wirausaha, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia pelaku Koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan bisnis dan perdagangan digital
 - b) Fasilitasi penumbuhan *millenial enterpreuner* dan *Women enterpreuner*
 - c) Pemanfaatan teknologi informasi untuk pengembangan usaha, promosi dan pemasaran produk UMKM
 - d) Peningkatan nilai tambah dan jangkauan pemasaran produk UMKM
 - e) Pengembangan usaha dan diversifikasi produk UMKM
 - f) Peningkatan Kemitraan UMKM dengan pengusaha besar
 - g) Fasilitasi penerbitan sertifikat hak paten terhadap produk UMKM
 - h) Fasilitasi pelatihan berkelanjutan
7. Strategi dan arah kebijakan Urusan Sosial, antara lain yakni :
 - a) Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di dalam panti.
 - b) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar PMKS Lainnya di dalam panti.
 - c) Terpenuhinya peningkatan kapasitas SDM penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar PMKS lainnya di dalam panti.

- d) Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - e) Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersertifikasi.
 - f) Memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.
 - g) Termutakhirkannya data fakir miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
 - h) Meningkatnya persediaan Permakanan (Bantuan Logistik) Korban Bencana.
 - i) Penanganan masalah sosial dari berbagai sumber pendanaan secara terpadu
 - j) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi
 - k) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - l) Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dalam panti
 - m) Peningkatan layanan rehabilitasi social untuk PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
 - n) Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
 - o) Penguatan Skema Penanggulangan Bencana
8. Strategi dan arah kebijakan urusan Kesehatan, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - c) Meningkatkan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
 - d) Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata
 - e) Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - f) Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui
 - g) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan
 - h) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
 - i) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa
 - j) Meningkatkan keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin / kurang mampu
 - k) Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan non penerima bantuan iuran
 - l) Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi
 - m) Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik
 - n) Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik

9. Strategi dan arah kebijakan urusan Tenaga Kerja, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan Kualitas Pencari Kerja melalui Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan peningkatan lembaga produktivitas
 - b) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan
 - c) Perlindungan tenaga kerja dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan
 - d) Pengembangan hubungan industrial dan peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
10. Strategi dan arah kebijakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman dan urusan pertanahan, antara lain yakni :
- a) Mengurangi luasan kawasan kumuh.
 - b) Meningkatkan kualitas PSU permukiman.
 - c) Meningkatkan rumah layak huni
 - d) Meningkatkan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi dan korban bencana provinsi.
 - e) Menyusun database kawasan permukiman kumuh.
 - f) Menyusun database rumah tidak layak huni
 - g) Meningkatkan kemampuan aparatur dalam penyusunan rencana dan penetapan penatagunaan tanah.
 - h) Mendorong pelaksanaan penyusunan perencanaan dan penetapan penatagunaan tanah yang inklusif, seimbang dan terpadu.
 - i) Memfasilitasi Penanganan Masalah Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
 - j) Menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
 - k) Memfasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan
 - l) Memfasilitasi Penyelesaian dan Penetapan Tanah Ulayat
 - m) Memfasilitasi Pemberian Izin Lokasi
11. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
- a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan
 - c) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
 - d) Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - e) Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan
 - f) Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan
 - g) Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan

- h) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - i) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
12. Strategi dan arah kebijakan urusan Pekerjaan Umum, antara lain yakni :
- a) Pengurangan jalan yang belum terhubung antar daerah dan terisolir
 - b) Meningkatkan prasarana perhubungan menuju destinasi wisata dan pelabuhan
 - c) Meningkatkan kualitas dan kapasitas jalan
 - d) Meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi
 - e) Meningkatkan RTR yang berkekuatan hukum
 - f) Meningkatkan pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR
13. Strategi dan arah kebijakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan
 - b) Meningkatkan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
 - c) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - d) Meningkatkan tata kelola ketenagalistrikan yang aman andal dan akrab lingkungan
 - e) Meningkatkan pengelolaan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat
 - f) Meningkatkan pengawasan pemakaian air tanah pada Zona Konservasi
 - g) Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan energi terbarukan
 - h) Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi terutama di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan
 - i) Meningkatkan penatausahaan izin sektor energi terbarukan
 - j) Meningkatkan pelaksanaan konservasi energi
 - k) Meningkatkan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan
 - l) Meningkatkan aksesibilitas tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu
 - m) Meningkatkan pengembangan dan pengusahaan ketenagalistrikan
 - n) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan ketenagalistrikan
 - o) Meningkatkan penatausahaan izin ketenagalistrikan
 - p) Meningkatkan pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat
 - q) Meningkatkan penatausahaan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan serta pertambangan rakyat

- r) Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aspek konservasi pemanfaatan air tanah

14. Strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain yakni :

- a) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi Pemda, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG
- b) Meningkatkan pelatihan dan keterampilan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
- c) Meningkatkan kapasitas SDM perempuan bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- d) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- e) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan.
- f) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan.
- g) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan
- h) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat kualitas keluarga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga
- i) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan kualitas keluarga di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
- j) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- k) Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- l) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
- m) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- n) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan.
- o) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap anak.
- p) Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pembentukan dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

- q) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan khusus anak
 - r) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan perlindungan khusus anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
 - s) Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
 - t) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.
15. Strategi dan arah kebijakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Sub Bidang Kebencanaan, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam mitigasi bencana
 - b) Meningkatkan kualitas kelembagaan aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana
 - c) Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
 - d) Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana
 - e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam mitigasi bencana
 - f) Pengembangan nagari dan desa siaga bencana
 - g) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat
 - h) Penyediaan dan perluasan informasi kebencanaan
 - i) Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana
 - j) Pembangunan infrastruktur kebencanaan
 - k) Penanganan bencana banjir, longsor, gempa bumi yang berefek pada infrastruktur jalan
 - l) Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
 - m) Pemulihan daerah pasca bencana
16. Strategi dan arah kebijakan urusan Pendidikan, antara lain yakni :
- a) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - b) Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan
 - c) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 - d) Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal
 - e) Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan
 - f) Melaksanakan pembinaan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat

- g) Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK
- h) Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK
- i) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK
- j) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus
- k) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK
- l) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah pendidikan khusus (SLB)

Tabel 3.2
Target Pencapaian Indikator Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
1.1 Pada tahun 2030, mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari 1,25 dolar Amerika per hari.										
1.1.1* Tingkat kemiskinan ekstrim.										
	RPJMD - Tingkat Kemiskinan (%)	Indikator Makro	%	6,4	6,28	6,16	6,03	5,9	5,77	
1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	358,76	356,45	353,68	350,62	347,27	343,62	
1.2.2* Persentase laki-laki, perempuan dan anak- anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.										
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	358,76	356,45	353,68	350,62	347,27	343,62	
1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.										
1.3.1* Proporsi penduduk yang menerima program perlindungan sosial, menurut jenis kelamin, untuk kategori kelompok semua anak, pengangguran, lansia, penyandang difabilitas, ibu hamil/melahirkan, korban kecelakaan kerja, kelompok miskin dan rentan.										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	21,45	18,44	15,43	14	12,5	10,6	
	RPJMD - Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	IKD	%	52,87	53,8	54,72	55,65	56,57	57,5	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Lanjut usia yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	Dinas Pendidikan
	RPJMD - APK SLB	Indikator Program	%	52,87	53,8	54,72	55,65	56,57	57,5	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	34,4	35	37	38	39	40	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Pesentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Jumlah Anak yang difasilitasi perlindungan sosial (dalam pengangkatan anak)	Indikator Program	orang	25	25	25	25	25	25	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Atas (SMA)	Indikator Progul	persen	20	20	20	20	20	20	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Persentase/Jumlah siswa baru yang berasal dari keluarga tidak mampu yang lulus diterima > Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	Indikator Progul	persen	20	20	20	20	20	20	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah masyarakat/Lulusan SMA/SMK yang mendapatkan beasiswa S1/S2/S3	Indikator Progul	orang	401	401	401	401	401	401	Dinas Pendidikan
1.3.1.(a) Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.										
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,48	86,1	88,2	90,3	92,4	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	34,4	35	37	38	39	40	Dinas Kesehatan
1.3.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	37,61	41,95	46,29	50,63	59,31	61,92	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	10,69	11,26	11,83	12,41	12,98	13,56	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.										
1.4.1* Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.										
	RPJMD - Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indikator Makro	IPM	72,56	72,74	73,23	73,7	74,16	74,6	
	RPJMD - b.Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	
	RPJMD - c. Usia Harapan Hidup (Tahun)	Indikator Makro	Tahun	69,62	69,80	69,98	70,17	70,35	70,53	
	RPJMD - Indeks Pembangunan manusia (IPM)	IKU	Nilai	72,56	72,74	73,23	73,7	74,16	74,6	
	RPJMD - Angka Harapan Hidup (AHH)	IKU	Tahun	69,62	69,8	69,98	70,17	70,35	70,53	
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	80,04	82	84	86	88	90	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	81	82	84	86	88	90	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase Puskesmas yang terakreditasi (%)	IKD	%	97,4	97,8	98,2	98,5	98,7	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	83	86	89	92	95	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	73,92	75	77	79	81	82	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	15	17	19	21	23	25	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	54	56	58	60	62	64	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	Dinas Perhubungan
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	99,91	100	100	100	100	100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	68,7	73,7	79,9	87	95	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	73,92	75	77	79	81	82	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD – Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	55	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	15	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Terminal Provinsi yang tersedia > Jumlah Terminal Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	-	-	1	2	3	5	Dinas Perhubungan
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	lokasi	10	12	15	16	18	19	Dinas Pariwisata
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	lokasi	10	12	15	16	18	19	Dinas Pariwisata
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Destinasi Wisata > Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	lokasi	-	-	19	19	19	19	Dinas Pariwisata
1.4.2* Proporsi dari penduduk dewasa yang mendapatkan hak atas tanah yang didasari oleh dokumen hukum dan yang memiliki hak atas tanah berdasarkan jenis kelamin dan tipe kepemilikan.										
	RPJMD - Persentase permasalahan pertanahan yang ditangani (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	RPJMD - Persentase Luas Penetapan Tanah Ulayat yang dipetakan/didaftarkan dalam buku tanah	Indikator Program	%	75	80	85	90	95	95	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.										
1.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)									
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	50	53	56	59	62	65	Satuan Polisi Pamong Praja
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Korban Bencana Atau Akibat Relokasi Program	Indikator Program	%	0	3	3	3	3	3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
1.5.2* Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP.										
1.5.3* Rencana dan implementasi strategi nasional pengurangan risiko bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.5.4* Proporsi pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi daerah pengurangan risiko bencana yang selaras dengan strategi nasional pengurangan risiko bencana										
	RPJMD - Indeks Ketahanan Daerah (Indeks)	IKU	Indeks	0,48	0,49	0,5	0,51	0,52	0,53	
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase penanganan pra bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	70	71	72	73	74	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	2	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.										
1.a.1* Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.										
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	100,79	100,99	100,19	101,4	101,6	101,8	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,95	103,47	103,98	104,5	105,03	105,55	
	RPJMD - Pendapatan Peternak (Rp. Jt)	IKU	Rp. Juta	45592	47872	50265	52779	55418	58199	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	358	368	379	390	401	413	
	RPJMD - Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor koperasi (%)	IKU	%	1,94	2,14	2,18	2,23	2,28	2,33	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	1,7	2,4	3,1	3,8	4,5	5,2	
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	97633	14961	17888	20176	23053	23992	
	RPJMD - Kontribusi Ekonomi Digital (%)	IKU	%	6,44	6,54	6,7	7,1	7,25	7,65	
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	43,47	8,6	10,43	13,04	14,78	9,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	0,6	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Jumlah Badan Usaha Milik Desa Klasifikasi Maju	IKD	BUMD	41	51	61	71	81	91	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Jumlah nagari/desa dan kelurahan cepat berkembang	IKD	Nagari/Desa	381	410	450	500	550	600	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	RPJMD - Persentase Koperasi yang berkualitas	IKD	%	16,43	17,94	20,49	24,39	29,21	35,01	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	1,9	2	3	3,7	4,2	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	RPJMD - Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial (%)	IKD	%	20	20	20	20	20	20	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	60	80	100	120	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	39403	41373	43263	45363	47673	50193	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Indikator Program	hektar	50000	50000	50000	50000	50000	50000	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah sentra industri yang diberi perkuatan	Indikator Program	Sentra	15	20	20	25	25	30	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	39403	41373	43263	45363	47673	50193	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas	Indikator Progul	>= persen	10	10	10	10	10	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD									
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	170	470	528	528	528	528	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	2105	5872	6742	6797	6852	6907	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	500	1500	2000	2000	2000	2000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	300	300	300	300	300	300	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	4.532	4.759	4.997	5.246	5.509	5.784	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	113	500	500	500	500	500	Dinas Kehutanan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1.855	2.000	2.200	2.300	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	412	412	412	412	412	412	Dinas Sosial
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	200	200	240	280	320	360	Dinas Kebudayaan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	150	350	400	450	500	550	Dinas Kelautan Dan Perikanan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang	765	675	700	725	750	775	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	-	200	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	266	112	112	112	112	112	Dinas Pangan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang	266	112	112	112	112	112	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Progul - Persentase peningkatan usaha pasca panen pengolahan hasil > Luas kawasan hutan yang dikelola kelompok masyarakat (Ha)	Indikator Progul	Ha	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinas Kehutanan
1.a.2* Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.										
1.b Membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.										
1.b.1 Proporsi pengeluaran rutin dan pembangunan pada sektor-sektor yang memberi manfaat pada kelompok perempuan, kelompok miskin dan rentan.										



Tujuan 2: TANPA KELAPARAN

3.2 Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Upaya untuk mencapai **Tujuan 2 TPB/SDGs, yakni Tanpa Kelaparan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok, dengan Arah Kebijakan:
 - a) Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau.
 - b) Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
2. Strategi Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan Arah kebijakan Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat.
3. Strategi Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan
 - b) Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal
4. Strategi Pemberdayaan daerah rentan pangan, dengan Arah Kebijakan Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan.
5. Strategi Peningkatan keamanan pangan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen;
 - b) Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
 - c) Pengawasan peredaran sarana pertanian
 - d) Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan
 - e) Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan
6. Strategi dan arah kebijakan umum urusan Pangan, antara lain yakni :

- a) Revitalisasi dan penyediaan RMU mobile
 - b) Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
 - c) Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal
 - d) Pemberdayaan daerah rentan pangan
 - e) Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan
 - f) Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan
 - g) Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal
 - h) Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
 - i) Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
 - j) Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok
 - k) Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
 - l) Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau
7. Strategi dan arah kebijakan umum urusan Kesehatan, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - c) Meningkatkan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
 - d) Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata
 - e) Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - f) Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui
 - g) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan
 - h) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
 - i) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa
 - j) Meningkatkan keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin / kurang mampu
 - k) Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan non penerima bantuan iuran
 - l) Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan publik
 - m) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
 - n) Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan

- o) Peningkatan perbaikan gizi masyarakat
 - p) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia
 - q) Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dibandingkan dengan upaya kuratif
 - r) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan
 - s) Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dengan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat
 - t) Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan
 - u) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan Tuberkulosis
 - v) Peningkatan upaya Pendeteksian dini penyakit tidak menular
 - w) Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap kejadian luar biasa dan tanggapdarurat bencana
 - x) Peningkatan efektifitas pembiayaan kesehatan
 - y) Menurunkan ketidaktepatan sasaran pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin
 - z) Peningkatan kepesertaan mandiri dan pekerja melalui Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat program JKN
8. Strategi dan arah kebijakan umum urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain yakni :
- a) Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
 - b) Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan
 - c) Meningkatkan akses permodalan
 - d) Pengembangan system value chain
 - e) Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan lingkungan
 - f) Meningkatkan pemakaian benih bermutu
 - g) Meningkatkan akses permodalan
 - h) Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan melalui 1000 rumpon dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan
 - i) Pengembangan budidaya perikanan payau (udang vanamae) dan komoditas perikanan lainnya
 - j) Peningkatan pengawasan Agro input
 - k) Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas perikanan
 - l) Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian ,perkebunan dan Perikanan
 - m) Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan

- n) Rehabilitasi Hutan dan lahan
 - o) Pengembangan ekosistem esensial dan kawasan konservasi
 - p) Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim
9. Strategi dan arah kebijakan urusan pertanian sub bidang Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura, antara lain yakni :
- a) Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b) Meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah yang baik
 - c) Meningkatkan penyediaan dan pemakaian benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
 - d) Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - e) Optimalisasi pemanfaatan lahan serta rehabilitasi jaringan irigasi
 - f) Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) 168
 - g) Meningkatkan akses permodalan dalam berusaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha serta kelembagaan tani yang ada
 - h) Meningkatkan Kapasitas dan pemberdayaan SDM Petugas serta Petani
 - i) Pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi
 - j) Peningkatan upaya minimalisasi resiko kerugian usaha tani
 - k) Peningkatan nilai tambah produk hasil perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura
 - l) Pengembangan pertanian organik dan berwawasan lingkungan
 - m) Mendorong pengelolaan dan pembentukan BUMD profesional bidang Pertanian
 - n) Meningkatkan penyediaan dan benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
 - o) Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
 - p) Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - q) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian/ peternakan
 - r) Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - s) Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - t) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas
10. Strategi dan arah kebijakan urusan pertanian sub bidang Peternakan, antara lain yakni :
- a) Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor, peternakan
 - b) Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna
 - c) Pengembangan *system value chain*
 - d) Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan

- e) Mempertahankan status daerah bebas Hog Cholera dan Bru cellosis
- f) Menurunkan kasus Penyakit Hewat Menular Strategis dan Zoonosis (PHMSZ)
- g) Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat
- h) Peningkatan nilai tambah produksi hasil peternakan
- i) Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk peternakan
- j) Mendorong tumbuh petani milenial
- k) Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian
- l) Meningkatkan akses permodalan
- m) Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
- n) Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas peternakan
- o) Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
- p) Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup
- q) Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan dan peternakan
- r) Penguatan otoritas veteriner di daerah (Provinsi, Kab/ Kota dan Puskesmas)
- s) Meningkatkan surveilans dan Monitoring Penyakit Hewan
- t) Meningkatkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular
- u) Mengembangkan jejaring dan sistem informasi kesehatan hewan (Sikhnas)
- v) Penguatan Laboratorium Keswan dan Kesmavet
- w) Meningkatkan Pengawasan Peredaran Obat Hewan, Sarana, dan Bahan Medik
- x) Meningkatkan Pelayanan kesehatan hewan di Unit-Unit Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet
- y) Membangun sistem kompetensi profesi medik dan paramedik veteriner
- z) Meningkatkan Kesiagaan Darurat Penyakit Eksotik melalui program kesiagaan darurat veteriner Indonesia (KIATVETINDO)
- aa) Meningkatkan kepedulian dan partisipasi aktif masyarakat terhadap kesehatan hewan dan biosekuriti
- bb) Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular

11. Strategi dan arah kebijakan urusan Kehutanan, antara lain yakni :

- a) Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm
- b) Peningkatan Kinerja perusahaan dan penatausahaan hasil hutan
- c) Percepatan Proses Pemantapan Kawasan Hutan
- d) Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

- e) Penyediaan bibit berkualitas dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
- f) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
- g) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- h) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
- i) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
- j) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan
- k) Pengelolaan Hutan (KPH)
- l) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
- m) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
- n) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- o) Perbenihan Tanaman Hutan
- p) Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

Tabel 3.3
Target Pencapaian Indikator Tujuan 2 Tanpa Kelaparan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.										
2.1.1* Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	21,45	18,44	15,43	14	12,5	10,6	
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	78,64	79,13	80,21	81,6	82,05	83,22	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86	92	94	96	98	100	Dinas Pangan
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	820798	833.110	845.607	858.291	871.165	884.233	Dinas Pangan
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	82	82,5	83	84	84,5	85	Dinas Pangan
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	21	22	24	27	28	30	Dinas Pangan
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton	1.346.063	1.542.909	1.573.767	1.605.243	1.637.347	1.670.094	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton	921.514	978.062	1.012.295	1.048.737	1.088.589	1.131.044	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	650.000	750.000	850.000	1.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi padi	Indikator Progul	ton	1.346.063	1.542.909	1.573.767	1.605.243	1.637.347	1.670.094	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah produksi jagung	Indikator Progul	ton	921.514	978.062	1.012.295	1.048.737	1.088.589	1.131.044	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	650.000	750.000	850.000	1.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2.1.2* Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.										
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	78,64	79,13	80,21	81,6	82,05	83,22	
	RPJMD - Persentase cadangan pangan (%)	IKD	%	86	92	94	96	98	100	Dinas Pangan
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	820798	833.110	845.607	858.291	871.165	884.233	Dinas Pangan
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	82	82,5	83	84	84,5	85	Dinas Pangan
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	21	22	24	27	28	30	Dinas Pangan
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.										
2.2.1* Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/ balita.										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	21,45	18,44	15,43	14	12,5	10,6	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
2.2.2* Prevalensi wasting (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.										
	RPJMD - Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	IKU	%	21,45	18,44	15,43	14	12,5	10,6	
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
2.2.2.(a) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH).										
	RPJMD - Indeks Ketahanan Pangan	IKU	Indeks	78,64	79,13	80,21	81,6	82,05	83,22	
	RPJMD - Ketersediaan pangan utama (ton)	IKD	ton	820798	833.110	845.607	858.291	871.165	884.233	Dinas Pangan
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan (skor)	IKD	Skor	82	82,5	83	84	84,5	85	Dinas Pangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Skor Pola Pangan Harapan masyarakat Sumatera Barat	Indikator Program	%	82	82,5	83	84	84,5	85	Dinas Pangan
	RPJMD - Persentase penanganan daerah rentan rawan pangan	Indikator Program	%	21	22	24	27	28	30	Dinas Pangan
	RPJMD - Tingkat konsumsi ikan	Indikator Program	Kg/kap/th	39,27	40	40,5	41,6	42,4	43,5	Dinas Kelautan Dan Perikanan
2.2.3* Prevalensi anemia pada ibu hamil usia 15-49 tahun.										
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
2.3 Pada tahun 2030, menggandakan produktivitas pertanian dan pendapatan produsen makanan skala kecil, khususnya perempuan, masyarakat penduduk asli, keluarga petani, penggembala dan nelayan, termasuk melalui akses yang aman dan sama terhadap lahan, sumber daya produktif, dan input lainnya, pengetahuan, jasa keuangan, pasar, dan peluang nilai tambah, dan pekerjaan nonpertanian.										
2.3.1* Volume produksi per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan										
2.3.1 (a) Nilai tambah pertanian per tenaga kerja menurut kelas usaha tani tanaman/ peternakan/ perikanan/ kehutanan										
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	100,79	100,99	100,19	101,4	101,6	101,8	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,95	103,47	103,98	104,5	105,03	105,55	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
2.3.2* Rata-rata pendapatan produsen pertanian skala kecil menurut subsektor.										
	RPJMD - Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Nilai Tukar Petani (NTP)	IKU	Nilai	100,79	100,99	100,19	101,4	101,6	101,8	
	RPJMD - Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP)	IKU	Nilai	102,95	103,47	103,98	104,5	105,03	105,55	
	RPJMD - Pendapatan petani tanaman pangan dan hortikultura (%)	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
	RPJMD - Peningkatan Pendapatan Petani Hutan	IKU	%	5	5	5	5	5	5	
2.4 Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan Yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.										
02.04.01 Proporsi areal pertanian produktif dan berkelanjutan.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
2.4.1(a) Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.										
2.5 Pada tahun 2020, mengelola keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan ternak dan peliharaan dan spesies liar terkait, termasuk melalui bank benih dan tanaman yang dikelola dan dianekaragamkan dengan baik di tingkat nasional, regional dan internasional, serta meningkatkan akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan merata, hasil dari pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional terkait, sebagaimana yang disepakati secara internasional.										
2.5.1* Jumlah sumber daya genetik tanaman dan hewan untuk pangan dan pertanian yang disimpan di fasilitas konservasi, baik jangka menengah ataupun jangka panjang.										
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa Sawit yang diadakan	Indikator Progul	batang	35.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kakao yang diadakan	Indikator Progul	batang	33.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kopi yang diadakan	Indikator Progul	batang	473.000	300.000	400.000	400.000	300.000	300.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Karet yang diadakan	Indikator Progul	batang	23.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kelapa yang diadakan	Indikator Progul	batang	2.100	200.000	400.000	400.000	100.000	100.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan,	Indikator Progul	batang	-	37.500	231.250	231.250	100.000	100.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Gambir yang diadakan									
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Padi yang diadakan	Indikator Progul	ton	5,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jagung yang diadakan	Indikator Progul	ton	6,18	120	120	120	120	120	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cabe yang diadakan	Indikator Progul	gram	3.450	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Bawang Merah yang diadakan	Indikator Progul	kg	28.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Manggis yang diadakan	Indikator Progul	batang	36.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jeruk yang diadakan	Indikator Progul	batang	17.200	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Alpukat yang diadakan	Indikator Progul	batang	10.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Pala yang diadakan	Indikator Progul	batang	7.155	15.000	20.000	25.000	30.000	30.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Kayu Manis yang diadakan	Indikator Progul	batang	-	44.500	55.000	55.000	60.000	60.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Cengkeh yang diadakan	Indikator Progul	batang	86.400	30.480	50.000	60.000	65.000	65.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Tembakau yang diadakan	Indikator Progul	batang	-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Jahe yang diadakan	Indikator Progul	kg	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura >	Indikator Progul	kg	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Jumlah benih/bibit Kunyit yang diadakan									
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Sub urusan Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura > Jumlah benih/bibit Lengkuas/Laos yang diadakan	Indikator Progul	kg	-	-?	2.000	2.000	2.000	2.000	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah benih/bibit bermutu pada sektor pertanian yang disediakan > Urusan Kelautan dan Perikanan > Bibit rumput laut	Indikator Progul	kg	-	1.500	1.800	2.000	2.300	2.500	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	650.000	750.000	850.000	1.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi komoditas ternak unggas	Indikator Progul	ekor	192.290	500.000	650.000	750.000	850.000	1.000.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah produksi kambing	Indikator Progul	ekor	1.360	3.000	5.000	7.000	9.000	10.000	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
2.5.2* Proporsi ras ternak lokal yang berisiko punah.										
2.a Meningkatkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang kuat, dalam infrastruktur pedesaan, layanan kajian dan perluasan pertanian, pengembangan teknologi dan bank gen untuk tanaman dan ternak, untuk meningkatkan kapasitas produktif pertanian di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang.										
2.a.1* Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.										
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga,	Indikator Progul	>= persen	10	10	10	10	10	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD									
2.a.2* Total bantuan pembangunan (ODA) dan bantuan lain untuk sektor pertanian.										
	Progul - Persentase Alokasi anggaran sektor Pertanian (Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Pangan, Dinas Kelutan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Sumber Daya Alam dan Bina Konstruksi dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang) dari total APBD	Indikator Progul	>= persen	10	10	10	10	10	10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2.b Memperbaiki dan mencegah pembatasan dan distorsi dalam pasar pertanian dunia, termasuk melalui penghapusan secara bersamaan segala bentuk subsidi ekspor pertanian dan semua tindakan ekspor dengan efek setara, sesuai dengan amanat the Doha Development Round.										
2.b.1* Subsidi ekspor pertanian.										
2.c Mengadopsi langkah- langkah untuk menjamin berfungsinya pasar komoditas pangan serta turunannya dengan tepat, dan memfasilitasi pada waktu yang tepat akses terhadap informasi pasar, termasuk informasi cadangan pangan, untuk membantu membatasi volatilitas harga pangan yang ekstrim.										
2.c.1* Indikator anomali harga pangan.										

Tujuan 3: KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA

3.3 Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Upaya untuk mencapai **Tujuan 3 TPB/SDGs, yakni Kehidupan Sehat dan Sejahtera**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sectoral sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dalam pengujian, pelacakan, isolasi dan pengobatan untuk penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19, dengan Arah Kebijakan Meningkatkan kemampuan SDM dan fasilitas dan laboratorium kesehatan dalam melakukan pencegahan, pengendalian dan penanganan COVID-19.
2. Strategi Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat, dengan Arah Kebijakan:
 - a) Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas layanan kesehatan
 - b) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan
 - c) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi
 - d) Penguatan dan pengembangan pelaksanaan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit)
 - e) Perluasan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)
 - f) Peningkatan cakupan ASI eksklusif
 - g) Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil
 - h) Penguatan puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk dan wasting
 - i) Penguatan sistem surveilans gizi
 - j) Revitalisasi posyandu, posbindu, UKS, dan UKBM lainnya untuk edukasi kesehatan, skrining, dan deteksi dini kasus
 - k) Peningkatan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
 - l) Pemanfaatan inovasi teknologi dalam pelayanan kesehatan termasuk laboratorium kesehatan
 - m) Penguatan kemampuan RS Khusus
 - n) Penguatan pelayanan kesehatan primer

- o) Perluasan cakupan deteksi dini PM dan PTM
 - p) Penguatan sanitasi total berbasis masyarakat
 - q) Peningkatan akses air bersih dan perilaku higienis
 - r) Peningkatan pelayanan dasar anak terlantar, disabilitas terlantar dan lanjut usia terlantar di dalam panti
 - s) Penguatan sistem laboratorium kesehatan daerah
 - t) Penguatan *reporting* dan *real time surveillance* untuk penyakit berpotensi wabah dan penyakit baru muncul (*new emerging diseases*)
 - u) Membangun sistem kewaspadaan dini.
 - v) Meningkatkan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan untuk respon cepat
 - w) Revitalisasi peralatan kesehatan rumah sakit milik provinsi
 - x) Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung adaptasi kebiasaan baru
3. Strategi Peningkatan kapasitas SDM kesehatan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) perencanaan kebutuhan sumberdaya manusia kesehatan untuk upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan provinsi
 - b) Pengembangan Mutu dan kompetensi teknis sumberdaya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi
 4. Strategi Penyediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman, dengan arah kebijakan:
 - a) Memastikan ketersediaan obat esensial dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan,
 - b) Menjalankan program promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat, terutama untuk meningkatkan penggunaan obat rasional.
 - c) Memastikan ketersediaan alat kesehatan dan makanan minum
 5. Strategi Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan pribadi, keluarga dan lingkungan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Mendorong kegiatan Germas, kampanye makan ikan, makan buah dan sayur, serta kampanye diet seimbang (isi piringku).
 - b) Meningkatkan metode/cara promosi kesehatan, melalui TV *spot*, *leaflets*, *booklet*, media sosial, dan sebagainya
 - c) Pengembangan kawasan sehat antara lain kabupaten/kota sehat, pasar sehat, UKS dan lingkungan kerja sehat.
 - d) Promosi pembudayaan hidup sehat
 - e) Mendorong peningkatan pembiayaan kesehatan dari komponen APBD, khususnya terkait Upaya Kesehatan Masyarakat
 - f) Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melakukan aktifitas kebugaran
 6. Strategi Pemenuhan Standar pelayanan minimal bidang kesehatan, dengan Arah Kebijakan :

- a) Memprioritaskan Pemenuhan SPM bidang kesehatan
 - b) Optimalisasi layanan kesehatan di RSUD dan Rumah Sakit Khusus Pemprov
7. Strategi dan arah kebijakan umum urusan Kesehatan, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya kesehatan serta kefarmasian dan alat kesehatan
 - b) Meningkatkan kualitas pelayanan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - c) Meningkatkan Rumah Sakit daerah yang terakreditasi
 - d) Meningkatkan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
 - e) Meningkatkan keterpaduan dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih merata
 - f) Meningkatkan akses layanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas
 - g) Meningkatkan penanganan masalah gizi kurang dan gizi buruk pada bayi, anak balita, ibu hamil dan menyusui
 - h) Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam peningkatan pembiayaan promotif dan preventif untuk layanan kesehatan
 - i) Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
 - j) Meningkatkan pengendalian penyakit menular dan tidak menular dan kesiapsiagaan tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa
 - k) Meningkatkan keberlanjutan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin / kurang mampu
 - l) Meningkatkan kepesertaan jaminan kesehatan non penerima bantuan iuran
 - m) Peningkatan jumlah dan kualitas sumberdaya kesehatan yang memiliki kompetensi dan terstandarisasi
 - n) Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemeratan dan kualitas farmasi dan alat kesehatan
 - o) Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak
 - p) Peningkatan cakupan akses, keterjangkauan dan mutu pelayanan kesehatan
 - q) Peningkatan perbaikan gizi masyarakat
 - r) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan gizi dengan fokus utama pada 1000 hari kehidupan manusia
 - s) Peningkatan layanan kesehatan dengan lebih menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif dibandingkan dengan upaya kuratif
 - t) Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan upaya promosi kesehatan
 - u) Penguatan gerakan masyarakat, lembaga pemerintah dengan swasta dalam peningkatan upaya kesehatan masyarakat
 - v) Peningkatan pemerataan dan kualitas kesehatan lingkungan
 - w) Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV dan Tuberkulosis

- x) Peningkatan kualitas pelayanan dan rehabilitasi gangguan kesehatan kejiwaan
 - y) Peningkatan upaya Pendeteksian dini penyakit tidak menular
 - z) Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon terhadap kejadian luar biasa dan tanggapdarurat bencana
 - aa) Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang manfaat program JKN
8. Strategi dan arah kebijakan urusan Perhubungan, antara lain yakni :
- a) Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermodal
 - b) Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik
 - c) Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil
 - d) Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan
 - e) Dukungan keterpaduan transportasi antar moda (bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api)
 - f) Penataan sistem perijinan transportasi
 - g) Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B
 - h) Pengembangan jaringan pelayanan angkutan
9. Strategi dan arah kebijakan urusan Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain :
- a) Peningkatan review, koordinasi, dan harmonisasi setiap kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
 - b) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kualitas hidup keluarga, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak diberbagai bidang pembangunan
 - c) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
 - d) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan
 - e) Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak

- f) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- g) Peningkatan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak
- h) Penguatan koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja dan lembaga jejaring.
- i) Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
- j) Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Tabel 3.4
Target Pencapaian Indikator Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.										
3.1.1* Angka Kematian Ibu (AKI).										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	73,8	74,8	76	78	80	82	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	78,6	79,6	81	83	85	87	Dinas Kesehatan
3.1.2* Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya (a) ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih; (b) di fasilitas kesehatan.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	73,8	74,8	76	78	80	82	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	78,6	79,6	81	83	85	87	Dinas Kesehatan
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.										
3.2.1* (a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	73,8	74,8	76	78	80	82	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	78,6	79,6	81	83	85	87	Dinas Kesehatan
3.2.2* Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Cakupan Pelayanan Ibu Hamil (K4)	Indikator Program	%	73,8	74,8	76	78	80	82	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Kunjungan Neonatal Lengkap (KNL) Sesuai Standar	Indikator Program	%	78,6	79,6	81	83	85	87	Dinas Kesehatan
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.										
3.3.1* Jumlah infeksi baru HIV per 1000 penduduk tidak terinfeksi.										
3.3.2* Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.										
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	252	231	211	190	190	190	Dinas Kesehatan
3.3.3* Kejadian Malaria per 1000 orang.										
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupat en/kota	17	17	18	18	18	19	Dinas Kesehatan
3.3.3.[a] Jumlah kabupaten/ kota yang mencapai eliminasi malaria.										
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupat en/kota	17	17	18	18	18	19	Dinas Kesehatan
3.3.4* Insiden Hepatitis B per 100.000 penduduk.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5* Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (a) Filariasis dan (b) Kusta.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5.[a] Jumlah kabupaten/ kota dengan eliminasi kusta.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.3.5.[b] Jumlah kabupaten/ kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi.										
	RPJMD - Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.4 Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.										
3.4.1.(a) Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
3.4.1.(b) Prevalensi tekanan darah tinggi.										
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
3.4.1.(c) Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.										
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan gernas hidup sehat	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
03.04.02 Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.										
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.										
03.05.01 Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat.										
3.5.1(a) Jumlah penyalahguna napza yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis										
3.5.1(b) Jumlah yang mengakses layanan pasca rehabilitasi.										
3.5.2* Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ? 15 tahun dalam satu tahun terakhir.										
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.										
03.06.01 Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.										
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.										
3.7.1* Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) yang memiliki kebutuhan keluarga berencana terpenuhi menurut metode kontrasepsi modern.										
	RPJMD - Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	IKD	%	62,18	62,58	63	63,41	63,9 2	64,3 2	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
3.7.2* Angka Kelahiran Remaja (Umur 10-14 Tahun; Umur 15-19 Tahun) Per 1000 Perempuan Di Kelompok Umur Yang Sama.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	IKD	%	19,6	19,1	18,6	18,1	17,6	17,1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
3.7.2.[a] Total Fertility Rate (TFR).										
	RPJMD - Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (indeks)	IKD	Indeks	2,73	2,7	2,67	2,64	2,61	2,58	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.										
3.8.1* Cakupan pelayanan kesehatan esensial.										
	RPJMD - Persentase Persalinan Sesuai Standar di Fasyankes (%)	IKD	%	77,3	78,5	80	82	84	86	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) (%)	IKD	%	14,5	13	11,5	10	8,5	7	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	83	86	89	92	95	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,48	86,1	88,2	90,3	92,4	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	Indikator Program	Per 100.000	252	231	211	190	190	190	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria	Indikator Program	kabupaten/kota	17	17	18	18	18	19	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	34,4	35	37	38	39	40	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	Dinas Kesehatan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Indikator Program	Orang	652	420	480	530	580	630	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	68,7	73,7	79,9	87	95	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan kegiatan KIE untuk peningkatan PHBS di Kab kota	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Jumlah kab/kota yang menerapkan kebijakan germas hidup sehat	Indikator Program	kabupat en/kota	5	8	11	14	17	19	Dinas Kesehatan
3.8.1.[a Unmet Need Pelayanan Kesehatan.										
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	Dinas Perhubungan
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,48	86,1	88,2	90,3	92,4	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	34,4	35	37	38	39	40	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase Puskesmas dengan 9 jenis nakes sesuai standar	Indikator Program	%	68,7	73,7	79,9	87	95	100	Dinas Kesehatan
3.8.2* Proporsi populasi dengan pengeluaran rumah tangga yang besar untuk kesehatan sebagai bagian dari total pengeluaran rumah tangga atau pendapatan.										
3.8.2.a Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).										
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang mempunyai jaminan kesehatan (%)	IKD	%	82,48	86,1	88,2	90,3	92,4	95	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Persentase cakupan kepeseretaan Jaminan Kesehatan Nasional untuk PBI JK daerah	Indikator Program	%	34,4	35	37	38	39	40	Dinas Kesehatan
3.a Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.										
	RPJMD - Persentase kabupaten/kota yang melakukan pencegahan perokok usia 10- 18 tahun	Indikator Program	%	9	8,9	8,8	8,7	8,6	8,5	Dinas Kesehatan
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Publik Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek- Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.										
3.b.1* Proporsi target populasi yang telah memperoleh vaksin program nasional.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	IKD	%	70	75	80	85	90	95	Dinas Kesehatan
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Pertama	Indikator Progul	persen	70	80	90	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Progul - Persentase sasaran vaksinasi Kedua	Indikator Progul	persen	60	70	85	100	100	100	Dinas Kesehatan
	Progul - Persentase masyarakat yang telah divaksin menuju Herd Immunity	Indikator Progul	persen	70	80	90	100	100	100	Dinas Kesehatan
3.b.2* Total Official Development Assistant (ODA) untuk penelitian medis dan sektor kesehatan dasar.										
3.b.3* Proporsi fasilitas kesehatan dengan paket obat essensial yang tersedia dan terjangkau secara berkelanjutan.										
	RPJMD - Persentase Kab/Kota dengan Ketersediaan Obat dan vaksin essensial	Indikator Program	%	90	92	94	96	98	100	Dinas Kesehatan
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.										
3.c.1* Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.										

Tujuan 4: PENDIDIKAN BERKUALITAS

3.4 Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Upaya untuk mencapai **Tujuan 4 TPB/SDGs, yakni Pendidikan Berkualitas**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan, dengan Arah kebijakan:
 - a) Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan
 - b) Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen
2. Strategi Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK
 - b) Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK
 - c) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK
 - d) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus
 - e) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK
 - f) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah pendidikan khusus (SLB).
 - g) Pembangunan sekolah baru di zona perbatasan
 - h) Revitalisasi SMK sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja Penguatan karakter melalui pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa.
 - i) Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan terutama yang berada pada daerah 3T secara bertahap.
 - j) Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri
3. Strategi Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau di sekolah
 - b) Mendorong Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus

4. Strategi peningkatan Pemetaan dan Penataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Melaksanakan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota
 - b) Melaksanakan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota
 - c) Peningkatan kualitas kompetensi guru
5. Strategi Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - b) Melaksanakan pembinaan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
6. Strategi Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra, dengan Arah Kebijakan Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah.
7. Strategi dan arah kebijakan urusan Pendidikan, antara lain sebagai berikut yakni :
 - a) Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan
 - b) Optimalisasi pengelolaan pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan
 - c) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan
 - d) Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal
 - e) Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra
 - f) Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan
 - g) Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - h) Melaksanakan pembinaan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
 - i) Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK
 - j) Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK
 - k) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK
 - l) Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus
 - m) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK
 - n) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah pendidikan khusus (SLB)
8. Strategi dan arah kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi

- c) Meningkatkan penyebarluasan informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
 - d) Meningkatkan pelayanan penyebaran informasi dan komunikasi publik pendidikan inklusif
 - e) Pembangunan sistem penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah Daerah
9. Strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain yakni :
- a) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
 - c) Meningkatkan penguatan organisasi perempuan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
 - d) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di OPD provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
 - e) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD Provinsi dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
 - f) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
 - g) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan.
 - h) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan.
 - i) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan
 - j) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan Organisasi
 - k) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kualitas keluarga sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
 - l) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran kualitas keluarga pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- m) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat kualitas keluarga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga
- n) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan kualitas keluarga di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
- o) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- p) Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- q) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
- Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
- r) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi
- s) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- t) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan.
- u) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap anak.
- v) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran data gender dan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- w) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan data gender dan anak
- x) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak.
- y) Melakukan pelaksanaan sistem data gender dan anak.
- z) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran perlindungan khusus anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- aa) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan khusus anak
- bb) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.

- cc) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kualitas hidup keluarga, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak diberbagai bidang pembangunan
- dd) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- ee) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan
- ff) Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- gg) Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- hh) Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
- ii) Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Tabel 3.5
Target Pencapaian Indikator Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.										
04.01.01 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/ kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										
4.1.1.(a) Proporsi anak-anak dan remaja di: (1) kelas 5 (b) kelas 8, dan (c) usia 15 tahun yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.										
4.1.2* Tingkat penyelesaian pendidikan jenjang SD/ sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/sederajat.										
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	31,27	32,77	34,27	35,77	37,27	38,77	Dinas Pendidikan
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	Dinas Pendidikan
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72	Dinas Pendidikan
4.1.2.[a] Angka anak tidak sekolah jenjang PAUD, SD/sederajat, SMP/sederajat, dan SMA/ sederajat.										
	RPJMD - Rata-rata lama sekolah	IKU	Tahun	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/SMLB/Sederajat	IKD	%	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA	IKD	%	50,88	52,38	53,88	55,38	56,88	58,38	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK	IKD	%	31,27	32,77	34,27	35,77	37,27	38,77	Dinas Pendidikan
	RPJMD - APK Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	91,7	93,22	94,7	96,2	97,7	99,2	Dinas Pendidikan
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72	Dinas Pendidikan
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra- sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
4.2.1* Proporsi anak usia 24-59 bulan yang berkembang dengan baik dalam bidang kesehatan, pembelajaran, dan psikososial, menurut jenis kelamin.										
4.2.2* Tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang teroganisir (satu tahun sebelum usia sekolah dasar), menurut jenis kelamin.										
4.3 Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.										
4.3.1* Tingkat partisipasi remaja dan dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non formal dalam 12 bulan terakhir, menurut jenis kelamin.										
	RPJMD - Jumlah enterpreneur baru tercipta (orang)	IKU	Orang	97.633	14.961	17.888	20.176	23.053	23.992	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	1,9	2	3	3,7	4,2	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	1,9	2	3	3,5	4,2	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemuda dan Olahraga	Indikator Progul	orang	170	470	528	528	528	528	Dinas Pemuda Dan Olahraga
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Tenaga Kerja	Indikator Progul	orang	2105	5872	6742	6797	6852	6907	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Koperasi dan UMKM	Indikator Progul	orang	500	1500	2000	2000	2000	2000	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Perkebunan, Tanaman pangan dan Hortikultura)	Indikator Progul	orang	300	300	300	300	300	300	Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Holtikultura
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pertanian (sub urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan)	Indikator Progul	orang	4.532	4.759	4.997	5.246	5.509	5.784	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru urusan Kehutanan	Indikator Progul	orang	113	500	500	500	500	500	Dinas Kehutanan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Indikator Progul	orang	1.040	1.950	2.220	2.664	3.197	3.836	Dinas Pariwisata
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1.855	2.000	2.200	2.300	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)									
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Sosial (orang)	Indikator Progul	Orang	412	412	412	412	412	412	Dinas Sosial
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kebudayaan	Indikator Progul	orang	200	200	240	280	320	360	Dinas Kebudayaan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Kelautan dan perikanan	Indikator Progul	orang	150	350	400	450	500	550	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indikator Progul	orang	765	675	700	725	750	775	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Penanaman Modal	Indikator Progul	orang	-	200	100	100	100	100	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta urusan Pangan	Indikator Progul	orang	266	112	112	112	112	112	Dinas Pangan
	Progul - Jumlah enterpreneur baru tercipta > Jumlah enterpreneur baru tercipta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indikator Progul	orang	266	112	112	112	112	112	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
4.3.1.[a] Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT).										
4.4 Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan.										
04.04.01 Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										
4.4.1.(a) Proporsi remaja (usia 15-24 tahun) dan dewasa (usia 15-59 tahun) dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).										
4.5 Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.										
4.5.1* Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/ sederajat, SMA/ SMK/ sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/ perkotaan, (c) kuintil terbawah/ teratas, (d) disabilitas/ tanpa disabilitas.										
	RPJMD - APM Pendidikan Menengah	Indikator Program	%	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.										
04.06.01 Persentase remaja/dewasa pada kelompok usia tertentu, paling tidak mahir/mampu pada level tertentu dalam keterampilan (i) membaca dan (ii) menghitung, menurut jenis kelamin.										
	RPJMD - Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	58,2	58,51	58,82	59,13	59,45	Dinas Pendidikan
	RPJMD - Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	IKD	%	NA	27,4	27,7	28,01	28,32	28,63	Dinas Pendidikan
4.6.1.(a) Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.										
4.a Membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak, ramah penyandang cacat dan gender, serta menyediakan lingkungan belajar yang aman, anti kekerasan, inklusif dan efektif bagi semua.										
4.a.1* Proporsi sekolah dengan akses terhadap: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) air minum layak, (e) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (f) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).										
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	236	236	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	81	94	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Atas (SMA) > Jumlah SMA dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	118	236	236	236	236	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	111	111	111	111	111	111	Dinas Pendidikan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	40	52	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) > Jumlah SMK dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	55	111	111	111	111	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	29	29	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	0	4	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
	Progul - Jumlah sarana sanitasi layak di Sekolah Luar Biasa (SLB) > Jumlah SLB dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	0	15	29	29	29	29	Dinas Pendidikan
4.a.1.[a] Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
4.b Pada tahun 2020, secara signifikan memperluas secara global, jumlah beasiswa bagi negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil, dan negara-negara Afrika, untuk mendaftar di pendidikan tinggi, termasuk pelatihan kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, program teknik, program rekayasa dan ilmiah, di negara maju dan negara berkembang lainnya.										
4.b.1* Jumlah bantuan resmi Pemerintah Indonesia kepada mahasiswa asing penerima beasiswa kemitraan negara berkembang.										
4.c Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas, termasuk melalui kerjasama internasional dalam pelatihan guru di negara berkembang, terutama negara kurang berkembang, dan negara berkembang kepulauan kecil.										
4.c.1* Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan.										

Tujuan 5: KESETARAAN GENDER

3.5 Tujuan 5: Kesenjangan Gender

Upaya untuk mencapai **Tujuan 5 TPB/SDGs, yakni Kesenjangan Gender**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan Arah kebijakan:
 - a) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
 - b) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Provinsi
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
2. Strategi Peningkatan perlindungan hak perempuan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - c) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
3. Strategi Peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - b) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
 - c) Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota

4. Strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, antara lain yakni :
- a) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - b) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
 - c) Meningkatkan penguatan organisasi perempuan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
 - d) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di OPD provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
 - e) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD Provinsi dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
 - f) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
 - g) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan.
 - h) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan.
 - i) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan
 - j) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan Organisasi
 - k) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kualitas keluarga sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
 - l) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran kualitas keluarga pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - m) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat kualitas keluarga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga

- n) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan kualitas keluarga di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
- o) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- p) Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- q) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
- a. Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
- r) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi
- s) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- t) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan.
- u) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap anak.
- v) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran data gender dan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- w) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan data gender dan anak
- x) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak.
- y) Melakukan pelaksanaan sistem data gender dan anak.
- z) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran perlindungan khusus anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- aa) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan khusus anak
- bb) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.

- cc) Peningkatan pemahaman pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kualitas hidup keluarga, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak diberbagai bidang pembangunan
- dd) Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan antara pemerintah dengan organisasi dalam pelaksanaan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- ee) Penguatan sistem data terpilah termasuk data anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan
- ff) Peningkatan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak, serta perlindungan khusus anak
- gg) Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
- hh) Peningkatan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Tabel 3.6
Target Pencapaian Indikator Tujuan 5 Kesenjangan Gender

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.										
5.1.1* Ketersediaan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan dan memantau kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.										
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	4	4,15	4,3	4,45	4,6	4,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,76	10,76	10,76	12,3	12,3	12,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.										
5.2.1* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.2.2* Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15- 64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.										
5.3.1* Proporsi perempuan umur 20 - 24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.										
	RPJMD - Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	IKD	Usia	21,6	21,8	22	22,2	22,4	22,6	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
05.03.02 Persentase anak perempuan dan perempuan berusia 15-49 tahun yang telah menjalani FGM/C, menurut kelompok umur.										
5.4 Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.										
05.04.01 Proporsi waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah tangga dan perawatan, berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi.										
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.										
5.5.1* Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.										
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,76	10,76	10,76	12,3	12,3	12,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.5.2* Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.										
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen- dokumen hasil revidi dari konferensi- konferensi tersebut.										
5.6.1* Proporsi perempuan usia reproduksi 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan.										
5.6.2* Regulasi yang menjamin akses yang setara bagi perempuan dan laki-laki untuk mendapatkan pelayanan, informasi dan pendidikan terkait kesehatan seksual dan reproduksi.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
5.a Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional.										
5.a.1* (1) Proporsi penduduk pertanian yang memiliki hak atas tanah pertanian; (2) Proporsi perempuan penduduk pertanian sebagai pemilik atau yang memiliki hak atas tanah pertanian, menurut jenis kepemilikan.										
5.a.2* Ketersediaan kerangka hukum (termasuk hukum adat) yang menjamin persamaan hak perempuan untuk kepemilikan tanah dan/atau hak kontrol.										
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.										
5.b.1* Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.										
5.c Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang- undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.										
5.c.1* Ketersediaan sistem untuk melacak dan membuat alokasi umum untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.										
	RPJMD - Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD (%)	IKD	%	4	4,15	4,3	4,45	4,6	4,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE (Kabupaten/Kota)	IKD	Kabupaten/Kota	17	17	18	18	19	19	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Perolehan penghargaan APE untuk Pemerintah Provinsi (Predikat)	IKD	Predikat	Utama	Utama	Utama	Utama	Mentor	Mentor	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB



Tujuan 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK

3.6 Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Upaya untuk mencapai **Tujuan 6 TPB/SDGs, yakni Air Bersih dan Sanitasi Layak**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah untuk pemerataan pembangunan dan hasilnya baik di bidang infrastruktur maupun di bidang sosial dan ekonomi.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan, dengan Arah kebijakan:
 - a) Pembangunan SPAM Regional
 - b) Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan
 - c) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
2. Strategi dan arah kebijakan urusan Pekerjaan Umum, antara lain yakni :
 - a. Meningkatkan penyediaan layanan air minum dan sanitasi
 - b) Pembangunan infrastruktur air minum
 - c) Pembangunan infrastruktur sanitasi
 - d) Pendayagunaan sumber daya air melalui peningkatan jaringan pemanfaatan air pada daerah irigasi kewenangan provinsi sebagai penunjang ketahanan pangan.
 - e) Peningkatan pengembangan dan pengelolaan infrastruktur konservasi sumber daya air melalui pelaksanaan jaringan sumber air.
 - f) Perencanaan, pelaksanaan, operasional dan pemeliharaan PJPA (Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air).
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
 - a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
 - c) Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - d) Penegakkan hukum dan penaatan terhadap hukum lingkungan
 - e) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - f) Peningkatan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.

- g) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
- h) Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
- i) Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan
- j) Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan
- k) Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketesediaan PPLH dan PPNS.
- l) Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar
- m) Pencegahan terjadinya degradasi lahan
- n) Penerapan teknologi pengelolaan limbah
- o) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH
- p) Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
- q) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian informasi dan publikasi kepada stakeholders
- r) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain
- s) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
- t) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan
- u) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.7
Target Pencapaian Indikator Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.										
6.1.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.										
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	80,04	82	84	86	88	90	
	RPJMD - Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kab /kota (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
6.2 . Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar sembarangan di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.										
6.2.1* Persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.										
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	81	82	84	86	88	90	
	RPJMD - Akses Keluarga Dengan Sanitasi Dasar (Jamban Sehat) (%)	IKD	%	83	86	89	92	95	100	Dinas Kesehatan
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
6.3 . Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.										
06.03.01 Proporsi limbah cair rumah tangga dan industri cair yang diolah secara aman										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	81	83	85	87	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	18	18	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.1.(A) Persentase Limbah Cair Industri Yang Dikelola Secara Aman										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	81	83	85	87	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	18	18	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
06.03.02 Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.										
6.3.2.(a) Kualitas air permukaan sebagai air baku										
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	86,64	87,16	87,66	88,16	88,67	89,17	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25	Dinas Lingkungan Hidup
6.3.2.(b) Kualitas air tanah sebagai air baku										
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	86,64	87,16	87,66	88,16	88,67	89,17	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25	Dinas Lingkungan Hidup
6.4 . Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.										
06.04.01 Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.										
06.04.02 Tingkat water stress: proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediaannya.										
6.4.2.(a) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air permukaan terhadap ketersediaannya										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
6.4.2.(b) Proporsi pengambilan air baku bersumber dari air tanah terhadap ketersediaanya										
6.5 . Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas sesuai kepantasan.										
6.5.1* Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).										
	RPJMD - Persentase luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air	Indikator Program	%	64,75	66,51	68,27	70,03	71,79	73,5	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
6.5.2* Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional.										
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	IKD	%	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
	RPJMD - Persentase volume tampungan sumber-sumber air	Indikator Program	%	52,28	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Konstruksi
6.6 . Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.										
6.6.1* Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.										
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah (%)	IKD	%	NA	37,3	55	67	83	100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	29,37	37,5	55	67	83	100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral



Tujuan 7: ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU

3.7 Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Upaya untuk mencapai **Tujuan 7 TPB/SDGs, yakni Energi Bersih dan Terjangkau**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi Pemenuhan kebutuhan energi dan infrastruktur dalam rangka percepatan pembangunan dan daya saing daerah, dengan Arah kebijakan:
 - a) Peningkatan Penyediaan sarana dan prasarana tenaga listrik untuk kelompok masyarakat tidak mampu dan daerah listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan
 - b) Peningkatkan tata kelola ketenagalistrikan yang aman, andal dan akrab lingkungan
2. Strategi Peningkatan pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bauran energi daerah, dengan Arah kebijakan:
 - a) peningkatan ketersediaan infrastruktur pemanfaatan Energi Terbarukan
 - b) Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain yakni :
 - a) Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan
 - b) Meningkatkan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
 - c) Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Ketenagalistrikan
 - d) Meningkatkan tata kelola ketenagalistrikan yang aman andal dan akrab lingkungan
 - e) Meningkatkan pengembangan dan pengusaha energi terbarukan
 - f) Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi terutama di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan
 - g) Meningkatkan penatausahaan izin sektor energi terbarukan
 - h) Meningkatkan pelaksanaan konservasi energi
 - i) Meningkatkan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

Tabel 3.8
Target Pencapaian Indikator Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.										
7.1.1* Rasio elektrifikasi.										
	RPJMD - Persentase Desa yang teraliri listrik (%)	IKD	%	99,91	100	100	100	100	100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Rasio Elektrifikasi	IKD	Rasio	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD – Rasio Elektrifikasi	Indikator Program	%	99,3	99,5	99,6	99,7	99,8	99,9	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
7.1.1.(a) Konsumsi listrik per kapita.										
07.01.02 Proporsi penduduk dengan sumber energi utama pada teknologi dan bahan bakar yang bersih.										
7.1.2.(a) Jumlah sambungan jaringan gas untuk rumah tangga.										
7.1.2.(b) Rasio penggunaan gas rumah tangga.										
7.2 Pada tahun 2030, meningkat secara substansial pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global.										
7.2.1* Bauran energi terbarukan.										
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
7.3 Pada tahun 2030, melakukan perbaikan efisiensi energi di tingkat global sebanyak dua kali lipat.										
7.3.1* Intensitas energi primer.										
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
7.a Pada tahun 2030, memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitas akses pada teknologi dan riset energi bersih, termasuk energi terbarukan, efisiensi energi, canggih,teknologi bahan bakar fosil lebih bersih, dan mempromosikan investasi di bidang infrastruktur energi dan teknologi energi bersih										
7.a.1 Bantuan keuangan internasional ke negara-negara berkembang untuk mendukung penelitian dan pengembangan energi bersih dan produksi energi terbarukan, termasuk sistem hibrida.										
7.b Pada tahun 2030, memperluas infrastruktur dan meningkatkan teknologi untuk penyediaan layanan energi modern dan berkelanjutan bagi semua negara-negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, negara berkembang pulau kecil dan negara berkembang										
7.b.1* Kapasitas Terpasang Pembangkit Listrik dari Energi Terbarukan dalam watt per kapita)										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral

Tujuan 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

3.8 Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Upaya untuk mencapai Tujuan 8 TPB/SDGs, yakni **Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan Vokasi, penguatan BLK dan lembaga produktivitas, dengan Arah Kebijakan Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan Peningkatan Lembaga produktivitas.
2. Strategi Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan
 - b) Peningkatan kompetensi lulusan SMK yang mampu diterima di dunia usaha dan dunia industri
3. Strategi Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan Arah Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
4. Strategi Meningkatkan suasana Ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dengan arah kebijakan Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Strategi dan arah kebijakan urusan Tenaga Kerja, antara lain yakni :
 - a) Meningkatnya Kualitas Pencari Kerja melalui Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan peningkatan lembaga produktivitas
 - b) Penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja dengan sasaran program me ningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditenpatkan dan diberdayakan
6. Strategi dan arah kebijakan urusan Koperasi dan UMKM, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia

- b) Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan
 - c) Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran
 - d) Kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha
 - e) Meningkatkan produktivitas dan nilai tambah UMKM dan koperasi sehingga mampu tumbuh ke skala yang lebih besar (naik kelas) dan berdaya saing
 - f) Peningkatan penyuluhan, pendampingan, diklat serta pengawasan
 - g) Peningkatan penyelenggaraan diklat, pendampingan, fasilitasi standarisasi produk, akses permodalan, promosi, kemitraan serta pemasaran produk UKM
7. Strategi dan arah kebijakan urusan Pariwisata, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan daya saing destinasi pariwisata berbasis aglomerasi
 - b) Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
 - c) Meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia Pariwisata
 - d) Membangun industri pariwisata melalui 1 (satu) destinasi wisata berkelas internasional dan 19 (sembilan belas) destinasi wisata unggulan
 - e) Memfasilitasi peningkatan destinasi wisata yang memenuhi aspek 3A (Amenitas, Aksesibilitas, Atraksi) dan 2P Pemasaran dan Pertumbuhan Ekonomi Wilayah)
 - f) Mengembangkan daya tarik wisata tematik berbasis alam, budaya dan buatan Agrowisata, Ekowisata, eopark, OCMH, Desa Wisata, dan Wisata Halal)
 - g) Memfasilitasi pengusulan KEK pariwisata
 - h) Mendorong dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata
 - i) Mengintensifkan penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Healthy, Safety, Environment Sustainability)
 - j) Meningkatkan sinergi promosi di bidang pariwisata dengan sektor terkait di dalam dan luar negeri
 - k) Meningkatkan efektivitas dan kualitas pemasaran dan promosi pariwisata melalui pemanfaatan teknologi dan sistem informasi
 - l) Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan
 - m) Meningkatkan kompetensi dan sertifikasi SDM pelaku wisata

Tabel 3.9
Target Pencapaian Indikator Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.										
8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita.										
	RPJMD - Pertumbuhan Ekonomi (%)	Indikator Makro	%	3,44	3,40	4,57	4,60	4,70	4,84	
8.1.1.(a) PDB per kapita.										
	RPJMD - PDRB (ADHK) Per Kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	31,45	32	32,97	34,09	35,29	36,58	
	RPJMD - PDRB (ADHB) per kapita (Rp. Juta)	Indikator Makro	Rp. Juta	46,09	48,29	50,6	53,69	56,13	59,3	
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.										
8.10.1* Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa										
8.10.1.(a) Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.										
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga	120	540	540	540	540	540	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	100	200	200	200	200	200	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	400	400	400	400	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	50	100	150	150	150	200	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	4	4	4	4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	5	5	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
8.2.1* Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.										
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.										
8.3.1* Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin										
8.3.1.(a) Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan										
	RPJMD - Persentase peningkatan pendapatan pada usaha mikro dan kecil (%)	IKU	%	1,7	2,4	3,1	3,8	4,5	5,2	
	RPJMD - Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	IKD	%	1,9	2	3	3,7	4,2	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	RPJMD - Persentase usaha kecil yang menjadi wirausaha	Indikator Program	%	1,9	2	3	3,5	4,2	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah UMKM yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	lembaga	120	540	540	540	540	540	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang difasilitasi pada akses keuangan perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	100	200	200	200	200	200	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	400	400	400	400	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Pengusaha pemula yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	50	100	150	150	150	200	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	4	4	4	4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	5	5	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
8.4 Meningkatkan secara progresif, hingga 2030, efisiensi sumber daya global dalam konsumsi dan produksi, serta usaha melepas kaitan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan, sesuai dengan the 10-Year Framework of Programs on Sustainable Consumption and Production, dengan negara-negara maju sebagai pengarah.										
08.04.01 Jejak material (material footprint) yang dihitung selama tahun berjalan.										
8.4.1.(a) Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan										
08.04.02 Konsumsi material domestik (domestic material consumption).										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.										
8.5.1* Upah rata-rata per jam pekerja.										
8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.										
	RPJMD - Tingkat pengangguran terbuka (%)	Indikator Makro	%	6,7	6,6	6,45	6,31	6,13	5,94	
8.5.2.(a) Persentase setengah pengangguran.										
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.										
8.6.1* Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).										
8.7 Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.										
08.07.01 Persentase dan jumlah anak usia 5-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (dibedakan berdasarkan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak).										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
8.7.1.(a) Persentase dan jumlah anak usia 10-17 tahun, yang bekerja, dibedakan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
8.8 Melindungi hak- hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, Dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.										
08.08.01 Tingkat frekuensi kecelakaan kerja fatal dan non-fatal, berdasarkan jenis kelamin, sektor pekerjaan dan status migran.										
8.8.1.(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.										
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	37,61	41,95	46,29	50,63	59,31	61,92	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	RPJMD - Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	IKD	%	8,14	12,36	16,58	20,8	25,01	29,23	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Indikator Program	%	10,69	11,26	11,83	12,41	12,98	13,56	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
08.08.02 Peningkatan kepatuhan atas hak-hak pekerja (kebebasan berserikat dan perundingan kolektif) berdasarkan sumber tekstual ILO dan peraturan perundang-undangan negara terkait.										
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
8.9.1* Proporsi dan laju pertumbuhan kontribusi pariwisata terhadap PDB.										
	RPJMD - Persentase Kontribusi Pariwisata pada PDRB (%)	IKU	%	1,24	1,24	1,24	1,25	1,26	1,27	
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara.										
	RPJMD - Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	IKD	%	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Pariwisata
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara	Indikator Program	%	1	2,5	4	5,5	7	8,5	Dinas Pariwisata
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.										
	RPJMD - Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	IKD	%	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	Dinas Pariwisata
	RPJMD - Persentase peningkatan kunjungan wisatawan nusantara	Indikator Program	%	1,5	3	4,5	6	7,5	9	Dinas Pariwisata
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata.										

Tujuan 9: INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR

3.9 Tujuan 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Upaya untuk mencapai Tujuan 9 TPB/SDGs, yakni **Industri, Inovasi, dan Infrastruktur**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi Fasilitasi pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Memfasilitasi pembangunan industri benih tanaman pangan dan perkebunan
 - b) Memfasilitasi pembangunan pasca panen tanaman pangan, perkebunan dan produk kehutanan non kayu
 - c) Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan dan peternakan
2. Strategi Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pembangunan jalan dan jembatan Provinsi
 - b) Pemeliharaan dan Rehabilitasi jalan dan jembatan Provinsi
3. Strategi Mengintegrasikan sistem transportasi antar intermoda, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pengembangan dan pengawasan pelayanan angkutan umum antar kota dalam provinsi, kawasan aglomerasi perkotaan, dan pelayanan angkutan perintis pada daerah – daerah terpencil
 - b) Dukungan keterpaduan transportasi antar moda (bandara, Pelabuhan, Terminal dan Stasiun Kereta Api)
 - c) Pengembangan jaringan pelayanan angkutan
 - d) Penataan sistem perijinan transportasi
 - e) Perbaikan sarana dan prasarana terminal Tipe B
 - f) Pengendalian angka kecelakaan melalui pengawasan, penyediaan sarana fasilitas keselamatan dan peningkatan kesadaran masyarakat
4. Strategi Percepatan pengembangan Infrastruktur transportasi dalam meningkatkan pelayanan publik pada sektor strategis, dengan Arah Kebijakan :

- a) Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur jalan baru dan jalan lama termasuk lintas pantai barat sumatera barat, sesuai master plan yang telah ada dan interkoneksi dan koneksi antar daerah
 - b) Dukungan akses transportasi ke sentra produksi pertanian dan perikanan, destinasi wisata, industri dan UMKM
5. Strategi Dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional, dengan Arah Kebijakan Meningkatnya dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis nasional
6. Strategi Melaksanakan pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar, Bangunan Gedung Strategis dan Penataan Bangunan, dengan Arah kebijakan :
- a) Pembangunan gedung untuk kepentingan strategis
 - b) Penataan bangunan dan lingkungan
 - c) Pembangunan SPAM Regional
 - d) Pembangunan dan pengelolaan TPA Regional
 - e) Pembangunan Drainase primer
 - f) Pembangunan IPLT Regional
 - g) Memfasilitasi penyelesaian masalah dan konflik pertanahan
 - h) Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan
 - i) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
7. Strategi Pembangunan Infrastruktur Pertanian, dengan Arah Kebijakan :
- a) Pengembangan dan rehabilitasi Irigasi dan pengairan kewenangan provinsi serta peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
 - b) Peningkatan daya tampung air (pembangunan embung)
8. Strategi Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan Arah Kebijakan:
- a) Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, peternakan dan perikanan
 - b) Mendorong tumbuh petani milenial
 - c) Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian
9. Strategi Pembangunan insfrastruktur pertanian, dengan Arah Kebijakan :
- a) Pengembangan dan rehabilitasi Irigasi dan pengairan kewenangan provinsi serta peningkatan pengelolaan sistem irigasi partisipatif
 - b) Peningkatan daya tampung air (pembangunan embung)
10. Strategi dan arah kebijakan urusan Perindustrian, antara lain yakni :
- a) Memperkuat struktur industri yang berdaya saing berbasis sumberdaya dan penguasaan teknologi;
 - b) Mengembangkan usaha hilirisasi produk industri pengolahan;
 - c) Meningkatkan kualitas produk industri;

- d) Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia sektor industri;
 - e) Peningkatan wirausaha industri startup yang berkompeten dan melek digital
 - f) Pengembangan dan penguatan sentra industri;
 - g) Peningkatan produksi usaha industri melalui hilirisasi, diversifikasi, dan penggunaan teknologi tepat guna;
 - h) Peningkatan daya saing produk industri melalui peningkatan kualitas, desain, kemasan, kontinuitas produksi dan sertifikasi produk
 - i) Peningkatan kompetensi manajerial dan teknis bagi wirausaha industri startup
11. Strategi dan arah kebijakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan, antara lain yakni:
- a) Melakukan Penelitian dan Pengkajian
 - b) Melakukan penguatan kelembagaan litbang
 - c) Melakukan Perekayasaan Produk dan Teknologi
 - d) Melakukan Penerapan Produk dan Teknologi
 - e) Melakukan Diseminasi Hasil-Hasil IPTEK
 - f) Meningkatkan Inovasi Tata Kelola Pemerintahan
 - g) Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik
 - h) Meningkatkan Inovasi Daerah Lainnya
 - i) Meningkatkan Pemahaman OPD Hasil Bimtek, Sosialisasi IPKD, Rakor Inovasi
 - j) Terlaksananya Koordinasi dengan Lembaga Litbang

Tabel 3.10
Target Pencapaian Indikator Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.										
9.1.1* Populasi penduduk desa yang tinggal dalam jarak 2 km terhadap jalan yang layak.										
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	
	RPJMD - Rasio konektivitas Provinsi	IKD	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	Dinas Perhubungan
9.1.1.(a) Kondisi mantap jalan nasional.										
	RPJMD - Kemantapan Jalan (%)	IKU	%	73,92	75	77	79	81	82	
	RPJMD - Rasio kemantapan jalan provinsi	IKD	Rasio	73,92	75	77	79	81	82	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Rasio Kemantapan Jalan	Indikator Program	%	73,92	75	77	79	81	82	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
9.1.1.(b) Panjang pembangunan jalan tol.										
9.1.1.(c) Panjang jalur kereta api.										
9.1.2* Jumlah penumpang dan barang berdasarkan moda transportasi.										
9.1.2.(a) Jumlah bandara.										
9.1.2.(b) Jumlah pelabuhan penyeberangan.										
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan
9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.										
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Penyeberangan	Indikator Progul	pelabuhan penyeberangan	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah Pelabuhan yang beroperasi dengan baik mendukung distribusi produk pertanian dan perikanan > Pelabuhan Laut	Indikator Progul	pelabuhan laut	4	4	4	4	4	4	Dinas Perhubungan
9.2 Mempromosikan dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.										
9.2.1* Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.										
9.2.1.(a) Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.										
9.2.2* Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.										
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke dalam rantai nilai dan pasar.										
9.3.1* Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.										
	RPJMD - Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (%)	IKU	%	8,62	8,75	8,88	9,02	9,15	9,29	
	RPJMD - Jumlah sentra industri kecil dan menengah (sentra)	IKU	Sentra	358	368	379	390	401	413	
	RPJMD - Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) (Rp)	IKD	Rp. Triliun	15,4	15,7	16	16,3	16,7	17	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Jumlah pelaku industri kecil dan menengah (unit usaha)	IKD	Unit Usaha	39403	41373	43263	45363	47673	50193	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Jumlah pelaku industri	Indikator Program	unit usaha	39403	41373	43263	45363	47673	50193	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	Progul - Jumlah entrepreneur baru tercipta > Jumlah entrepreneur baru tercipta urusan Perindustrian dan Perdagangan (orang)	Indikator Progul	Orang	-	1.636	1.855	2.000	2.200	2.300	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
9.3.2* Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.										
	Progul - Jumlah Pelaku UMKM yang mendapatkan permodalan dari Lembaga perbankan dan non perbankan	Indikator Progul	orang	300	400	400	400	400	400	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	4	4	4	4	4	4	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
	Progul - Jumlah Lembaga non perbankan yang memberikan permodalan pada UMKM dan pengusaha pemula	Indikator Progul	lembaga	5	5	5	5	5	5	Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
9.4.1* Rasio emisi CO2/emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur.										
9.4.1.(a) Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri.										
9.4.1.(b) Intensitas emisi sektor industri.										
9.5 Memperkuat riset ilmiah, meningkatkan kapabilitas teknologi sektor industri di semua negara, terutama negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan meningkatkan pembelanjaan publik dan swasta untuk penelitian dan pengembangan.										
9.5.1* Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.										
9.5.2* Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa,dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk.										
9.5.2.(a) Proporsi sumberdaya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan gelar Doktor (S3).										



Tujuan 10: BERKURANGNYA KESENJANGAN

3.10 Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Upaya untuk mencapai Tujuan 10 TPB/SDGs, yakni **Berkurangnya Kesenjangan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Meningkatkan pembangunan kualitas sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan pada semua aspek kehidupan, baik sebagai pelaku maupun sebagai penerima manfaat atau tujuan pembangunan yang dilakukan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan daya saing angkatan kerja melalui pelatihan Vokasi, penguatan BLK dan lembaga produktivitas, dengan Arah Kebijakan Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan sasaran program untuk meningkatkan daya saing melalui pelatihan vokasi, penguatan BLK dan Peningkatan Lembaga produktivitas.
2. Strategi Mengoptimalkan perluasan kesempatan kerja di sektor formal dan informal, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja, dengan sasaran program meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan dan diberdayakan
 - b) Peningkatan kompetensi lulusan SMK yang mampu diterima di dunia usaha dan dunia industri
3. Strategi Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pengawasan Ketenagakerjaan, dengan Arah Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan.
4. Strategi Meningkatkan suasana Ketenagakerjaan yang kondusif melalui pembinaan hubungan industrial yang harmonis, dengan Arah Kebijakan Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
5. Strategi Penciptaan iklim investasi, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Kemudahan dan fasilitas investasi serta pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi
 - b) Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha
 - c) Penyusunan regulasi peningkatan layanan investasi yang lebih efisien, transparan dan akuntabel
6. Strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan Kerjasama Desa

- b) Meningkatnya Administrasi Pemerintahan Desa
- c) Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
- d) Meningkatnya Penataan Desa dan Desa Adat
- e) Pengelolaan Adminstrasi pemerintahan yang sesuai dengan SOP
- f) Fasilitasi Kerja Sama antardesa Lintas Kabupaten/Kota
- g) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan
- h) Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa
- i) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- j) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan TTG
- k) Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
- l) Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
- m) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
- n) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa
- o) Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
- p) Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
- q) Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan
- r) Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
- s) Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD
- t) Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis
- u) Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa
- v) Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa
- w) Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa
- x) Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa
- y) Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa
- z) Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa
- aa) Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota
- bb) Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat
- cc) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

- dd) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- ee) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- ff) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- gg) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa
- hh) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
- ii) Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi
- jj) Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat
- kk) Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
- ll) Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa

Tabel 3.11
Target Pencapaian Indikator Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.										
10.1.1* Rasio Gini.										
	RPJMD - Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	Indikator Makro	Indeks	0,311	0,31	0,309	0,308	0,307	0,306	
10.1.1.(a) Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.										
	RPJMD - Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Indikator Makro	Ribu Jiwa	358,76	356,45	353,68	350,62	347,27	343,62	
10.1.1.(b) Jumlah desa tertinggal.										
	RPJMD - Persentase pengentasan desa tertinggal (%)	IKD	%	43,47	8,6	10,43	13,04	14,78	9,5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
10.1.1.(c) Jumlah Desa Mandiri.										
	RPJMD - Persentase peningkatan status desa mandiri (%)	IKD	%	0,6	2,02	2,02	2,02	2,02	2,02	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
10.1.1.(d) Jumlah daerah tertinggal.										
10.1.1.(e) Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.										
10.1.1.(f) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.										
10.2 Pada tahun 2030,memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.										
10.2.1* Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan,menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.										
10.3 Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut.										
10.03.01 Proporsi penduduk yang melaporkan merasa didiskriminasikan atau dilecehkan dalam kurun 12 bulan terakhir atas dasar larangan diskriminasi sesuai hukum internasional Hak Asasi Manusia.										
10.3.1.(a) Indeks Kebebasan.										
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	67,69	68,01	68,5	68,75	69,25	70	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
10.3.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).										
10.3.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
										Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
10.3.1.(d) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.										
10.04.01 Proporsi upah dan subsidi perlindungan sosial dari pemberi kerja terhadap PDB.										
10.4.1.(a) Persentase rencana anggaran untuk belanja fungsi perlindungan sosial pemerintah pusat.										
10.4.1.(b) Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.										
	RPJMD - Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	IKD	%	37,61	41,95	46,29	50,63	59,31	61,92	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
10.04.02 Dampak redistributif dari kebijakan fiskal.										
10.5 Memperbaiki regulasi dan pengawasan pasar dan lembaga keuangan global, dan memperkuat pelaksanaan regulasinya.										
10.05.01 Financial Soundness Indicator.										
10.5.1.(a) Indikator Kesehatan Perbankan.										
10.7 . Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik. Ke negara-negara yang paling membutuhkan, terutama negara kurang berkembang, negara-negara Afrika, negara berkembang pulau kecil dan negara terkurung daratan, sesuai dengan rencana dan program nasional mereka.										
10.07.01 Proporsi biaya rekrutmen yang ditanggung pekerja terhadap pendapatan tahunan di negara tujuan.										
10.07.02 Jumlah negara yang mengimplementasikan kebijakan migrasi yang baik.										
	RPJMD - Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar yang mendapatkan penanganan	Indikator Program	orang	35	35	35	35	35	35	Dinas Sosial
10.7.2.(a) Jumlah dokumen kerjasama ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran antara negara RI dengan negara tujuan penempatan.										
10.7.2.(b) Jumlah fasilitasi pelayanan penempatan TKLN berdasarkan okupasi.										
10.07.03 Jumlah orang yang meninggal atau hilang dalam proses migrasi menuju tujuan internasional.										
10.07.04 Proporsi penduduk yang mengungsi menurut negara asal.										

Tujuan 11: KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN

3.11 Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Upaya untuk mencapai Tujuan 11 TPB/SDGs, yakni **Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Penyediaan PSU Kawasan Permukiman yang aman nyaman berkelanjutan
 - b) Fasilitasi penyediaan perumahan layak huni
 - c) Mengurangi luasan kawasan kumuh
2. Strategi dan arah kebijakan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, antara lain yakni :
 - a) Mengurangi luasan kawasan kumuh.
 - b) Meningkatkan kualitas PSU permukiman.
 - c) Meningkatkan rumah layak huni
 - d) Merencanakan dan melaksanakan pembangunan kawasan permukiman.
 - e) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman.
 - f) Melakukan pembinaan penyelenggaraan bidang kawasan permukiman.
 - g) Menyusun database kawasan permukiman kumuh.
 - h) Menyusun database rumah tidak layak huni.
 - i) Melakukan penguatan kelembagaan bidang perumahan.
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
 - a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Penaggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - c) Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan
 - d) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - e) Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
 - f) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup

- g) Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
- h) Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan
- i) Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya
- j) Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota
- k) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH
- l) Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
- m) Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders
- n) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain
- o) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
- p) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapt dijadikan rujukan ke depan
- q) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaaan lingkungan.

Tabel 3.12
Target Pencapaian Indikator Tujuan 11 Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar, serta menata kawasan kumuh.										
11.01.01 Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak.										
11.1.1.(a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau										
	RPJMD - Akses Air Minum (%)	IKU	%	80,04	82	84	86	88	90	
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKU	%	81	82	84	86	88	90	
	RPJMD - Akses Air Minum Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Akses Sanitasi Layak (%)	IKD	%	80,04	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
	RPJMD - Persentase Cakupan Pelayanan Air Minum	Indikator Program	%	82	82	84	86	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
11.2 . Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.										
11.02.01 Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang disabilitas										
11.2.1.(a) Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik										
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18000000	19000000	20000000	22000000	23000000	24000000	Dinas Perhubungan
11.2.1.(b) Persentase penduduk terlayani transportasi umum										
	RPJMD - Rasio Konektivitas (Rasio)	IKU	Rasio	0,661	0,668	0,676	0,684	0,691	0,695	
	RPJMD - Jumlah penumpang terangkut angkutan umum (orang)	IKD	Orang	18000000	19000000	20000000	22000000	23000000	24000000	Dinas Perhubungan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.										
11.03.01 Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk										
11.3.1.(a) Rasio laju perluasan lahan terbangun terhadap laju pertumbuhan penduduk										
11.03.02 Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis										
11.4 Mempromosikan dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.										
11.04.01 Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (dengan Purchase Power Parity, PPP)										
11.4.1.(a) Total pengeluaran per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam (non-PPP)										
	RPJMD - d. Pengeluaran per Kapita (Ribu/Kapita/Tahun)	Indikator Makro	Ribu	10865	10916	11108	11342	11592	11863	
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relative terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang - orang dalam situasi rentan.										
11.5.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang										
	RPJMD - Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di daerah yang terpenuhi sesuai waktu tanggap	IKD	%	50	53	56	59	62	65	Satuan Polisi Pamong Praja
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	70	71	72	73	74	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah nagari/desa siaga bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	nagari/desa	2	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.05.02 Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar										
11.5.2.(a) Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB										
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.										
11.06.01 Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota										
11.6.1.(a) Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya										
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	15	17	19	21	23	25	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	54	56	58	60	62	64	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	-	-	-	-	30	40	Dinas Lingkungan Hidup
11.6.1.(b) Persentase sampah nasional yang terkelola										
11.06.02 Rata-rata tahunan materi partikular halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk)										
11.6.2.(a) Rata-rata tahunan materi partikulat halus PM 10										
11.6.2.(b) Indeks Kualitas Udara										
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	IKU	Indeks	86,64	87,16	87,66	88,16	88,67	89,17	
	RPJMD - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	IKD	Indeks	76,94	77,43	77,95	78,41	78,81	79,25	Dinas Lingkungan Hidup
11.7 Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.										
11.07.01 Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
11.7.1.(a) Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua										
11.07.02 Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir)										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
11.7.2.(a) Proporsi penduduk yang mengalami kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
11.a Mendukung hubungan ekonomi, sosial, dan lingkungan antara urban, pinggiran kota, dan perdesaan dengan memperkuat perencanaan pembangunan nasional dan daerah.										
11.a.1 Jumlah negara yang memiliki kebijakan perkotaan nasional atau rencana pembangunan daerah yang (a) merespon dinamika penduduk; (b) memastikan keseimbangan perencanaan wilayah; dan (c) meningkatkan ruang fiskal daerah.										
11.a.1.(a) Proporsi penduduk yang tinggal di daerah dengan RTRW yang sudah dilengkapi KLHS										
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015- 2030.										
11.b.1* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015?2030										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
11.b.2* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana										
11.c Memberikan dukungan kepada negara-negara kurang berkembang, melalui bantuan keuangan dan teknis, dalam membangun bangunan yang berkelanjutan dan tangguh, dengan memanfaatkan bahan lokal.										
11.c.1 -										
11.c.1.(a) Persentase Daerah yang memiliki Perda Bangunan Gedung yang Berkelanjutan, Berketahanan menggunakan Material Lokal										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Tujuan 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB

3.12 Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab

Upaya untuk mencapai Tujuan 12 TPB/SDGs, yakni **Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab** telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Meningkatkan penyediaan dan benih bersertifikat pada pelaku utama dalam berusaha tani
 - b) Optimalisasi pemanfaatan lahan dan perlindungan lahan
 - c) Mengoptimalkan pemakaian alsintan untuk efisiensi usaha tani
 - d) Pengembangan kawasan sentra produksi pertanian
 - e) Pengembangan teknik pengendalian OPT yang efektif dan efisien serta Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 - f) Pengembangan dan pemanfaatan produk pertanian organik
 - g) Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM petani dan petugas
 - h) Pengawasan pupuk bersubsidi
2. Strategi Peningkatan penggunaan dan pemanfaatan inovasi tepat guna, dengan Arah Kebijakan:
 - a) Peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk pertanian, peternakan dan perikanan
 - b) Mendorong tumbuh petani milenial
 - c) Penerapan Inovasi dan Teknologi Pertanian
3. Strategi Pengembangan system value chain, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Meningkatkan akses permodalan
 - b) Peningkatan kapasitas kelembagaan tani
 - c) Peningkatan pengawasan Agro input
 - d) Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas pertanian, peternakan dan perikanan
 - e) Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian ,perkebunan dan Perikanan

- f) Meminimalisir resiko kerugian usaha tani
 - g) Pengintegrasian program pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan lingkungan hidup
4. Strategi Fasilitas pembangunan industri hilir pertanian, perikanan, peternakan dan hasil kehutanan, dengan Arah Kebijakan :
- a) Memfasilitasi pembangunan industri benih tanaman pangan dan perkebunan
 - b) Memfasilitasi pembangunan pasca panen tanaman pangan, perkebunan dan produk kehutanan non kayu
 - c) Memfasilitasi pembangunan pemrosesan hasil perikanan dan peternakan
5. Strategi dan arah kebijakan urusan Pangan, antara lain yakni :
- a) Revitalisasi dan penyediaan RMU mobile
 - b) Penyediaan cadangan pangan pemerintah provinsi Sumatera Barat
 - c) Pemberdayaan kelompok-kelompok tani/KWT di Nagari/desa/kelurahan yang terindikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan
 - d) Pemberdayaan KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan
 - e) Pemberdayaan kelompok-kelompok pengolahan pangan lokal
 - f) Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
 - g) Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis
 - h) Meningkatkan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok
 - i) Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal
 - j) Pemberdayaan daerah rentan pangan
 - k) Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar ditingkat produsen dan konsumen
 - l) Peningkatan Distribusi dan akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau
6. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
- a) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - b) Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
 - c) Memberikan jaminan fasilitas dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - d) Melaksanakan even-even stimulan peranserta masyarakat / stakeholders
 - e) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain

- f) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
 - g) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan
 - h) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.
7. Strategi dan arah kebijakan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan Ketersediaan infrastruktur pemanfaatan energi terbarukan
 - b) Meningkatkan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
 - c) Meningkatkan pengembangan dan pengusaha energi terbarukan
 - d) Meningkatkan penyediaan infrastruktur energi terutama di daerah yang belum berkembang, daerah terpencil dan daerah perdesaan dengan menggunakan sumber energi setempat, khususnya sumber energi terbarukan
 - e) Meningkatkan penatausahaan izin sektor energi terbarukan
 - f) Meningkatkan pelaksanaan konservasi energi

Tabel 3.13
Target Pencapaian Indikator Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
12.1 Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.										
12.1.1* Rencana dan implementasi Strategi Pelaksanaan Sasaran Pola Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan										
12.3 Pada tahun 2030, mengurangi hingga setengahnya limbah pangan per kapita global di tingkat ritel dan konsumen dan mengurangi kehilangan makanan sepanjang rantai produksi dan pasokan termasuk kehilangan saat pasca panen.										
12.03.01 (a)? Indeks kehilangan makanan (Food loss index); dan (b)? Indeks sampah makanan (Food waste index)										
12.3.1.(a) Persentase sisa makanan										
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	15	17	19	21	23	25	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	54	56	58	60	62	64	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana > Persentase bioteknologi sampah menjadi biogas/carbon pada TPA Regional Payakumbuh yang terlaksana	Indikator Progul	persen	-	-	-	-	30	40	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah nagari/desa yang melaksanakan budidaya maggot	Indikator Progul	nagari/desa	4	13	18	23	28	30	Dinas Lingkungan Hidup
12.4 Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.										
12.4.1* Peran aktif dalam mengikuti kesepakatan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya.										
12.4.1.(a) Persentase pengurangan dan penghapusan merkuri dari baseline 50 ton penggunaan merkuri										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	81	83	85	87	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	18	18	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
12.4.1.(b) Persentase penurunan tingkat konsumsi perusak ozon dari baseline										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	81	83	85	87	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	18	18	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
12.4.2* (a)? Limbah B3 yang dihasilkan per kapita; dan (b)? Proporsi limbah B3 yang ditangani / diolah berdasarkan jenis penanganannya / pengolahannya.										
	RPJMD - Rasio Pelayanan Limbah Domestik oleh SPALD regional	IKD	Rasio	100	100	100	100	100	100	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase cakupan layanan air limbah regional	Indikator Program	%	81	83	85	87	88	90	Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang
	RPJMD - Persentase penanganan Limbah B3	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Limbah B3 yang dikelola	Indikator Progul	ton/tahun	237.536	261.290	287.419	316.160	347.776	382.554	Dinas Lingkungan Hidup
	Progul - Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan pengelolaan limbah B3 yang dioperasikan oleh Provinsi	Indikator Progul	kabupaten/kota	4	10	18	18	19	19	Dinas Lingkungan Hidup
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.										
12.05.01 Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang										
12.5.1.(a) Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.										
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - - Persentase pengurangan sampah (%)	IKD	%	15	17	19	21	23	25	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - - Persentase penanganan sampah (%)	IKD	%	54	56	58	60	62	64	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek- praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.										
12.6.1* Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya										
12.6.1(a) Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.										
12.7 Mempromosikan praktek pengadaan publik yang berkelanjutan, sesuai dengan kebijakan dan prioritas nasional										
12.7.1* Tingkatan (degree) kebijakan pengadaan publik dan implementasi rencana aksi										
12.7.1(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah										
12.7.1(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa										
12.8 Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.										
12.08.01 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.										
12.8.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										
12.8.1.(b) Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.										
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	84,3	84,5	87,5	88,5	89,5	89,5	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	80	81	82	83	84	85	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91	92	93	94	95	96	Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittingi
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	85	86	87	88	89	90	Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91	92	93	94	95	96	Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	92	92	93	94	95	96	Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	82,90 / 3,43	83,05 / 3,45	83,20 / 3,47	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
12.a Mendukung negara- negara berkembang untuk memperkuat kapasitas ilmiah dan teknologi mereka untuk bergerak ke arah pola konsumsi dan produksi yang lebih berkelanjutan.										
12.a.1* Kapasitas pembangkit energi terbarukan yang terpasang (dalam watt per kapita)										
	RPJMD - Porsi EBT dalam bauran Energi (%)	IKD	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
	RPJMD - Porsi Energi Terbarukan pada Bauran Energi	Indikator Program	%	28	29	33,3	35,7	51,7	51,8	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.										
12.b.1 Mengimplemen- tasikan perangkat akutansi dasar untuk memantau as- pek ekonomi dan lingkungan dari pariwisata keberlanjutan										
12.b.1(a) Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development										



Tujuan 13: PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM

3.13 Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Upaya untuk mencapai Tujuan 13 TPB/SDGs, yakni **Penanganan Perubahan Iklim**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Melaksanakan pembangunan berkelanjutan guna menjaga keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan lingkungan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pemulihan media lingkungan yang rusak/tercemar
 - b) Pencegahan terjadinya degradasi lahan/sumber daya alam
 - c) Pengendalian dan pengurangan beban pencemaran
 - d) Penanganan limbah B3
 - e) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
 - f) Rehabilitasi Hutan dan lahan
 - g) Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim
 - h) Optimalisasi penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif (waste to energy)
 - i) Optimalisasi pengurangan sampah dan meningkatkan efektifitas pengolahan sampah
2. Strategi Pengarusutamaan perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan pendukung penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
 - b) Rehabilitasi hutan dan lahan serta pengamanan dan perlindungan hutan
 - c) Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
 - d) Pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
 - e) Pengelolaan sampah dan limbah yang akrab lingkungan
 - f) Peningkatan tata kelola energi terbarukan dan pelaksanaan konservasi energi
 - g) Peningkatan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum sub Bidang Kebencanaan, antara lain yakni :
 - a) Meningkatkan kualitas kelembagaan aparaturnya dan masyarakat dalam mitigasi bencana

- b) Meningkatkan kualitas kelembagaan aparaturnya dan masyarakat dalam pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana
 - c) Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana
 - d) Peningkatan pengelolaan tanggap darurat dan pemulihan daerah pasca bencana
 - e) Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanganan tanggap darurat
 - f) Penyediaan dan perluasan informasi kebencanaan
 - g) Meningkatkan sarana dan prasarana mitigasi bencana
 - h) Pembangunan infrastruktur kebencanaan
 - i) Penanganan bencana banjir, longsor, gempa bumi yang beresiko pada infrastruktur jalan
 - j) Meningkatkan sarana dan prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi
 - k) Pemulihan daerah pasca bencana
4. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
- a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan
 - c) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
 - d) Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - e) Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan
 - f) Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan
 - g) Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan
 - h) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - i) Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
 - j) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - k) Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
 - l) Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan
 - m) Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya
 - n) Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota
 - o) Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya

- p) Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.
- q) Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan
- r) Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketersediaan PPLH dan PPNS.
- s) Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar
- t) Pencegahan terjadinya degradasi lahan
- u) Penerapan teknologi pengelolaan limbah
- v) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH
- w) Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
- x) Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi.
- y) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi
- z) Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan
 - aa) Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan
 - bb) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian
 - cc) informasi dan publikasi kepada stakeholders
 - dd) Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders
 - ee) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain
 - ff) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
 - gg) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan
 - hh) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.14
Target Pencapaian Indikator Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara										
13.1.1* Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak langsung bencana per 100.000 orang										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase penanganan tanggap darurat bencana	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	70	71	72	73	74	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Indikator Program	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Sosial
	Progul - Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana yang terbentuk baru setiap tahunnya	Indikator Progul	kelompok	3	10	10	10	10	10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.1.2* Rencana dan implementasi strategi nasional penanggulangan bencana yang selaras dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030										
	RPJMD - Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi (jiwa)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	DINAS SOSIAL
13.1.3* Persentase pemerintah daerah yang mengadopsi dan menerapkan strategi penanggulangan bencana daerah yang selaras dengan rencana/ strategi nasional penanggulangan bencana										
	RPJMD - Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (16 dokumen kebencanaan) (%)	IKD	%	6,2	25	43,7	62,5	87,5	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	RPJMD - Persentase kesiapsiagaan menghadapi bencana	Indikator Program	%	70	71	72	73	74	75	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
13.2 Mengintegrasikan tindakan antisipasi perubahan iklim ke dalam kebijakan, strategi dan perencanaan nasional										
13.2.1* Terwujudnya penyelenggaraan inventarisasi gas rumah kaca (GRK), serta monitoring, pelaporan dan verifikasi emisi GRK yang dilaporkan dalam dokumen Biennial Update Report (BUR) dan National Communications										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
13.2.2* Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun										
13.2.2.(a) Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)										
13.2.2.(b) Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)										
13.3 Meningkatkan pendidikan, penumbuhan kesadaran, serta kapasitas manusia dan kelembagaan terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim										
13.03.01 Tingkat pengarusutamaan pendidikan warga negara global dan pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan ke dalam (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) asesmen siswa.										
13.3.1.(a) Jumlah satuan Pendidikan formal dan Lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan berbudaya lingkungan hidup										

3.14 Tujuan 14: Ekosistem Lautan

Upaya untuk mencapai Tujuan 14 TPB/SDGs, yakni **Ekosistem Lautan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan, dengan Arah Kebijakan Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan.
2. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
 - a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan
 - c) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
 - d) Penaggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - e) Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan
 - f) Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan
 - g) Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan
 - h) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - i) Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
 - j) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - k) Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
 - l) Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan
 - m) Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya

- n) Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota
 - o) Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya
 - p) Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.
 - q) Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan
 - r) Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketersediaan PPLH dan PPNS.
 - s) Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar
 - t) Pencegahan terjadinya degradasi lahan
 - u) Penerapan teknologi pengelolaan limbah
 - v) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH
 - w) Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
 - x) Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi.
 - y) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi
 - z) Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan
 - aa) Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan
 - bb) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian
 - cc) informasi dan publikasi kepada stakeholders
 - dd) Melaksanakan even-even stimulan peranserta masyarakat / stakeholders
 - ee) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain
 - ff) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
 - gg) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan
 - hh) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Kelautan dan Perikanan, antara lain yakni :
- a) Peningkatkan produksi dan produktivitas komoditas unggulan sektor Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, peternakan dan perikanan
 - b) Mengembangkan Usaha - Usaha Ekonomi Berbasis kelautan dan Perikanan
 - c) Meningkatkan akses permodalan
 - d) Pengembangan system value chain
 - e) Peningkatan Pelestarian dan pengelolaan lingkungan
 - f) Meningkatkan pemakaian benih bermutu

- g) Meningkatkan akses permodalan
- h) Pengembangan sarana dan prasarana penangkapan melalui 1000 rumpon dan sarana lainnya serta pengawasan perikanan
- i) Pengembangan budidaya perikanan payau (udang vanamae) dan komoditas perikanan lainnya
- j) Peningkatan pengawasan Agro input
- k) Pengembangan kerjasama untuk peningkatan produktifitas perikanan
- l) Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian ,perkebunan dan Perikanan
- m) Peningkatan peranserta masyarakat dalam pelestarian lingkungan
- n) Rehabilitasi Hutan dan lahan
- o) Pengembangan ekosistem esensial dan kawasan konservasi
- p) Peningkatan upaya Adaptasi mitigasi perubahan iklim

Tabel 3.15
Target Pencapaian Indikator Tujuan 14 Ekosistem Lautan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
14.1 Pada tahun 2025, mencegah dan secara signifikan mengurangi semua jenis pencemaran laut, khususnya dari kegiatan berbasis lahan, termasuk sampah laut dan polusi nutrisi										
14.01.01 (a)? Indeks eutrofikasi pesisir dan (b)? kepadatan sampah plastik terapung										
14.1.1.(a) Presentase penurunan sampah terbuang ke laut										
	RPJMD - Persentase Sampah dan LB3 Terkelola	IKD	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
	RPJMD - Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	Indikator Program	%	55	60	65	70	75	80	Dinas Lingkungan Hidup
14.2 Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif										
14.2.1* Penerapan pendekatan berbasis ekosistem dalam pengelolaan areal lautan										
	RPJMD - Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Prov	IKD	Ton	467.082	477.362	487.949	499.311	512.013	525.307	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	Indikator Program	%	0,93	0,99	1,07	1,09	1,11	1,17	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator Program	ton	220615	222693	225081	227546	230081	232762	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	Indikator Program	%	3,32	3,33	3,39	3,71	3,78	3,97	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya	Indikator Program	ton	256747	262256	274280	284467	295226	306934	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah produksi perikanan budidaya laut	Indikator Program	ton	52	67	72	79	85	93	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Persentase peningkatan produksi ikan olahan dan pemasaran hasil perikanan	Indikator Program	%	6,3	6,49	7,26	7,95	8,05	11	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah produksi olahan hasil perikanan	Indikator Program	ton	15633	16652	17861	19280	20832	22742	Dinas Kelautan Dan Perikanan
14.2.1.(a) Terkelolanya 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) secara berkelanjutan										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	7	7	7	7	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Luas kawasan terumbu karang yang direhabilitasi	Indikator Program	M2	250	250	300	350	350	350	Dinas Kelautan Dan Perikanan
14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia										
14.5.1* Jumlah luas kawasan konservasi perairan laut										
	RPJMD - Persentase efektifitas pengelolaan kawasan Konservasi perairan, pesisir dan pulau pulau kecil	Indikator Program	%	41,18	47,06	52,94	58,82	64,71	70,59	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Jumlah kawasan konservasi yang dikelola	Indikator Program	kawasan	7	7	7	7	7	7	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Persentase luasan daerah konservasi air tanah	Indikator Program	%	29,37	37,5	55	67	83	100	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization (WTO)										
14.06.01 Tingkat pelaksanaan dari instrument internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU fishing)										
14.6.1.(a) Persentase kepatuhan pelaku usaha										
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	IKD	%	80	82	84	86	90	92	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	RPJMD - Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Indikator Program	%	80	82	84	86	90	92	Dinas Kelautan Dan Perikanan
14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan secara berkelanjutan sumber daya laut, termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya dan pariwisata yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines tentang Alih Teknologi Kelautan, untuk meningkatkan kesehatan laut dan meningkatkan kontribusi keanekaragaman hayati laut untuk pembangunan negara berkembang, khususnya negara berkembang kepulauan kecil, negara kurang berkembang dan semua negara										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
14.07.01 Perikanan berkelanjutan sebagai presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB)										
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar										
14.b.1* Tingkat penerapan kerangka hukum/ regulasi/kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil										
14.b.1.(a) Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan										
14.b.1.(b) Jumlah nelayan yang terlindungi										
14.c Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya dengan menerapkan hokum internasional yang tercermin dalam the United Nations Convention on the Law of the Sea, yang menyediakan kerangka hokum untuk pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya, seperti yang tercantum dalam ayat 158 dari The future we want										
14.c.1* Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan UNCLOS (the United Nations Convention on the Law of the Sea)										

15 EKOSISTEM DARATAN 	Tujuan 15: EKOSISTEM DARATAN

3.15 Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Upaya untuk mencapai Tujuan 14 TPB/SDGs, yakni **Ekosistem Daratan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya daerah untuk pembangunan ekonomi yang semakin terbuka di bidang pertanian, pariwisata, industri kelautan dan komunikasi serta energi dan potensi lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Strategi Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema Perhutanan sosial dalam bentuk HTR, HN dan HKm, dengan Arah kebijakan :
 - a) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - b) Peningkatan kapasitas SDM petani hutan
2. Strategi Peningkatan Kinerja pengusaha dan penatausahaan hasil hutan serta industri kehutanan, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung dalam mekanisme perhutanan sosial
 - b) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - c) Perbenihan Tanaman Hutan
 - d) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun
 - e) Penegakan hukum dalam pengamanan dan perlindungan hutan
3. Strategi dan arah kebijakan urusan Kehutanan, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui skema HTR, HN dan HKm
 - b) Peningkatan Kinerja pengusaha dan penatausahaan hasil hutan
 - c) Percepatan Proses Pemantapan Kawasan Hutan
 - d) Penegakan Hukum dalam Pengamanan dan Perlindungan Hutan serta Penguatan Partisipasi Masyarakat untuk menunjang mitigasi dan adaptasi perubahan Iklim
 - e) Penyediaan bibit berkualitas dan peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan
 - f) Peningkatan melalui optimalisasi pelayanan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi kinerja

- g) Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan
 - h) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - i) Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)
 - j) Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung
 - k) Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan
 - l) Pengelolaan Hutan (KPH)
 - m) Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan
 - n) Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara
 - o) Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
 - p) Perbenihan Tanaman Hutan
 - q) Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
 - r) Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah
 - s) Peningkatan kualitas pelayanan, menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas serta peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan
4. Strategi dan arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup, antara lain yakni :
- a) Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku
 - b) Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan
 - c) Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan
 - d) Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar/rusak
 - e) Penegakkan hukum dan penaatan terhadap hukum lingkungan
 - f) Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan
 - g) Mengendalikan mutu lokasi konservasi / pemeliharaan
 - h) Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri
 - i) Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.
 - j) Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup
 - k) Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan
 - l) Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan

- m) Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/nasional lainnya
- n) Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota
- o) Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya
- p) Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.
- q) Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepad sumber maupun pada media lingkungan
- r) Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketersediaan PPLH dan PPNS.
- s) Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/tercemar
- t) Pencegahan terjadinya degradasi lahan
- u) Penerapan teknologi pengelolaan limbah
- v) Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH
- w) Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan
- x) Perbaikan kualitas data pemetaan kawasan yang akan dikonservasi.
- y) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi
- z) Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan
- aa) Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan
- bb) Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian
- cc) informasi dan publikasi kepada stakeholders
- dd) Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders
- ee) Pengarusutamaan isu-isu lingkungan kepada sektor lain
- ff) Meningkatkan kualitas dan cakupan pemberian penghargaan
- gg) Mendorong terciptanya percontohan atau pilot project pengelolaan lingkungan mandiri oleh masyarakat / kelompok masyarakat untuk dapat dijadikan rujukan ke depan
- hh) Mengoptimalkan upaya-upaya pemenuhan sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat / stakeholders lain dalam rangka ikut berperan dalam pengelolaan lingkungan.

Tabel 3.16
Target Pencapaian Indikator Tujuan 15 Ekosistem Daratan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
15.1 Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.										
15.1.1* Proporsi kawasan hutan terhadap total luas lahan										
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26	Dinas Kehutanan
15.01.02 Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan konservasi, berdasarkan jenis ekosistemnya										
15.1.2.(a) Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV)										
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan
15.2 Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan forestasi dan reforestasi secara global.										
15.02.01 Kemajuan menuju pengelolaan hutan lestari										
15.2.1.(a) Jumlah KPH yang masuk Kategori Maju										
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan (Unit)	IKD	Unit	20	40	60	80	100	120	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Jumlah unit usaha berbasis kehutanan	Indikator Program	unit	20	20	20	20	20	20	Dinas Kehutanan
15.3 Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi										
15.3.1* Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan										
	RPJMD - Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi) (%)	IKD	%	0,79	1,29	1,79	2,29	2,79	3,29	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi (%)	IKD	%	1,9	2,85	3,81	4,76	5,71	6,66	Dinas Kehutanan
15.4 Pada tahun 2030, menjamin pelestarian ekosistem pegunungan, termasuk keanekaragaman hayatinya, untuk meningkatkan kapasitasnya memberikan manfaat yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan.										
15.4.1* Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan konservasi										
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
15.4.2* Indeks Tutupan Hijau Pegunungan										
	RPJMD - Indeks tutupan hutan (Indeks)	IKD	Indeks	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26	Dinas Kehutanan
	RPJMD - Indeks Tutupan Hutan	Indikator Program	indeks	61,41	60,98	60,55	60,12	59,69	59,26	Dinas Kehutanan
15.7 Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal										
15.07.01 Proporsi satwa liar dari hasil perburuan atau perdagangan ilegal										
15.7.1.(a) Jumlah kasus perburuan atau perdagangan ilegal TSL										
15.9 Pada tahun 2020, mengitegrasikan nilai- nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati kedalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan										
15.09.01 (a)? Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis; dan										
(b)? integrasi keanekaragaman hayati ke dalam sistem akuntansi dan pelaporan nasional atau Sistem Akuntansi Lingkungan- Ekonomi										
15.9.1.(a) Rencana pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Aichi 2 dari Rencana Strategis										
	RPJMD - Jumlah Kawasan Ekosistem Penting yang difasilitasi	Indikator Program	lokasi	1	10	10	10	10	10	Dinas Kehutanan

Tujuan 16: PERDAMAIAN, Keadilan dan KELEMBAGAAN YANG TANGGUH.

3.16 Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.

Upaya untuk mencapai Tujuan 16 TPB/SDGs, yakni **Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait, dengan Arah Kebijakan Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
2. Strategi Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat, dengan Arah Kebijakan Peningkatan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kab/Kota.
3. Strategi Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat, dengan Arah Kebijakan Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penanganan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek).
4. Strategi Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dengan Arah Kebijakan Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur.
5. Strategi Meningkatkan upaya pencegahan terjadinya konflik antar umat beragama, dengan Arah Kebijakan Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
6. Strategi Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Sosial Budaya, dengan Arah Kebijakan Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama

7. Strategi Terwujudnya Ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlnadaskan ABS SBK, dengan Arah Kebijakan Membuat Peta jalan ABS SBK.
8. **Strategi dan arah kebijakan urusan pemerintahan umum, antara lain yakni :**
Melaksanakan deteksi dini dan cegah dini pada lapisan masyarakat
 - a) Penguatan Kapasitas kelembagaan masyarakat
 - b) Penguatan Idiologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
 - c) Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika, Budaya Berpolitik
 - d) Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 - e) Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Pelayanan Perkantoran, Kepegawaian, dan Keuangan
 - f) Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah
 - g) Peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi/upaya penanganan konflik sosial
 - h) Penguatan tim dan forum-forum strategis daerah yang sudah terbentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (GT-GNRM), Tim Pemantauan Orang Asing (POA), Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD), Tim Penangan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi (Ketanek)
 - i) Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai -nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam masyarakat yang multi kultur
 - j) Melaksanakan pembekalan bagi tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dalam penguatan kerukunan umat beragama
 - k) Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
 - l) Melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat dan pengurus partai politik
 - m) Melaksanakan sosialisasi tentang hak dan kewajiban bagi organisasi kemasyarakatan
 - n) Meningkatkan Tata Kelola dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah
 - o) Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Strategi dan arah kebijakan urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, antara lain yakni :
 - a) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagai acuan bagi Pemda, dan Organisasi dalam pelaksanaan strategi PUG

- b) Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- c) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG
- d) Meningkatkan penguatan organisasi perempuan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan.
- e) Meningkatkan pelatihan dan keterampilan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan
- f) Meningkatkan kapasitas SDM perempuan bidang Politik, hukum, sosial dan ekonomi.
- g) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan yang responsif gender di OPD provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota
- h) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi K/L, Pemda, dan Organisasi
- i) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program dan kegiatan pada OPD Provinsi dan Pemda yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- j) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan
- k) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan perempuan.
- l) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan, pemberdayaan perempuan atas korban kekerasan.
- m) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap perempuan
- n) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran perlindungan perempuan di Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota dan Organisasi
- o) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan kualitas keluarga sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
- p) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran kualitas keluarga pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

- q) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat kualitas keluarga pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga
- r) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan kualitas keluarga di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
- s) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang peningkatan kualitas keluarga.
- t) Meningkatkan efektifitas lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga.
- u) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan pemenuhan hak anak, termasuk kebijakan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
- v) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran pemenuhan hak dan perlindungan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- w) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak
- x) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi
- y) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- z) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan terhadap korban kekerasan.
- aa) Meningkatkan efektifitas lembaga koordinasi layanan korban kekerasan terhadap anak.
- bb) Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan pembentukan dan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- cc) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan data gender dan anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
- dd) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran data gender dan anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
- ee) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan data gender dan anak

- ff) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan data gender dan anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi
 - gg) Meningkatkan advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang data gender dan anak.
 - hh) Melakukan pelaksanaan sistem data gender dan anak.
 - ii) Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan pelaksanaan perlindungan khusus anak sebagai acuan bagi Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan Organisasi
 - jj) Meningkatkan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran perlindungan khusus anak pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - kk) Meningkatkan penguatan jejaring kelembagaan dan penggiat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan perlindungan khusus anak
 - ll) Melakukan evaluasi dan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan program, anggaran dan kegiatan perlindungan khusus anak di Pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota dan organisasi.
 - mm) Melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi dan sinkronisasi kegiatan bidang perlindungan khusus anak.
 - nn) Meningkatkan pelaksanaan pencegahan, penanganan dan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus.
10. Strategi dan arah kebijakan urusan Ketentraman dan Ketertiban umum, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran perda
 - b) Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait
 - c) Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat
 - d) Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
 - e) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana aparatur, kuantitas dan kualitas aparatur, pemenuhan penerapan standar pelayanan minimal urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - f) Peningkatan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan pemberdayaan PPNS

- g) Peningkatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- h) Peningkatan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
- i) Peningkatan penyelenggaraan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- j) Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur, kuantitas dan kualitas aparatur, penerapan standar pelayanan minimal urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

11. Strategi dan arah kebijakan urusan Sosial, antara lain yakni :

- a) Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar di dalam panti.
- b) Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar PMKS Lainnya di dalam panti.
- c) Terpenuhinya peningkatan kapasitas SDM penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan lanjut usia terlantar PMKS lainnya di dalam panti.
- d) Meningkatnya peran aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e) Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersertifikasi.
- f) Terpenuhinya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Terlaksananya penguatan nilai KSN dan kepahlawanan.
- g) Terlaksananya pemberian gelar kepada pahlawan nasional di daerah.
- h) Memberikan perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- i) Termutakhirkannya data fakir miskin di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- j) Meningkatnya persediaan Permakanan (Bantuan Logistik) Korban Bencana.
- k) Penanganan masalah social dari berbagai sumber pendanaan secara terpadu
- l) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi
- m) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
- n) Pemenuhan Kebutuhan Dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dalam panti
- o) Peningkatan layanan rehabilitasi social untuk PMKS lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti
- p) Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Penduduk Miskin dan Rentan
- q) Penguatan Skema Penanggulangan Bencana
- r) Memberikan pelayanan langsung untuk melindungi, merehabilitasi dan memberdayakan sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar PPKS.

- s) Meningkatkan kapasitas SDM dalam membina pelayanan dalam panti.
- t) Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- u) Menumbuhkan kembangkan nilai-nilai Kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial.
- v) Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial .
- w) Memutakhirkan data Fakir Miskin.
- x) Tersedianya bantuan logistik untuk korban bencana.
- y) Koordinasi intervensi masalah social dengan melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi serta masyarakat
- z) Pemanfaat data terpadu kesejahteraan social (DTKS) sebagai sumber data utama intervensi yang melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, lembaga filantropi serta masyarakat
- aa) Publikasi sasaran intervensi social yang telah dilakukan sebagai wujud transparansi pelaksanaan kegiatan
- bb) Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan oleh Provinsi
- cc) Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi
- dd) Pemulangan Korban Tindak Kekerasan/ Orang Terlantar didaerah Provinsi untuk dipulangkan ke daerah Kabupaten/ Kota asal
- ee) Penguatan Kelembagaan Pengangkatan Anak antar WNI melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Keluarga/ Perorangan
- ff) Pengelolaan Data Kemandirian Sosial, Fakir Miskin dan Rentan Cakupan Daerah
- gg) Penguatan dan Pemberian Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Provinsi

12. Strategi dan arah kebijakan fungsi penunjang Sekretariat Daerah, antara lain yakni :

- a) Optimalisasi fasilitasi dan koordinasi penyusunan perundang-undangan
- b) Optimalisasi fasilitasi bantuan hukum
- c) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui capaian realisasi fisik dan keuangan dalam pelaksanaan program/kegiatan yang efektif dan efisien
- d) Peningkatan penataan produk hukum daerah
- e) Peningkatan penyelesaian bantuan hukum
- f) Tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju penerapan reformasi birokrasi pemerintahan yang baik

- g) Penetapan perangkat daerah Provinsi dengan pengkajian dan evaluasi ketepatan tupoksi dan urusan
 - h) Mengendalikan pembentukan perangkat daerah melalui verifikasi dan fasilitasi
 - i) Penetapan jabatan pada Perangkat Daerah dengan metode Analisis Jabatan
 - j) Meningkatkan pemahaman SDM terhadap kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah
 - k) Meningkatkan koordinasi dengan tim evaluator dari Kementerian PAN dan RB
 - l) Meningkatkan proses penganggaran yang menyesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai.
 - m) Meningkatkan koordinasi dengan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pencapaian Target Kinerja Pemerintah Daerah
 - n) Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian terkait
13. Strategi dan arah kebijakan fungsi keuangan antara lain yakni :
- a) Meningkatkan validasi data keuangan dan aset daerah
 - b) Meningkatkan Optimalisasi penggunaan dan pengamanan aset daerah
 - c) Meningkatkan asistensi dan rekonsinasi data anggaran
 - d) Meningkatkan Pelatihan/bintek pengelolaan keuangan dan aset daerah
 - e) Meningkatkan pengawasan internal dan eksternal
 - f) Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pelaporan
 - g) Meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan
 - h) Peningkatan efektifitas dan daya guna keuangan daerah melalui restrusasi Perda/Pergub/Kebijakan
 - i) Peningkatan pengawasan aset daerah
 - j) Pembinaan pengelolaan keuangan daerah Kab/Kota yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
 - k) Sosialisasi peraturan/kebijakan pengelolaan keuangan daerah
 - l) Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dan stakeholder terkait
 - m) Menetapkan dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan prioritas daerah
 - n) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan/bimbingan teknis bagi ASN
 - o) Mengoptimalkan pelaksanaan rekonsiliasi belanja langsung
14. Strategi dan arah kebijakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan bimbingan teknis dalam pengembangan inovasi pelayanan publik
 - b) Memberikan bimbingan dalam peningkatan kompetensi aparatur untuk mewujudkan penataan ketatalaksanaan organisasi yang baik
 - c) Meningkatnya peranan pengawasan organisasi
 - d) Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Biro Organisasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.

- e) Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - f) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - g) Pelayanan Pencatatan Sipil
 - h) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di provinsi
 - i) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 - j) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
 - k) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - l) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
 - m) Penyediaan Profil Kependudukan
15. Strategi dan arah kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain yakni :
- a) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b) Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SPBE
 - c) Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik yang berkualitas
 - d) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
 - e) Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
 - f) Meningkatkan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah
 - g) Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektor
 - h) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor berdasarkan Prinsip satu Data
 - i) Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - j) Pembangunan sistem penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah Daerah

Tabel 3.17
Target Pencapaian Indikator Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.										
16.01.01 Angka korban kejahatan pembunuhan per 100.000 penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.										
16.1.1.(a) Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.										
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.01.02 Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk terpilah berdasarkan jenis kelamin, umur dan penyebab kematian.										
16.1.2.(a) Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.										
	RPJMD - Konflik di Sumatera Barat (Jumlah Kasus)	IKD	Kasus	4	3	3	2	2	2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.01.03 Proporsi penduduk yang mengalami (a) kekerasan secara fisik, (b) kekerasan psikologi atau (c) kekerasan seksual dalam 12 bulan terakhir.										
16.1.3.(a) Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.1.4* Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.										
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya	Indikator Program	nilai	3,09	3,1	3,11	3,12	3,13	3,14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Skor Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indikator Program	nilai	3	3,01	3,02	3,03	3,04	3,05	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.										
16.10.01 Jumlah kasus terverifikasi atas pembunuhan, penculikan dan penghilangan secara paksa, penahanan sewenang-wenang dan penyiksaan terhadap jurnalis, awak media, serikat pekerja, dan pembela HAM dalam 12 bulan terakhir.										
16.10.1.(a) Indikator Kebebasan dari kekerasan bagi jurnalis dan awak media.										
16.10.1.(b) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).										
16.10.1.(c) Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.10.2* Jumlah negara yang mengadopsi dan melaksanakan konstitusi, statutori dan/atau jaminan kebijakan untuk akses publik pada informasi.										
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	NA	10	20	30	40	50	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Indikator Program	%	5	10	20	30	40	50	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualifikasi Informatif										
	RPJMD - Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi (%)	IKD	%	NA	10	20	30	40	50	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran	Indikator Program	%	5	10	20	30	40	50	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	informasi Publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi									
16.10.2.(b) Jumlah penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi non litigasi.										
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyalahgunaan terhadap anak.										
16.02.01 Proporsi anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam sebulan terakhir										
16.2.1.(a) Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.2.1.(b) Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.2.2* Angka korban perdagangan manusia per 100.000 penduduk menurut jenis kelamin, kelompok umur dan jenis eksploitasi.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.02.03 Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-29 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.										
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.2.3.(a) Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.										
16.03.01 Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan lalu yang melaporkan kepada pihak berwajib atau pihak berwenang yang diakui dalam mekanisme resolusi konflik.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.3.1.(a) Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi.										
	RPJMD - Indeks Perlindungan Anak (IPA)	IKU	Indeks	65,75	65,85	65,95	66,05	66,15	66,25	
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (rasio per 100)	IKD	Rasio	17	16	15	14	13	12	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Rasio kekerasan terhadap anak per 10	IKD	Rasio	2,16		2,08	2,04	2		Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Indeks pemenuhan hak anak	IKD	Indeks	64,73	65,23	65,73	66,23	66,73	67,23	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase anak memerlukan Perlindungan khusus yang mendapatkan Layanan komprehensif	Indikator Program	%	81	84	88	92	96	100	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.3.1.(b) Persentase orang miskin yang menerima bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
16.3.1.(c) Persentase orang tidak mampu yang menerima layanan hukum berupa pos bantuan hukum, sidang di luar gedung pengadilan, dan pembebasan biaya perkara.										
	RPJMD - Persentase bantuan hukum yang diselesaikan (%)	IKD	%	100	100	100	100	100	100	Biro Hukum
16.03.02 Proporsi tahanan terhadap seluruh tahanan dan narapidana.										
16.3.2.(a) Proporsi tahanan yang melebihi masa penahanan terhadap seluruh jumlah tahanan.										
16.03.03 Proporsi penduduk yang mengalami perselisihan dalam 2 tahun terakhir dan mengakses mekanisme penyelesaian perselisihan secara formal maupun informal, berdasarkan jenis mekanisme penyelesaian.										
16.3.3 (a) Indeks Akses terhadap Keadilan (Access to Justice Index)										
16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.										
16.05.01 Proporsi penduduk yang memiliki paling tidak satu kontak hubungan dengan petugas, yang membayar suap kepada petugas atau diminta untuk menyuap petugas tersebut dalam 12 bulan terakhir.										
16.5.1.(a) Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).										
16.05.02 Proporsi pelaku usaha yang paling tidak memiliki kontak dengan petugas pemerintah dan yang membayar suap kepada seorang petugas, atau diminta untuk membayar suap oleh petugas-petugas, selama 12 bulan terakhir.										
Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	2022	2023	2024	2025	2026	Keterangan
16.6.1* Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.										
16.6.1.(a) Persentase opini instansi pemerintah yang mendapat opini WTP.										
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	67,5	68,5	69,5	70,5	71	71,87	
16.6.1.(b) Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP B										
	RPJMD - Nilai SAKIP (predikat)	IKU	Predikat	BB	BB	BB	A	A	A	
	RPJMD - Jumlah OPD yg memiliki nilai SAKIP A (Perangkat Daerah)	IKD	Perangkat Daerah	7	8	10	12	14	16	Biro Organisasi
	RPJMD - Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP A (80,01)	Indikator Program	Perangkat Daerah	7	8	10	12	14	16	Biro Organisasi
16.6.1.(c) Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB ? B										
	RPJMD - Indeks reformasi birokrasi	IKU	Indeks	67,5	68,5	69,5	70,5	71	71,87	
16.06.02 Proporsi penduduk yang puas terhadap										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
pengalaman terakhir atas layanan publik.										
16.6.2.(a) Jumlah Instansi pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik.										
	RPJMD - Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (indeks)	IKU	Indeks	84,3	84,5	87,5	88,5	89,5	89,5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Achmad Mochtar Bukittingi Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Rumah Sakit Umum Daerah Pariaman
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	IKD	Indeks	80	81	82	83	84	85	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91	92	93	94	95	96	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	85	86	87	88	89	90	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	91	92	93	94	95	96	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	%	92	92	93	94	95	96	
	RPJMD - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indikator Program	Nilai/Rasio	82,60 / 3,40	82,60 / 3,40	82,75 / 3,41	82,90 / 3,43	83,05 / 3,45	83,20 / 3,47	Dinas Penanaman Modal Provinsi Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan toilet laki-laki dan Perempuan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana cuci tangan yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air bersih yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
	Progul - Jumlah sanitasi layak di Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) Provinsi (75 UKPP) yang tersedia > Jumlah UKPP dengan sarana air minum yang layak	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
	Progul - Jumlah UKPP yang telah mengimplementasikan digitalisasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat	Indikator Progul	unit	4	50	75	75	75	75	Biro Organisasi
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.										
16.07.01 Proporsi jabatan di lembaga nasional dan daerah, meliputi (a) lembaga legislatif; (b) lembaga pelayanan publik; (c) lembaga peradilan, dibanding distribusi nasional, menurut jenis kelamin, kelompok umur, orang dengan disabilitas dan kelompok masyarakat.										
16.7.1.(a) Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).										
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	59,09	59,12	60,01	61,2	61,75	62,42	
	RPJMD - Persentase perempuan di legislative (%)	IKD	%	10,76	10,76	10,76	12,3	12,3	12,3	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.7.1.(b) Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).										
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	59,09	59,12	60,01	61,2	61,75	62,42	
	RPJMD - Persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan (%)	IKD	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
	RPJMD - Persentase perempuan di pengambil kebijakan	Indikator Program	%	11,54	11,54	13,2	13,2	15,09	15,09	Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB
16.07.02 Proporsi penduduk yang percaya pada pengambilan keputusan yang inklusif dan responsif menurut jenis kelamin, umur, difabilitas dan kelompok masyarakat.										
16.7.2.(a) Indeks Kapasitas Lembaga Demokrasi										
16.7.2.(b) Indeks Aspek Kebebasan										
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	67,69	68,01	68,5	68,75	69,25	70	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
16.7.2.(c) Indeks Kesetaraan										
	RPJMD - Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IKU	Indeks	59,09	59,12	60,01	61,2	61,75	62,42	
	RPJMD - Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar (nilai)	IKD	Nilai	67,69	68,01	68,5	68,75	69,25	70	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.										
16.9.1* Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.										
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	86,43	86,62	90,50	92,37	94,25	96,16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	RPJMD - Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Indikator Program	%	30	40	50	60	70	80	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	91,47	94	95	96	97	98	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(a) Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 0-17 tahun pada 40% berpendapatan bawah.										
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	86,43	86,62	90,50	92,37	94,25	96,16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	91,47	94	95	96	97	98	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16.9.1.(b) Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun										
	RPJMD - Persentase kepemilikan dokumen kependudukan(%)	IKD	%	86,43	86,62	90,50	92,37	94,25	96,16	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	RPJMD - Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada anak usia 0-17 tahun	Indikator Program	%	91,47	94	95	96	97	98	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
16.a Memperkuat lembaga- lembaga nasional yang relevan, termasuk melalui kerjasama internasional, untuk membangun kapasitas di semua tingkatan, khususnya di negara berkembang, untuk mencegah kekerasan serta memerangi terorisme dan kejahatan.										
16.a.1* Tersedianya lembaga hak asasi manusia (HAM) nasional yang independen yang sejalan dengan Paris Principles.										
16.b Menggalakkan dan menegakkan undang-undang dan kebijakan yang tidak diskriminatif untuk pembangunan berkelanjutan.										
16.b.1 Proporsi penduduk yang melaporkan mengalami diskriminasi dan pelecehan dalam 12 bulan lalu berdasarkan pada pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										
16.b.1.(a) Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.										



Tujuan 17: KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN

3.17 Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Upaya untuk mencapai Tujuan 17 TPB/SDGs, yakni **Kemitraan untuk Mencapai Tujuan**, telah tertuang dalam Strategi Umum Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mendayagunakan nilai-nilai gotong royong dan kerjasama yang melibatkan semua komponen masyarakat baik di daerah maupun di rantau dengan pendekatan pembangunan terpadu yang bersifat holistik dan integratif.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan secara umum dan sektoral sebagai berikut :

1. Strategi Penumbuhan dan Peningkatan SDM enterpreneur, dengan Arah Kebijakan:
 - a) Penumbuhan dan Peningkatan kualitas SDM enterpreneur
 - b) Peningkatan pemberdayaan dan pendampingan enterpreneur
2. Strategi Peningkatan fasilitasi enterpreneur, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan kolaborasi melalui sinergisitas dalam rangka pemberdayaan enterpreneur
 - b) Peningkatan fasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar bagi enterpreneur
 - c) Peningkatan inovasi, branding dan sertifikasi produk
 - d) Peningkatan digitalisasi produk bagi pelaku enterpreneur
3. Strategi Meningkatkan Realisasi Investasi di Sumatera Barat, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan Data Potensi dan Peluang Investasi
 - b) Peningkatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - c) Peningkatan Upaya Promosi Investasi
4. Strategi Meningkatkan kontribusi ekonomi digital, dengan Arah Kebijakan :
 - a) Peningkatan industri kecil dan menengah, UMKM yang berkompeten dan meleak teknologi digital
 - b) Penumbuhan dan pengembangan marketplace
 - c) Fasilitasi penumbuhan pelaku e-commerce
5. Strategi dan arah kebijakan urusan Komunikasi dan Informatika, antara lain yakni :
 - a) Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - b) Peningkatan Koordinasi Pengelolaan SPBE
 - c) Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik yang berkualitas
 - d) Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan Informasi
 - e) Meningkatkan penyebaran informasi dan komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

- f) Meningkatkan penerapan SPBE di Pemerintah Daerah
 - g) Peningkatan Ketersediaan Data Statistik Sektor
 - h) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektor berdasarkan Prinsip satu Data
 - i) Peningkatan Pemanfaatan Data Statistik dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - j) Pembangunan sistem penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi pemerintah Daerah
6. Strategi dan arah kebijakan fungsi penunjang Perencanaan, antara lain yakni :
- a) Menerapkan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, atas-bawah dan bawah-atas.
 - b) Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial.
 - c) Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d) Mengoptimalkan Pelaksanaan Musrenbang.
 - e) Meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan.
 - f) Mengoptimalkan Penerapan Integrasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - g) Pembinaan teknis penyusunan dokumen perencanaan dengan penajaman indikator sesuai bidang urusan.
 - h) Peningkatan kualitas pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah.
 - i) Penerapan Kerangka Belanja Kegiatan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
 - j) Pemanfaatan data & informasi yang valid, mudah diakses dan mutakhir berbasiskan Satu Data.
7. Strategi dan arah kebijakan urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain yakni :
- a) Meningkatkan bimbingan teknis dalam pengembangan inovasi pelayanan publik
 - b) Memberikan bimbingan dalam peningkatan kompetensi aparatur untuk mewujudkan penataan ketatalaksanaan organisasi yang baik
 - c) Meningkatkan peranan pengawasan organisasi
 - d) Melaksanakan penyusunan laporan akutabilitas kinerja Biro Organisasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - e) Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - f) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
 - g) Pelayanan Pencatatan Sipil
 - h) Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di provinsi
 - i) Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

- j) Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- k) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- l) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
- m) Penyediaan Profil Kependudukan

Tabel 3.18
Target Pencapaian Indikator Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.										
17.1.1* Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.										
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	36	37,84	38,25	39,56	40,75	41	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	3,6	3,58	3,56	3,55	3,54	3,53	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	35,4	36,6	37,8	39	40,3	41,5	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	Badan Pendapatan Daerah
17.1.1.(a) Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.										
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	36	37,84	38,25	39,56	40,75	41	
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	35,4	36,6	37,8	39	40,3	41,5	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	3,4	7	7	7	7	7	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	Badan Pendapatan Daerah
17.1.2* Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.										
	RPJMD - Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	IKU	%	36	37,84	38,25	39,56	40,75	41	
	RPJMD - Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	IKD	%	3,6	3,58	3,56	3,55	3,54	3,53	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	RPJMD - Rasio PAD terhadap PDRB (%)	IKD	%	35,4	36,6	37,8	39	40,3	41,5	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Persentase Peningkatan PAD (%)	IKD	%	3,4	7	7	7	7	7	Badan Pendapatan Daerah
	RPJMD - Presentase Peningkatan PAD	Indikator Program	%	3,4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	Badan Pendapatan Daerah
17.10 Menggalakkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil di bawah the World Trade Organization termasuk melalui kesimpulan dari kesepakatan di bawah Doha Development Agenda.										
17.10.01 Rata-rata tarif terbobot dunia Free Trade Agreement (FTA).										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
17.10.1(a) Jumlah PTA/ FTA/CEPA yang disepakati										
17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada tahun 2020.										
17.11.01 Bagian negara berkembang dan kurang berkembang pada ekspor global.										
17.11.1.(a) Pertumbuhan ekspor produk non migas										
	RPJMD - Pertumbuhan Nilai Ekspor non migas (Rp	IKD	Rp. Juta	1393,13	1420,99	1449,41	1478,4	1507,97	1538,12	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
	RPJMD - Nilai ekspor	Indikator Program	juta US\$	1393,13	1420,99	1449,41	1478,4	1507,97	1538,12	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
17.16 Meningkatkan kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.										
17.16.01 Jumlah negara yang melaporkan perkembangan kerangka kerja monitoring efektifitas pembangunan multi-stakeholder yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.										
17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.										
17.17.01 Jumlah komitmen untuk kemitraan publik-swasta untuk infrastruktur (dalam US dollars).										
17.17.1.(a) Jumlah Dokumen Daftar Rencana Proyek KPBU (DRK) yang diterbitkan setiap tahun.										
17.17.1.(b) Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).										
17.17.1.(c) Jumlah nilai investasi proyek KPBU berdasarkan tahap perencanaan, penyiapan dan transaksi.										
17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.										
17.18.01 Indikator-indikator statistik untuk pemantauan SDGs										
17.18.1.(a) Persentase pengguna data yang menggunakan data BPS sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.										
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.18.1.(b) Persentase publikasi statistik yang menerapkan standar akurasi sebagai dasar perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan nasional.										
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.18.2* Jumlah negara yang memiliki undang- undang statistik nasional yang tunduk pada Prinsip- prinsip fundamental Statistik Resmi.										
17.18.3* Jumlah negara dengan Perencanaan Statistik Nasional yang didanai dan melaksanakan rencananya berdasar sumber pendanaan.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto,dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.										
17.19.01 Nilai dolar atas semua sumber yang tersedia untuk penguatan kapasitas statistik di negara- negara berkembang.										
17.19.1.(a) Persentase K/L/D/I yang melaksanakan rekomendasi kegiatan statistik.										
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.19.1.(b) Persentase K/L/D/I yang menyampaikan metadata sektoral dan khusus sesuai standar.										
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	IKD	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	IKD	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam meakukan evaluasi pembangunan daerah	Indikator Program	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
	RPJMD - Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistic dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Indikator Program	%	50	60	70	80	90	100	Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik
17.19.02 Proporsi negara yang a)? melaksanakan paling tidak satu Sensus Penduduk dan Perumahan dalam sepuluh tahun terakhir, dan b)? mencapai 100 persen pencatatan kelahiran dan 80 persen pencatatan kematian.										
17.19.2 (a) Terlaksananya Sensus Penduduk dan Perumahan pada tahun 2020.										
17.19.2.(b) Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register).										
17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.										

Kode Indikator	Nama Indikator SDG's	Sumber Data	Satuan	Baseline (2021)	Target Pencapaian					Instansi Pelaksana
					2022	2023	2024	2025	2026	
17.03.01	Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/ FDI), bantuan pembangunan dan Kerjasama Selatan-Selatan sebagai proporsi dari pendapatan nasional bruto.									
17.03.02	Volume pengiriman uang/remitansi (dalam US dollars) sebagai proporsi terhadap total PDB.									
17.3.2.(a)	Proporsi volume remitansi PMI (dalam US dollars) terhadap PDB.									
17.6	Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.									
17.06.01	Langganan broadband internet tetap per 100 penduduk menurut tingkat kecepatannya									
17.6.1.(a)	Persentase pelanggan terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (fixed broadband) terhadap total rumah tangga									
17.6.1.(b)	Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (kumulatif)									
17.8	Mengoperasional- isasikan secara penuh bank teknologi dan sains, mekanisme pembangu- nan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada tahun 2017 dan meningkat- kan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khu- susnya teknologi informasi dan komunikasi.									
17.8.1*	Persentase pengguna internet									

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

4.1 Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dilakukan untuk mengamati perkembangan pencapaian TPB/SDGs secara periodik dalam kurun waktu yang telah ditentukan, sehingga kemajuan pencapaian target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan dapat diukur. Selain itu, pemantauan dimaksudkan juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan/atau berkemungkinan timbul, sehingga dapat segera diambil tindakan yang diperlukan.

Sementara, evaluasi dilaksanakan untuk memperoleh gambaran atas capaian TPB/SDGs, dan menganalisis permasalahan serta penyebab permasalahan yang timbul. Hasil evaluasi bermanfaat sebagai umpan balik bagi perbaikan perencanaan kebijakan, program dan kegiatan terutama yang terkait dengan TPB/SDGs.

4.2 Mekanisme Pelaksanaan Pemantauan, dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara, mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak non-pemerintah dilakukan secara *selfassessment*. Kedua mekanisme ini selanjutnya akan disinkronkan dan digabungkan oleh Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 sehingga menjadi satu kesatuan laporan pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat.

Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting yang perlu dilaksanakan untuk memastikan pencapaian TPB dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian TPB yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah hingga pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pelaksana TPB.

4.2.1 Landasan Hukum

Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu kewajiban dari Tim Pelaksanaan TPB dalam pasal 7 butir b Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan pasal 6 Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan. Pelaporan pencapaian pelaksanaan TPB diamanatkan dalam Peraturan Presiden tersebut di mana setiap Menteri/Kepala Lembaga dan juga Gubernur Kepala Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sebagai Koordinator Pelaksana SDGs Nasional.

Demikian juga dengan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 050-94-2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Strategis Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) Tahun 2022-2026, diamanatkan bahwa Tim Koordinasi Daerah memantau dan mengevaluasi pelaksanaan TPB/SDGs dan melaporkan hasil pemantauan kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali dan hasil evaluasi setiap satu tahun sekali.

4.2.2 Prinsip Pemantauan dan Evaluasi

Kegiatan Pemantauan dan evaluasi program Pencapaian TPB/SDGs pada dasarnya dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik oleh lembaga pemerintah dilakukan secara internal oleh Perangkat Daerah (PD) terkait, maupun oleh lembaga non pemerintah. Hasil Pemantauan dan evaluasi, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun non-pemerintah diverifikasi dan dikonsolidasi oleh Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026.

Disamping prinsip tersebut di atas, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang antara lain :

- 1) Pelaku pemantauan dan evaluasi adalah semua pelaku/*stakeholders* yang berkepentingan terhadap pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat. Dengan kata lain, pelaku pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program pencapaian target TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat adalah pemantau bagi program yang terkait langsung dengan pelaksana program dan kegiatan dan bagi pelaku lain. Dengan demikian diharapkan dapat terlaksananya prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab mengkoordinasikan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing *stakeholders* baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
- 2) Obyek pemantauan dan evaluasi adalah semua kebijakan, program dan kegiatan yang terkait dengan upaya pencapaian target TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena

itu, kegiatan pemantauan dilaksanakan sejak awal dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.

- 3) Sarana pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB/SDGs adalah seluruh sarana yang dimiliki oleh masing-masing pelaku, selaras dengan semangat kerelawanan dan keikutsertaan, sehingga para pelaku dapat mempergunakan metode dan alat mereka sendiri untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang hasilnya dikaji bersama sebagai dasar perbaikan program dan kegiatan pencapaian TPB/SDGs selanjutnya.
- 4) Metode pemantauan dan evaluasi terhadap kebijakan, program dan kegiatan pencapaian target TPB/SDGs ditentukan oleh masing-masing pihak, sesuai dengan kapasitas dan mekanisme kerja masing-masing dengan semangat memperbaiki kebijakan, program dan kegiatan pencapaian TPB/SDGs yang sedang berjalan.

4.2.3 Manfaat Pemantauan dan Evaluasi

Terdapat dua manfaat pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs yaitu:

- 1) Manfaat terkait dengan operasional

Melalui pemantauan dan evaluasi kita dapat mengetahui cara yang tepat untuk mencapai target TPB/SDGs yang dikehendaki dan sekaligus dapat mengidentifikasi faktor-faktor kritis yang sangat menentukan keberhasilan kegiatan program Pencapaian TPB/SDGs yang dilakukan, melakukan perubahan-perubahan modifikasi dan supervisi terhadap kegiatan/program Pencapaian TPB/SDGs yang dilaksanakan, dan dapat mengembangkan tujuan-tujuan serta analisis informasi yang bermanfaat bagi pelaporan kegiatan.

- 2) Kegunaan terkait dengan kebijakan

Berdasarkan hasil evaluasi dapat dirumuskan kembali strategi pencapaian target TPB/SDGs, pendekatan dan asumsi-asumsi yang digunakan. Selain itu, untuk menggali dan meningkatkan kemampuan pengetahuan tentang hubungan antar program dan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi di masa mendatang.

4.3 Jadwal Pemantauan dan Evaluasi Pencapaian TPB/SDGS

Kegiatan pemantauan dan evaluasi percepatan pencapaian target TPB dibagi menurut waktu pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Pemantauan pada saat program dan kegiatan berjalan, dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- 2) Evaluasi tahunan, dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk mengetahui pencapaian target-target tahunan yang telah disusun.
- 3) Evaluasi akhir (*summative evaluation*), dilakukan pada akhir periode rencana aksi ini yaitu tahun 2026.

Dengan demikian kegiatan pemantauan dan evaluasi bukan merupakan kegiatan yang sekali saja dilakukan pada saat akhir program/kegiatan tetapi kegiatan yang bisa dilakukan sesuai tahapan yang dilaksanakan.

4.3.1 Mekanisme Pemantauan Dan Evaluasi

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB yang dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sementara, mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak non-pemerintah dilakukan secara *selfassessment*. Kedua mekanisme ini selanjutnya akan disinkronkan dan digabungkan oleh Tim Koordinasi Daerah Pencapaian TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026 sehingga menjadi satu kesatuan laporan pencapaian target dan indikator TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat.

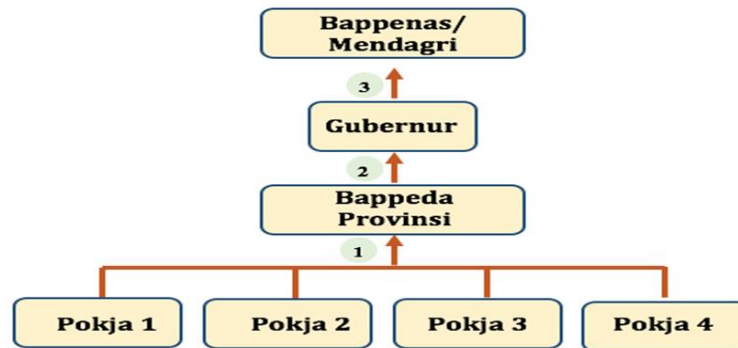
Pemantauan dan evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting yang perlu dilaksanakan untuk memastikan pencapaian TPB dari waktu ke waktu sebagai bagian integral dari siklus pelaksanaan pencapaian TPB yang dimulai dari penyusunan Rencana Aksi Daerah hingga pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh setiap pemangku kepentingan pelaksana TPB.

a) Mekanisme Pemantauan RAD

Kewajiban penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam rangka pencapaian TPB dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 Perpres 59 Tahun 2017 jo Perpres 111 Tahun 2022. Sementara itu laporan pencapaian atas pelaksanaan target TPB Provinsi disampaikan oleh Gubernur setiap enam bulan sekali kepada Menteri PPN/Bappenas selaku koordinator Pelaksana TPB dan juga Menteri Dalam Negeri sesuai pasal 17 ayat 2. Adapaun alur pemantauan pelaksanaan TPB daerah adalah sebagai berikut:

Gambar 4.1

Alur Informasi untuk Pemantauan RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat



Alur Laporan

1) Langkah 1

Setiap enam bulan sekali, Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Propinsi Sumatera Barat mengkoordinasikan pembahasan pencapaian RAD TPB/SDGs yang dilakukan oleh Pokja 4 pilar dan kemudian menuangkannya ke dalam format matriks 2 yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai setiap target dan indikator serta alokasi anggaran untuk menjalankan program/kegiatan tersebut.

2) Langkah 2

Matriks konsolidasi dari semua pilar dilengkapi dengan penjelasan tentang kemajuan, kendala dan langkah-langkah yang telah diambil untuk mencapai standar yang telah dinyatakan dalam RAD dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Barta oleh Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Pelaksana TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat.

3) Langkah 3

Gubernur menyampaikan laporan kemajuan pencapaian TPB/SDGs dengan menggunakan format yang telah ditetapkan kepada Menteri PPN/Bappenas melalui Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas. Laporan yang sama juga disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan tembusannya disampaikan kepada Sekretariat TPB/SDGs Nasional untuk koordinasi pelaporan RAD dari seluruh Provinsi.

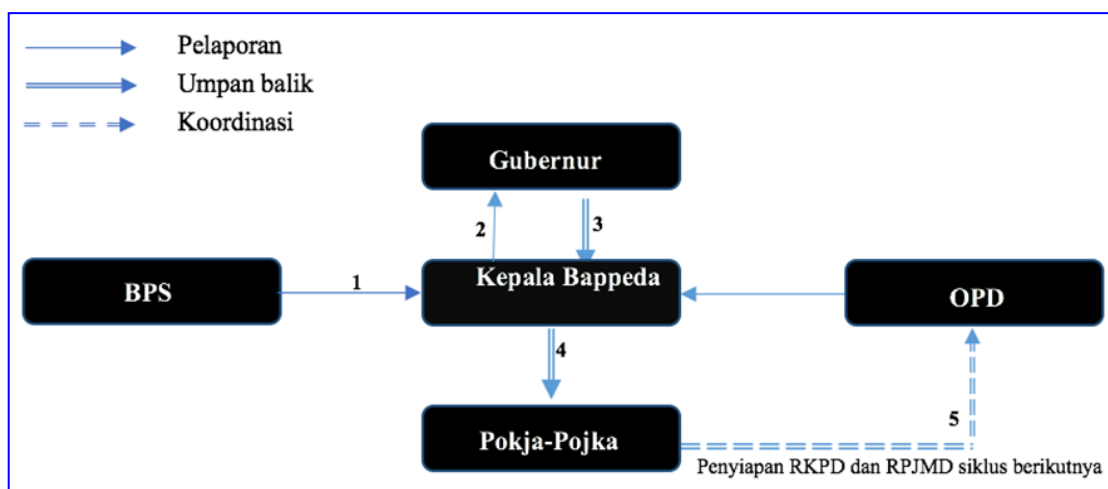
Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memudahkan proses perbaikan atau peningkatan kualitas pencapaian indikator TPB/SDGs yang dilaporkan oleh Gubernur Sumatera Barta. Berdasarkan umpan balik dari Tim Pelaksana TPB/SDGs Nasional, Gubernur Sumatera Barat memperbaiki atau merumuskan ulang program dan kegiatan pencapaian TPB/SDGs daerah dan menuangkannya ke dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran untuk mendapatkan kesepakatan dari DPRD dan kepada Bappeda sebagai arahan penyusunan program dan kegiatan periode berikutnya.

b) Mekanisme Evaluasi

Terdapat dua jenis evaluasi yaitu tahunan dan akhir periode. Kegiatan evaluasi tahunan dilaksanakan pada setiap akhir tahun. Sedangkan evaluasi akhir periode dilaksanakan pada akhir periode RAD TPB/SDGs yaitu tahun 2021. Kegiatan evaluasi dilakukan dengan tujuan untuk menilai pencapaian seluruh indikator TPB/SDGs serta mencari jalan keluar atas kesenjangan yang terjadi antara standar pencapaian yang telah ditetapkan dan realisasinya. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barta. Adapun mekanisme yang diterapkan dalam proses evaluasi pada Provinsi Sumatera Barat ada sebagai berikut:

Gambar 4.2
Mekanisme evaluasi RAD TPB Provinsi Sumatera Barat



Alur laporan evaluasi

1) Langkah 1

Laporan evaluasi atas pencapaian indikator TPB/SDGs utamanya datang dari BPS melalui berbagai survei yang mencakup Provinsi Sumatera Barat. Di samping itu, laporan evaluasi diperoleh juga dari berbagai survei sektoral dan laporan-laporan administratif yang dilakukan oleh OPD.

Laporan evaluasi tersebut yang telah dipetakan ke dalam jenis-jenis indikator provinsi disampaikan Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Sumatera Barat untuk dikonsolidasikan.

2) Langkah 2

Ketua Tim Pelaksana menyerahkan laporan yang telah dikonsolidasikan kepada Gubernur sebagai Ketua Tim Pengarah untuk menjadi masukan evaluasi program dan kegiatan bagi pengendalian dan evaluasi program pembangunan.

Alur Umpan Balik

1) Langkah 1

Ketua Tim Pelaksana TPB Provinsi Sumatera Barat mendapatkan arahan kebijakan dari Gubernur Sumatera Barat sebagai Ketua Tim Pengarah terkait hasil evaluasi TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat untuk dipergunakan sebagai bahan perbaikan RPJMD periode berikutnya.

2) Langkah 2

Ketua Tim Pelaksana memberikan penjabaran arahan kebijakan untuk diintegrasikan dalam proses penyiapan RKPD dan RPJMD pada siklus berikutnya kepada Kelompok Kerja TPB Provinsi Sumatera Barat.

3) Langkah 3

Kelompok Kerja merincikan umpan balik yang harus direncanakan dan dianggarkan oleh masing-masing OPD pada program dan kegiatan masing-masing.

4.3.2 Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pihak Non Pemerintah

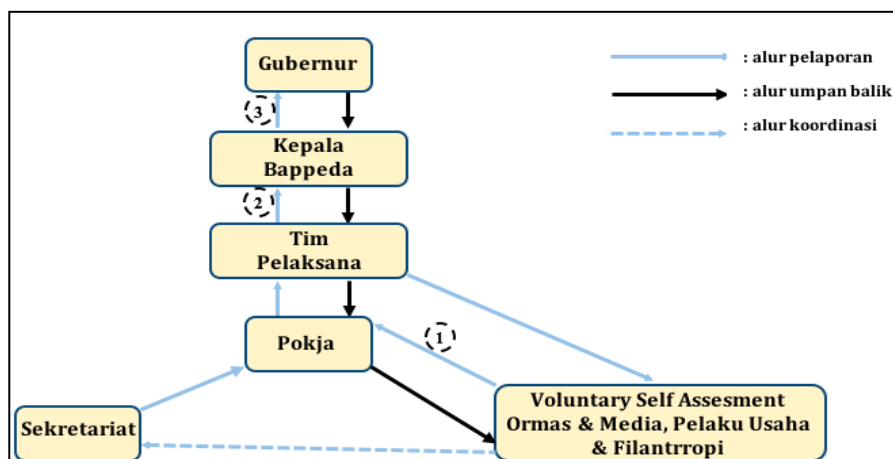
Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak non pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan, media, pelaku usaha, filantropi dan akademisi berbeda dengan mekanisme yang dilakukan oleh pemerintah. Program dan kegiatan dari pihak non pemerintah untuk

pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs bersifat sukarela (*voluntary*), oleh karena itu mekanisme pelaporannya bersifat sukarela. Meskipun bersifat sukarela namun pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Kapasitas organisasi non pemerintah sangat beragam, maka perlu dirumuskan mekanisme pelaporan yang sederhana dan efisien, namun tetap tidak mengurangi esensi hal yang dikerjakan.

Pelaporan dilakukan melalui mekanisme “penilaian diri sukarela” (*voluntary self assesment*) dengan menggunakan format laporan melalui self assesment tool (SAT) yang disepakati. Adapun alur informasi pemantauan dan evalausi dari organisasi non pemerintah adalah sebagai berikut, seperti digambarkan dalam bagan :

Gambar 4.3.

**Alur Informasi Evaluasi untuk RAD TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat
Non-Pemerintah**



Alur Laporan

1) Langkah 1

Organisasi Non Pemerintah melakukan *voluntary self assesment* atas program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan menggunakan format *self assesment tool*, lalu dilaporkan pada Kelompok Kerja pada pilar yang sesuai dengan isu lembaga dimaksud dan/atau disampaikan juga kepada Sekretariat TPB Provinsi Sumatera Barat.

2) Langkah 2

Kelompok Kerja atau Sekretariat TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dari Organisasi Non Pemerintah untuk diolah, divalidasi dan direkapitulasi yang

selanjutnya disampaikan kepada Kepala Bappeda Sumatera Barat selaku Ketua Tim Pelaksana.

3) Langkah 3

Tim Pelaksana merangkum keseluruhan laporan baik dari pemerintah maupun non pemerintah ke dalam suatu laporan yang utuh yang kemudian disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Tim Pengarah.

Alur Umpan Balik

Mekanisme umpan balik dilakukan untuk memudahkan proses perbaikan atau peningkatan kualitas kinerja non pemerintah yaitu : Kelompok Kerja dibantu Sekretariat akan memberikan umpan balik yang bersifat teknis dan ulasan minor kepada Organisasi Non Pemerintah jika terdapat kekuranglengkapan data, kesalahan format laporan, atau terkait dengan konsistensi data.

Mekanisme evaluasi untuk Organisasi Non Pemerintah dilakukan melalui sebuah forum, tim atau kelembagaan khusus yang dibentuk *secara ad hoc* oleh Organisasi Non Pemerintah itu sendiri yang merupakan panel independen dan nir kepentingan. Keorganisasian dari kelembagaan tersebut berisikan para personel yang diakui kompetensi, pengalaman dan integritasnya dari *stakeholders* berkaitan.

Forum atau tim tersebut juga melibatkan perwakilan dari unsur pemerintah serta perwakilan lain bila diperlukan dari penilai independen berdasarkan kompetensinya, misalnya pakar keuangan, manajemen, ahli evaluasi dampak, dan lain-lain.

Hasil dari evaluasi tersebut akan disampaikan kepada Kelompok Kerja yang kemudian akan diserahkan kepada Ketua Tim Pelaksana sebagai bahan evaluasi keseluruhan dari para *stakeholders*. Ketua Tim Pelaksana akan menyampaikan hasil tersebut kepada Ketua Tim Pengarah.

Ketua Tim Pengarah akan memberikan umpan balik yang bersifat strategis kepada para *stakeholders* untuk pencapaian TPB/SDGs yang lebih optimal. Ketua Tim Pelaksana akan memberikan umpan balik penjabaran dari arahan kebijakan strategis dari Ketua Tim Pengarah kepada Kelompok Kerja, yang akan dilanjutkan disampaikan kepada Organisasi Non Pemerintah terkait.

4.4 Publikasi Hasil Pemantauan Dan Evaluasi

Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh Sekretariat TPB/SDGs telah menyiapkan laman sdgs.bappenas.go.id sebagai media publik untuk melakukan disseminasi informasi terkait dengan peraturan, kebijakan, kegiatan seputar TPB/SDGs, dokumen dan informasi publik lainnya.

BAB V PENUTUP

Pencapaian sasaran TPB Provinsi Sumatera Barat dilakukan antara lain melalui penyusunan RAD TPB 5 (lima) tahunan. RAD TPB Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2026 merupakan kelanjutan dari RAD TPB Tahun 2018-2021. Penyusunan RAD TPB Provinsi Sumatera Barat dilakukan secara inklusif dengan melibatkan kabupaten/kota dan berbagai pemangku kepentingan. Rencana Aksi Daerah TPB (RAD TPB) merupakan dokumen rencana kerja 5 (lima) tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian TPB yang sesuai dengan sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Selain itu, Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2026 ini disusun juga sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung tercapainya target-target TPB di tingkat Nasional yang telah digambarkan dalam Rencana Aksi Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RA TPB) Tahun 2020-2024 dan Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia yang disusun oleh Pemerintah Pusat.

Rencana aksi ini memuat target indikator kinerja TPB mulai tahun 2023 sampai dengan 2026 sesuai periodisasi RPJMD. Guna mendukung pencapaian target-target indikator TPB, ditetapkan serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Selain itu terdapat pula dukungan program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan RPJMD dan Renstra PD masing-masing; serta program dan kegiatan dari nonpemerintah (*Non State Actor*).

Keterlibatan pemangku kepentingan nonpemerintah juga terus meningkat, antara lain melalui pembentukan SDGs Center di Universitas Andalas dan di Universitas Negeri Padang. Peran lembaga kemasyarakatan, filantropi, dan perusahaan juga terus meningkat, yang ditunjukkan dengan ikut sertanya pihak nonpemerintah tersebut dalam proses penyusunan RAD TPB. Penyampaian rencana program dan kegiatan dalam RAD TPB merupakan dukungan pihak nonpemerintah dalam pelaksanaan TPB/SDGs.

Sehingga dalam implementasinya pada tahun 2023-2026, maka RAD TPB ini menjadi pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan di Sumatera Barat dalam rangka mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat yang disepakati secara global dalam target-target TPB.

Oleh karena itu RAD TPB ini perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dalam rencana jangka menengah yaitu RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah maupun dalam jangka pendek (tahunan) yaitu dalam RKPD ataupun dalam Renja Perangkat Daerah.

Keberhasilan pencapaian RAD TPB ini tentu saja sangat tergantung dari dukungan pendanaan Pemerintah Daerah melalui APBD, dan tentunya juga tidak menutup kemungkinan pendanaan dari partisipasi swasta dan masyarakat. Terkait dengan hal ini dukungan komitmen dari DPRD sebagai wakil rakyat yang memiliki fungsi *budgeting* dalam penentuan anggaran pembangunan daerah sangat penting artinya untuk menjamin keberhasilan implementasi RAD ini.

Pemerintah Kabupaten/Kota perlu merespon RAD ini dengan melakukan hal yang sama untuk menjamin implementasi dan mencapai target seperti yang diharapkan dalam Peta Jalan Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia.

Selain partisipasi dalam pendanaan guna mendukung tercapainya target-target TPB, peran masyarakat dalam hal ini LSM, Perguruan Tinggi. Lembaga filantropi dan organisasi masyarakat yang lainnya, juga diperlukan untuk ikut melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program-program percepatan pencapaian target TPB, tentu saja sesuai dengan koridor kewenangan dan peraturan yang berlaku.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 31 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN
2023-2026.

- Lampiran 1 : Rencana Kerja Program/Kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2026
dapat di download pada link : https://bit.ly/RADSDGs_2023-2026
- Lampiran 2 : Rencana Kerja Program/Kegiatan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2022-2026
dapat di download pada link : https://bit.ly/RADSDGs_2023-2026
- Lampiran 3 : Rencana Kerja Program/Kegiatan Non Pemerintah Tahun 2022-2026
dapat di download pada link : https://bit.ly/RADSDGs_2023-2026